RELASI AGAMA DAN NEGARA
(REKONSTRUKSI PEMIKIRAN SEKULARISASI NURCHOLIS MAJID)

oleh:
Riko Putra, S.Ag
21.13.1.212.017

Pembimbing:
Dr. Umar Shahab, MA

TESIS
diajukan kepada STAI Sadra Jakarta
untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag)

PROGRAM MAGISTER AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SADRA JAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan *alhamdulillahi rabbil 'alamin*, puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tesis ini dengn judul ***"Relasi Agama dan Negara: Rekonstruksi Pemikiran Sekularisasi Nurcholish Majid".*** Shalawat dan salam senantiasa penulis aturkan kepada *khatamulanbiya' walmursalin* Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua orang-orang yang mendapat syafaatnya kelak.

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa Tesis ini selesai dengan bantuan, petunjuk dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Pimpinan STAI Sadra Jakarta Bapak Dr. Otong Sulaiman, M. Hum beserta seluruh jajaran.
2. Ketua program studi Magister Aqidah dan Fisafat Islam STAI Sadra Jakarta, Bapak Dr. Umar Shahab, MA berserta sekretaris prodi, Bapak Dr. Benny Susilo Ph.d.
3. Pembimbin, Bapak Dr. Umar Shahab yang telah meluangkan waktunya untuk membibing penulis dengan sabar dan dedikasi.
4. Para Dosen Magister Aqidah dan Fisafat Islam STAI Sadra Jakarta, dengan dedikasinya mengajarkarkan ilmu di kelas.
5. Bapak/Ibu, Karyawan/ti Pustaka STAI Sadra Jakarta yang telah memberikan fasilitas referensi yang dibutuhkan.
6. Kepada keluarga yang selalu memberi dukungan kepada penulis: Apak dan Amak yang selalu mendoakan penulis, adik dan uda tercinta, serta tidak lupa penulis ucapkan terima kasih secara khusus kepada keluarga Uda dan Uni di Bekasi yang telah memberikan dukungan kepada penulis baik materil maupun non materil.
7. Teman-teman Falsafatuna yang selalu antusias dengan perkembangan Tesis ini : Pacik Samara, Pakyai Aris, Mba Aini, Om Fata,Guru Khadafi, Bg Ainul, Pak Sulaiman, Habib Hasan, Pak Adi, Pak Tajudin dan lain yang tidak tersebutkan.

Semoga segala bentuk kebaikan dengan bentuk apapun yang diterima penulis menjadi amal saleh dan semoga mendapat balasan melebihi apa yang diberikan oleh Allah SWT. Tentunya dalam hal ini semoga apa yang ditulis menjadi bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Jakarta, 23 Februari 2025

Riko Putra, S.Ag
21.13.1.212.017

RELASI AGAMA DAN NEGARA:REKONSTRUKSI PEMIKIRAN SEKULARISASI NURCHOLISH MAJID

Disusun Oleh:
Riko Putra, S.Ag
21.13.1.212.017

Pembimbing:
Dr. Umar Shahab, MA

TESIS
Diajukan kepada STAI Sadra
Sebagai syarat memperoleh gelar Magister

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Tesis ini merupakan karya asli penulis, tidak ada karya orang lain yang dimuat dalam tesis ini tanpa mencantumkan pengakuan dan keterangan. Apabila di kemudian hari karya ini terbukti plagiat, menjiplak atau pernah dipublikasikan sebagai tesis di tempat lain, maka penulis siap menerima sangsi akademik berupa pembatalan gelar yang diperoleh.

Jakarta, 23 Februari 2025

Riko Putra, S.Ag

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG TESIS
PROGRAM MAGISTER AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM

Tesis Ini disusun oleh,
Riko Putra
21.13.1.212.017
Judul Tesis: Relasi Agama dan Negara (Rekonstruksi Pemikiran Sekularisasi Nurcholish Majid)

Telah disahkan oleh dewan sidang tesis:

Dr. Otong Sulaiman, M.Hum 24 Februari 2025
(Ketua Sidang)

M. Syamsul Arif, Ph.D 25 Februari 2025
(Penguji l)

Dr. Umar Shahab, MA 26 Februari 2025
(Penguji ll)

Basrir Hamdani, Ph.D 26 Februari 2025
(Sekretaris Sidang)

ABSTRAK

Tesis ini berjudul **"Relasi Agama dan Negara: Rekonstruksi Pemikiran Sekularisasi Nurcholish Majid"** merupakan penelitian rekonstruksi terhadap pemikiran sekularisasi Nurcholish Majid. Pemikiran sekularisasi Nurcholish merupakan desakralisasi terhadap selain Tuhan. Kendati demikian ide sekularisasi Nurcholish dalam relasi agama dan tidak terlepas dari pro kontra posisi Nurcholish antara sekularis dan teokratis. Oleh sebab itu merekonstruksi ide sekularisasi Nurcholish Majid merupakan tawaran wacana untuk menjembatani problema tersebut dengan tetap menjaga orisinalitas ide dalam perjalanan waktu.

Penelitian ini berjenis penelitian pustaka *(libraryresearch)* dengan pendekatan filosofis melalui teknik analisis kritis. Pendekatan filosofis memudahkan penulis untuk memahami makna dan hakikat dari kajian yang dibahas, sedangkan teknik analisis wacana membantu penulis dalam memahami konstruksi yang berkembang tentang wacana kajian sehingga dapat ditawarkan wacana baru sebagai bentuk rekonstruksi dalam penelitian ini.

Secara hakikat sekularisasi diperuntukkan Nurcholish untuk membebaskan dan membedakan antara substansi dengan yang tidak atau lebih definitif kepada desakralisasi. Berdasarkan problematika ide tersebut pada penelitian rekonstruksi ini mengadirkan beberapa wacana, yaitu: *pertama,* sekularisasi sebagai dualisme; yaitu berdasarkan relasi tamyiz agama dan negara yang terdiri dari unsur sekuler dan teokrasi. *kedua,* sekularisasi sebagai post-sekularisme, yaitu berdasarkan kesamaan capaian antara ide sekularisasi Nurcholish dengan post-sekularisme yaitu sama-sama menginginkan agama dalam negara. *ketiga,* sekularisasi sebagai koeksistensi; yaitu wacana yang dihadirkan untuk mengatasi persoalan politisasi agama yang marak dewasa ini terkait politik identitas berbasis agama.

Kata kunci: Nurcholish Majid, sekularisasi, relasi agama dan negara

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterai Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Turabiyan* dengan beberapa pengecualian.

A. konsonan

b = ب	z = ز	f = ف
t = ت	s = س	q = ق
th = ث	sh = ش	k = ك
j = ج	s = ص	l = ل
h = ح	d = ض	m = م
kh = خ	t = ط	n = ن
d = د	z = ظ	h = ه
dh = ذ	‘ = ع	w = و
r = ر	ng = غ	y = ي

B.Vokal

Pendek : a = ◌َ ; i = ◌ِ ; u = ◌ُ

Panjang : ā = ا ; ī = ي ; ū = و

Diftong : ay =اي; aw = او

C.Ta’ Marbutah (ة)

Ta’ marbutah yang diidafkan (disambung dengan kata lain) ditulis “t”, seperti lafal فيمعرفةالله ditulis fima‘rifat Allah. Ta’ marbutah yang bersambung dengan kata lain tapi tidak dalam posisi mudaf, maka ditulis “h”, seperti lafal المدينةالفاضلة ditulis al-madinahal-fadilah.

D.Syaddah

Syaddah atau tasydid ditransliterasi dengan huruf, yaitu menggandakan dua huruf, seperti lafal عقليّة ditulis ‘aqliyyah, فعليّة ditulis fi‘liyyah, dan قوّة ditulis quwwah, sedangkan tasydid yang berada di akhir kata seperti عدوّ ditulis ‘aduw.

E.Kata sandang

Kata sandang “al” dilambangkan berdasarkan pada huruf yang mengikutinya. Jika huruf setelahnya adalah huruf shamsiyyah maka ditulis sesuai dengan huruf yang bersangkutan, demikian juga dengan huruf al-qamariyyah.

F.Pengecualian transliterasi

Pengecualian transliterasi adalah kata bahasa arab yang telah lazim digunakan di dalam bahasa Indonesia dengan menjadi bagian dalam bahasa Indonesia seperti lafal سنةالله maka akan ditulis sunnatullah, dan juga asma al-husna seperti عبدالرحمن maka akan ditulis ‘Abdurrahman dan جلالالدين maka akan ditulis Jalaluddin.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAN i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI iii
LEMBAR PERSETUJUAN iv
ABSTRAK v
PEDOMAN TRANSLITERASI vi
DAFTAR ISI viii
BAB I: PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah. 10
C. Tujuan Penelitian. 11
D. Manfaat Penelitian. 11
E. Tinjauan Pustaka. 12
F. Metode Penelitian. 15
G. Sistematika Penulisan 17
BAB II: TRAJEKTORI DAN PEMIKIRAN SEKULARISASI NURCHOLISH MAJID. 19
A. Trajektori Intelektualitas Nurcholish Majid 21
1. Latar Belakang Keluarga dan Lingkungan 21
2. Perjalanan Akademik 22
3. Nurcholish Dalam Dinamika Pembaharuan 26
4. Kegiatan Intelektual 30
5. Karya Nurcholish Majid 40
B. Pemikiran Sekularisasi Nurcholish Majid 40
BAB III: RELASI AGAMA DAN NEGARA PERSPEKTIF NURCHOLISH MAJID. 49
A. Relasi Agama dan Negara 49
1. Seimbang Sama 51
2. Seimbang Tidak Sama 52
3. Saling Kombinasi 55
B. Relasi Agama dan Negara Perspektif Nurcholish Majid 57
1. Apologi Negara Islam 58
2. Ide Sekularisasi Nurcholish Majid 61
3. Sejalan Dengan Pancasila 62

BAB IV: REKONSTRUKSI PEMIKIRAN SEKULARISASI NURCHOLISH MAJID. 66
A. Landasan ide Sekularisasi Nurcholish Majid 68
1. Tauhid 68
2. Politisasi Agama 70
B. Respon terhadap ide Sekularisasi Nurcholish Majid 71
1. Menerima 72
2. Menolak 75
3. Mengkritik 76
C. Rekonstruksi Ide Sekularisasi Nurcholish Majid 77
1. Sekurisasi Sebagai Dualisme 78
2. Sekularisasi Sebagai Post-Sekularisme 87
3. Sekularisasi Sebagai Koeksistensi 92
BAB V: PENUTUP. 97
A. Kesimpulan 97
B. Saran 100
DAFTAR PUSTAKA
CURICULUM VITEA

BAB I:
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Filsafat merupakan induk pengetahuan[1] yang hadir sebagai jawaban atas persoalan kehidupan umat manusia. Diketahui filsafat muncul di Yunani dengan tiga filsuf terkemuka yang disebut pilar oleh Zamzamy yaitu Socrates, Plato dan Aristoteles[2]. Kajian filsafat mencakup ontologi, epistemologi dan aksiologi; Ontologi merupakan kajian yang membahas mengenai apa hakikat sesuatu; epistemologi membahas tentang sumber pengetahuan, cara mendapatkan dan kevalidan pengetahuan tersebut[3]; serta aksiologi membahas persoalan-persoalan seputar nilai seperti etika dan politik[4].

Secara konseptual, filsafat politik mengedepankan unsur universal nilai terhadap sebuah negara, oleh sebab itu filsafat politik merupakan cara untuk mengerti hakikat dan tujuan sosial-politik, negara dan masyarakat[5]. Nilai pada filsafat politik pada konstruksi tertentu dapat direduksi sebagai norma moral atau agama. Sehingga menarik sampai saat ini melihat bagaimana penerapan norma moral dan agama menjadi bagian dari negara. Ahmad Sadzali menyebut agama dan negara merupakan fitrah dalam hidup yang mesti diterima. Adapun titik persinggungan

---

[1]Ali Maksum, *Pengantar Filsafat dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2006), h. 7.

[2]M. Anantha Zamzamy, *Dari Guru ke Murid*, (Sukabumi: CV Jejak, 2023), h 7.

[3]Nursri, "Konsep Manusia Berdasarkan Tinjauan Filsafat: Telaah Aspek Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Manusia, Forum Paedagogik, Vol 12, No. 1, 2021, h 110-112.

[4]Lihat: Semuel Unwakoly, "Berpikir Kritis dalam Filsafat Ilmu; Kajian dalam Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi", Jurnal Filsfat Indonesia, Vol 5, No. 2, 2022.

[5] Fajrul I. Darussalam dan Andi B. Indra, "Kedaulatan Rakyat dalam Pemikiran Filsafat Politik Montequie", *Jurnal Politik Profetik*, Vol 9, No. 2, 2021, h 192.

antara agama dan negara yaitu kekuasaan, sosial masyarakat dan hukum[6].

Seperti disebut Ahmad Sadsali, agama dan negara seperti fitrah yang mesti diterima dalam kehidupan, maka tidak heran disebut sepanjang kehidupan manusia tidak terlepas dari persoalan agama dan negara. Sejarah mencatat selalu ada problema antara agama dan negara atau kekuasaan di setiap zamannya. Sebagai contoh dikisahkan dalam Al-Qur'an tentang Musa dan Fir'aun, Isa dengan bani Israil[7] serta pertentangan kekuasaan antara khalifah Al-Makmun dengan para ulama dan teolog Islam seperti Ahmad ibnu Hambal[8].

Tiga contoh di atas menggambarkan adanya ketidak harmonisnya hubungan antara agama dan negara atau antara kekuasaan dengan agama. Sisi lain, diakui bahwa juga terdapat keharmonisan antara agama dan negara bahkan saling terintegrasi satu sama lain, seperti misalnya di Barat sebelum terjadi *Renainsance;* di mana Gereja pernah berkuasa penuh atas negara. Sistem dengan praktik tersebut dalam hubungan agama dan negara dikenal dengan sistem teokrasi.

Teokrasi merupakan sistem tertua[9] yang dikenal dalam hubungan agama dan negara. Teokrasi merupakan suatu konsep yang berpandangan bahwa antara agama dan negara merupakan suatu kekuasaan yang integral seperti mata uang koin, memiliki dua sisi dalam satu bentuk. Disebutkan juga teokrasi ini merupakan sistem dengan prinsip berdasarkan teori kedaulatan Tuhan[10]. Adapun dalam Islam, bahwasanya Allah SWT Maha

---

[6]Ahmad Sadzali, *Relasi Agama dan Negara: Teokrasi, Sekuler Tamyiz*,(Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam (PSHI), 2018), h 1-3.

[7]Adelia Desti I. K, "Relevansi Kisah Nabi Musa dalam Al-Qur'an Surah Al-Qashash Ayat 1-13 dalam Pandangan Tafsir Ibnu Katsir pada Pendidikan Agama Islam, *Skripsi* UIN Ar-Raniry Aceh 2022, h 16.

[8]Lihat: Ahmad Lahmi, "Al-Mihnah: dalam Dinasty Abbassiyah Khalifah Al-Ma'mun", *Santifika Islamica*, Vol 2, No. 2, 2015.

[9]Ahmad Sadzali, *Relasi Agama dan Negara: Teokrasi, Sekuler, Tamyiz*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam, 2018), h 10.

[10]Teori kedaulatan Tuhan merupakan pandangan yang memahami kekuasaan tertinggi adalah Tuhan dan pemerintahan dijalankan oleh wakil

Kuasa menetapkan nabi Muhammad SAW, sebagai manusia pilihan pengganti-Nya *(Khilafah)* di muka bumi untuk menjaga dan mengelola kehidupan sesuai norma agama[11].

Permulaan praktik teokrasi tidak mengalami permasalahan dan didukung oleh segenap masyarakat, namun kesewenangan penguasa di Barat terhadap rakyat sampai kepada penindasan[12] pada lanjutannya teokrasi bertolak belakang dengan minat rakyat. Penolakan rakyat tersebut pada satu titik sampai pada puncaknya melalui gerakan *Renainsance,* akhirnya pemikir politik yang tidak sepaham dengan konsep teokrasi menghadirkan paham sekularisme[13].

Sekularisme merupakan antitesis dari teokrasi; di mana agama dan negara tidak menyatu tapi terpisah, bahkan pandangan ekstrim paham ini memahami tidak ada ruang bagi agama atau Tuhan di dunia. Sekuler dari segi bahasa diambil dari bahasa latin *"Saeculum"* menunjukkan arti dunia sekarang baik waktu maupun ruang, sehingga sekularisme merupakan paham yang berkepentingan terhadap duniawi dengan mengabaikan akhirat dan nilai spiritualitas[14]. Mengutip Mohammad Latief, sekuler merupakan pemisahan bahkan tidak ada hubungan agama yang rohani dengan negara yang materi[15].

Tuhan di dunia. Sistem teokrasi dan teori kedaulatan Tuhan sama berpandangan bahwa negara berdasarkan legitimasi agama. (lihat: Ahmad Sadzali, *Relasi Agama dan Negara: Teokrasi, Sekuler, Tamyiz,* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam, 2018).

[11]Ahmad Khalwani, "Relasi Agama dan Negara dalam Pandangan Ibnu Khaldun", resolusi, Vol 2, No. 2, 2019, h 110.

[12]Lihat: M. Arief Khumaidi, "Agama dan Negara: antara Teokrasi, Sekuler dan Tamyiz", *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol 1, No. 4, 2021.

[13]M. Arief Khumaidi, "Agama dan Negara: antara Teokrasi, Sekuler dan Tamyiz", *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol 1, No. 4, 2021, h 554.

[14]Usman Shihab, *Sekitar Epistemologi Islam: Memehami Bangunan Keilmuan dalam Kerangka Wordview Islam*, (Yogyakarta: Bildung, 2019), h 30.

[15]Lihat: Mohammad Latief. Amal. Amir, "Problem Sekuler Hubungan Agama dan Negara Menurut Ali Abdul Raziq", *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya,* 2022.

Sekularisme merupakan paham yang berpandangan antara agama dan negara harus terpisah, agama merupakan privat personal yang tidak boleh dihadirkan dalam ruang publik[16]. Adapun negara dengan sistem sekuler cenderung bersikap netral terhadap kepercayaan masyarakat dengan tidak menentukan kepercayaan apa yang harus dianut dalam negara tersebut[17].

Perkembangan sekularisme yang pesat tidak hanya melanda dunia Barat, melainkan sampai menyebar ke dunia Islam khususnya melalui imperialisme dan kolonialisme; serta melalui perkembangan pengetahuan yang banyak dipelajari oleh cendekiawan muslim ke Barat. Masuknya paham sekularisme ke dunia Islam dimungkinkan antara lain karena dapat bertemunya prinsip musyawarah dalam Islam dengan prinsip demokrasi oleh bangsa Barat yang sekuler [18].

Oleh sebab demikian, negara-negara Islam secara langsung atau tidak langsung, perlahan-lahan menerapkan prinsip sekularisme dalam wujud negara-negara nasional, meskipun diakui sebagian besar negara Islam masih mempertahankan agama sebagai bagian yang penting dalam negara. Sebagai contoh Indonesia misalnya menetapkan "ketuhanan yang maha Esa" sebagai sila pertama dasar bangsa Indonesia walau pada praktiknya condong kepada sekularisme; demikian juga Mesir yang menetapkan Islam sebagai agama negara namun menolak dan memerangi gerakan yang menuntut pelaksanaan negara Islam atau dengan kata lain tidak menerapkan agama dalam seluruh kehidupan negara. Negara-negara Islam yang secara tegas menganut sekularisme adalah

---

[16]M. Arief Khumaidi, "Agama dan Negara: antara Teokrasi, Sekuler dan Tamyiz", *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol 1, No. 4, 2021, h 554.

[17]Alaidin Koto dan Wali Saputra, "Wakaf Produktif di Negara Sekuler: Kasus di Negara Thailand dan Singapura", *Sosial Budaya*, vol. 13, No. 2, 2016, h 126.

[18]Diketahui bahwa sekularisme pada proses lanjutan mampu menjadi produk politik liberal, sehingga melahirkan ide lainnya seperti demokrasi, pasar bebas dll. Lihat sejarah Liberalisme: Ahmad Fauzi Muslim N. S. Dkk, "Islam dan Liberalisme", *Mushaf Journal*, Vol. 4, No. 2 2024.

Republik Turki pada tahun 1923, bahkan menghapus sistem *khilafah* yang telah bercokol di Turki selama ratusan tahun[19].

Sisi lain, muncul di kalangan Islam pemikiran yang mencoba mengintegrasikan antara prinsip teokrasi dengan sekularisme. Upaya integrasi antara teokrasi dan sekularisme disebut oleh Ahmad Sadzali dengan sebutan Tamyiz atau Simbiotik. Dengan demikian dalam relasi agama dan negara terdapat tiga bentuk relasi: teokrasi yang menggabungkan agama dan negara; sekularisme yang memisahkan agama dan negara; tamyiz yang mengintegrasikan teokrasi dengan sekularisme.

Tamyiz merupakan sintesis antara sekuler dan teokrasi, yakni bukan sekuler dan juga bukan teokrasi melainkan pembedaan dan pemilahan antara keduanya[20]. Tamyiz merupakan jembatan antara Teokrasi dan Sekuler, dengan kata lain Tamyiz pada relasi agama dan negara merupakan relasi saling kombinasi[21]. Tamyiz dianggap pemikiran paling moderat pada hubungan agama dan negara, adapun Pemikir Islam Modern yang setuju dengan tamyiz di antaranya yaitu Muhammad Abduh, M. Husein Haikal, Fazlur Rahman dan Muhammad Arkoun[22].

Sementara itu, Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim sejatinya tidak terlepas dari persoalan relasi agama dan negara; mulai dari persiapan kemerdekaan, pasca kemerdekaan hingga dewasa ini. Indonesia

---

[19]Lihat: Nursalam dan Susmihira, "Lahirnya Negara Islam Sekuler Turki dan Ide Pembaharuan Mustafa Kemal Attaturk", *Ahkam*, Vol 3, No. 1, 2024.

[20]Indah Khoril Bariyyah, *Relasi Islam dan Negara di Negara Muslim: Studi Komparatif Pemerintahan Recep Tayyep Erdogan di Turki dan Tuan Dr. Muhathir di Malaysia*, (Tanggerang Selatan: BBC Publisher, 2022), cet 1, h 46.

[21]Ahmad Sadzali, *Relasi Agama dan Negara: Teokrasi, Sekuler, Tamyiz*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam (PSHI), 2018), h 45.

[22]Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, shari'ah dan HAM, Fundamentalisme dan Antikorupsi*, (Jakarta; Kencana, 2013), h 46.

merupakan negara dengan dasar Pancasila[23] pada hubungan agama dan negara disebut Sofyan Hadi sebagai bentuk relasi paralelisme historis[24]. Pernyataan tersebut memberitahu bahwa histori bangsa Indonesia tidak terlepas dari persoalan hubungan agama dan negara.

Indonesia dengan mayoritas muslim pada persiapan kemerdekaan menginginkan Indonesia sebagai negara Islam. Secara terbatas, potret hubungan agama dan negara di Indonesia dapat dilihat pada sidang BPUPKI yang dilanjutkan oleh Panitia Sembilan dengan merumuskan Pancasila sebagai dasar negara dan diusulkan pada sidang PPKI dengan nama Piagam Jakarta. Menjelang disahkannya Pancasila terjadi desakan beserta pengancaman oleh Indonesia bagian Timur kepada Moh. Hatta yang keberatan dengan sila pertama. Akhirnya dengan kemurahan hati pendiri bangsa, sila pertama Pancasila diubah menjadi "Ketuhanan yang Maha Esa"[25].

Persoalan di atas merupakan potret pertama dalam hubungan agama dan negara di Indonesia. Selanjutnya pasca pemilu 1955, muncul gerakan NII (Negara Islam Indonesia) pimpinan Kartosoewirjo[26] yang menyebabkan Indonesia terbagi kepada tiga kelompok yaitu nasionalisme yang mempertahankan Pancasila; fundamentalis menginginkan negara Islam seperti Masyumi, NU, PTII, dan Perti; serta sosialis komunis oleh PKI. Pengusungan ideologi masing-masing kelompok tersebut

---

[23]Lihat: Puji Ayu Handayani, Dinie Angraeni Dewi, "Implementasi Pancasila sebagai Dasar Negara", *Jurnal Kewarganegaraan,* vol. 5, No. 1, 2021.

[24]Sofyan Hadi, "Relasi dan Reposisi Agama dan Negara: Tatapan Masa Depan Keberagaman di Indonesia", RI'AYAH, Vol 03, No. 01, 2018, h 13.

[25]Lihat: Gusti Ngurah Santika dkk, "Membangun kesadaran Integratif Bangsa Indonesia Melalui Refleksi Perjalanan Historis Pancasiladalam Perspektif Konflik Ideologi", *JED: Jurnal Etika Demokrasi*, Vol 4, No. 2, 2019.

[26]Lihat: Miftakhur Ridho, "Negara Islam Indonesia dan Kartosuwiryo: Konsepsi Gerakan Politik, Militer dan Agama" Humanistika, Vol 5, No. 2, 2019.

memanas pada peristiwa pembubaran RIS (Republik Indonesia Serikat) yang mengharuskan Indonesia merumuskan konstitusi definitif oleh konstituante[27]. Karena tidak menemui titik terang, keluarlah Dekrit presiden pada 5 Juli 1959 bahwa Pancasila tetap menjadi dasar negara[28].

Seterusnya memasuki orde baru, gejolak politik mulai redup dan dunia pemikiran Indonesia mulai berwarna. Demikian ditandai dengan beberapa paham fundamentalisme Islam mulai mengakui Pancasila sebagai dasar negara yang diwakili oleh NU dan Muhamadiyah[29]. Akhir orde baru ditandai dengan reformasi, disebut Gusti N. Santika saat reformasi ada keinginan untuk kembali menjemput ideologi yang sebelum gagal, namun semua pihak sepakat bahwa tugas reformasi bukan lagi memperebutkan ideologi bangsa tapi menjatuhkan orde baru. Lengsernya orde baru menjadikan Indonesia dengan politik yang lebih demokratis; di mana toleransi saling terbangun antar sosial masyarakat[30].

Kendati demokrasi dan tidak lagi mempersoalkan agama sebagai asas negara, potret Indonesia dalam hubungan agama dan negara belumlah selesai. Dewasa ini kembali muncul paham fundamentalisme yang menginginkan pendirian negara Islam

---

[27]Konstituante merupaka dewan yang bertugas membuat konstitusi untuk mengganti konstitusi sementara pasca pembubaran RIS yang dinggap gagal. (Lihat: Gili Argenti, "Ideologisasi Partai Islam Masyumi di Indonesia", *JPI: Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol 5, No. 1, 2020).

[28]Gusti Ngurah Santika dkk, "Membangun kesadaran Integratif Bangsa Indonesia Melalui Refleksksi Perjalanan Historis Pancasiladalam Perspektif Konflik Ideologi", JED*: Jurnal Etika Demokrasi*, Vol 4, No. 2, 2019, h 93-94.

[29]NU dan Muhamadiyah sepakat Indonesia dengan dasar Pancasila. NU menerima Pancasila sebagai dasar negara pada Muktamar 27 bulan Desember 1984, sedangkan Muhamadiyah menerima Pancasila setelah terbit undang-undang nomor 8 tahun 1985 trntng organisasi kemasyarakatan. (lihat: Jamal Ghofir, "Pancasila dan Nahdhatul Ulama dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)", Tadris: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, vol 11, No. 2, 2017).

[30]Ridwan Saidi, "Urgensi Menjaga Kemajemukan dan Toleransi dalam Era Demokrasi", *Jurnal TAPIs*, Vol. 13, No. 2, 2017, h. 75.

atau *Khilafah*[31] seperti negara berdasarkan syariat oleh FPI atau pendirian *Khilafah Islamiyah* oleh HTI[32] serta NII jilid dua melalui Pesantren Az-Zaitun[33]. Hal yang tidak kalah menarik terkait hubungan agama dan negara di Indonesia dewasa ini adalah fenomena maraknya politisasi agama atau agamanisasi politik[34].

Potret dan fenomena di atas memberitahu bahwa, Indonesia sejatinya tidak terlepas dari persoalan relasi agama dan negara. Kenyataan tersebut membawa kita kepada salah satu pemikir Islam Indonesia yang fokus terhadap persoalan agama dan negara di Indonesia yaitu Nurcholish Majid. Beberapa konsep yang menjadikannya topik menarik dalam hubungan agama dan negara yaitu ide tentang sekularisasi dan jargon politiknya "Islam yes, Partai Islam no". Faktor pemikiran yang andil dalam persoalan sosial politik mengantarkan Nurcholish Majid kepada kontroversi dengan tudingan penganut paham sekularisme atas ide sekularisasinya tersebut[35].

Ide sekularisasi Nurcholish Majid merupakan konsep yang mengusung perbedaan terhadap urusan dunia dan akhirat,

---

[31]Lihat: Indra Utama Tanjung, "Studi Komparative Pendirian Negara *Khilafah* di Indonesia", *Jurnal Penelitian Medan Agama,* Vol. 9, No. 1, 2018.

[32]HTI (Hizbut Tahrir Indonesia merupakan organisasi Islam yang mengupayakan terselenggaranya syariat Islam di Indonesia dengan pendirian Khilafah Islamiyah (lihat: Dzaki Aflah Zamani, "Islam dan Pancasila dalam Perdebatan Ormas-ormas Islam", Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol 7, No. 1, 2021).

[33]Keberadaan NII di Pesantren Az-Zaitun menunjukkan kesewenangan lembaga pendidikan agama di Indonesia, sementara sistem pendidikan Nasional baik berupa fasilitas dan lainnya diatur UUD 1945 Pasal 31 ayat 3 dan secara khusus dalam UU No. 20 tahun 2003 (lihat: Rizky Rinaldy dkk, "Kewajiban Negara dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional", *Lex Privatum,* Vol. 8, No. 2, 2020).

[34]Ali Ismail Shaleh, Fifiana Wisnaeni, "Hubungan Agama dan Negara Menurut Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia,* vol. 1, No. 2, 2019, h 239.

[35]Lihat: Nasitotul Jannah, "Nurcholish Majid dan Pemikirannya (di antara Kontibusi dan Kontroversi)", *CAKRAWALA: Jurnal Studi Islam,* Vol. XII, No. 1, 2017.

bukan pemisahan dunia dan akhirat atau agama dan negara. Menurut Nurcholish sekularisasi bukanlah paham sekularisme yang memisahkan agama dengan negara melainkan membedakan antara hal yang sakral berupa transendennya Tuhan dengan tradisi kemanusiaan yang tidak sakral. Senada demikian konsep sekularisasi Nurcholish disebut melangitkan yang langit dan membumikan yang bumi[36].

Adapun jargon politik Nurcholish Majid: "Islam yes, partai Islam no", menunjukkan perhatian utama terhadap Islam dan partai Islam merupakan suatu atribut yang partisipan sekaligus bukan esensial Islam. Hemat penulis, jargon tersebut merupakan bentuk yang lebih definitif dari pemikiran sekularisasi Nurcholish dalam hal politisasi agama. Budhy Munawar Rachman dalam pengantar *Karya Lengkap Nurcholis Majid* menyebutkan, sebagai pemikir liberal, jargon politik Nurcholish bukan tanpa alasan melainkan atas ketidak puas-an Nurcholis Majid terhadap Partai Islam yang sejatinya tidak mampu menerapkan syiar-syiar Islam. Maka sekularisasi patut diusung dengan menempatkan Islam ke titik sentral dan partai Islam bukanlah esensinya[37].

Pandangan Nurcholish Majid yang terbuka dan luas menempatkannya sebagai penarik gerbong kemodernan Islam di Indonesia. Lukman Nulhakim dalam menanggapi Nurcholish Majid terhadap kultural Indonesia dan sosial politik, menilai banyak cara pandang menyikapi pembaharuan yang dilakukan Nurcholis Majid termasuk konsep sekularisasi[38]. Demikian dibuktikan dengan banyaknya intepretasi terhadap pemikiran Nurcholish Majid.

---

[36]Nurcholish Majid, *Islam Kemodernan dan KeIndonesiaan*, (Bandung, Mizan: 1987), h 280.

[37]Budhy Munawar-Rachman, *Karya lengkap Nurcholis Majid*, (Jakarta: Nurcholis Majid Society, 2020), h xIvii.

[38]Lihat: Lukman Nulhakim, "Konsep pemikiran Sekularisasi Nurcholish Majid Sebuah Fenomena Agama", *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 6, No. 2, 2020.

Patut diapresiasi pemikiran Nurcholis Majid sama halnya dengan relasi agama dan negara yaitu suatu kajian yang menarik dan telah banyak diteliti serta ditulis para pendahulu; namun akan relevansi, korelasi dan faktor tidak selesainya bangsa kita Indonesia dari isu agama dan negara serta pemikiran tokoh terkait, maka peneliti tertarik untuk membaca dan memahami kembali sebagai suatu penelitian dengan tawaran rekonstruksi terhadap relasi agama dan negara pemikiran sekularisasi Nurcholis Majid. Langkah ini sekaligus bentuk ketidakpuasan penulis terhadap intepretasi pemikiran sekularisasi Nurcholish terkait konteks zaman, oleh sebab itu menurut penulis pemikiran sekularisasi baik untuk direkonstruksi.

Terlepas dari hal tersebut, penulis sepakat dengan Lukman Nulhakim bahwasanya banyak cara pandang dalam menyikapi pemikiran Nurcholish Majid. Berangkat dari fenomena bangsa terkait isu agama dan negara dewasa ini, penulis memilih pemikiran sekularisasi Nurcholish Majid sebagai objek kajian untuk direkonstruksi atau dibangun dan dihidupkan kembali dengan menunjukkan kebaruan dari peneliti sebelumnya terhadap ide sekularisasi Nurcholish Majid.

Budhy Munawar dalam pengantar *Karya Lengkap Nurcholis Majid*[39] menyebutkan bahwa dalam konteks perkembangan dan realitas Indonesia dengan keadaan umat Islam Indonesia sekarang bersamaan dinamika politik yang beragam, jelas pemikiran Nurcholis Majid masih sangat relevan. Oleh sebab itu, maka penulisan ini mengangkat permasalahan tersebut dengan judul **"Relasi Agama dan Negara: Rekonstruksi Pemikiran Sekularisasi Nurcholis Majid".**

B. Identifikasi Masalah

Masalah utama *Tesis* ini terkait relasi agama dan negara pemikiran Nurcholis Majid. Persoalan relasi agama dan negara

[39]Budhy Munawar-Rachman, *Karya Lengkap Nurcholis Majid,* (Jakarta: Nurcholis Majid Society,2020), h cii.

dalam penelitian ini fokus pada pemikiran sekularisasi Nurcholish Majid yang dikaji secara rekonstruksi dengan pendekatan filosofis. Demikian sebagai upaya membangun dan menghidupkan kembali pemikiran sekularisasi Nurcholish Majid dengan menunjukkan wacana baru ide sekularisasi tersebut.

1. Batasan Masalah

   Terhadap Identifikasi masalah di atas, penelitian relasi agama dan negara ini memiliki batasan masalah kepada persoalan ide sekularisasi Nurcholis Majid.

2. Rumusan Masalah

   Adapun rumusan masalah dari batasan masalah di atas yaitu:

   a. Bagaimana landasan gagasan sekularisasi Nurcholish Majid?
   b. Bagaimana respon terhadap pemikiran sekularisasi Nurcholish Majid?
   c. Bagaimana rekonstruksi pemikiran sekularisasi Nurcholish Majid?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, dapat dikemukakan tujuan dari penulisan Tesis ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan relasi agama dan negara pemikiran Nurcholis Majid.
2. Untuk memahami landasan pemikiran sekularisasi Nurcholis Majid.
3. Untuk mengetahui rekonstruksi ide sekularisasi Nurcholish Majid.

D. Manfaat Penelitian

Setelah dikemukakan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu untuk:

1. Kontribusi wacana mengenai hubungan agama dan negara pemikiran sekularisasi Nurcholish Majid, khususnya bagi penelitian sejenis dan umumnya bagi perkembangan kajian pemikiran politik Islam.

2. Membuka ruang dan kesadaran akademik dan masyarakat secara umum untuk membaca ulang dan memahami lebih kritis mengenai persoalan hubungan agama dan negara.
3. Secara normatif, menjadi sumbangsih akademik peneliti untuk meraih gelar Magister.

E. Tinjauan Pustaka

Persoalan relasi agama dan negara bukan suatu yang baru melainkan terus bergulir dari masa ke masa, oleh sebabnya tentu banyak peneliti sebelumnya yang membahas mengenai relasi agama dan negara begitu pun terhadap pemikiran tokoh yang dibahas dalam penelitian ini. Nurcholis Majid sebagai tokoh pembaru Indonesia mendapat sorotan tersendiri dan banyak penulis dan peneliti yang berupaya mengangkat gagasannya ke meja publik, untuk lebih lanjut berikut beberapa tinjauan pustaka yang relevan dengan penelitian yang penulis kaji:

1. "Relasi Agama dan Negara Perspektif Muhammad Amien Rais". Penelitian *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2022 yang dikaji oleh Tri Amanatun Nadliroh. Penelitian *Tesis* ini ingin melihat bagaimana hubungan relasi antara agama dan negara dari pemikiran tokoh Muhammad Amien Rais. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Amanatun Nadliroh ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur. Adapun hasil yang diperoleh pada *Tesis* tersebut yakni relasi agama dan negara dalam pandangan Muhammad Amien Rais merupakan realisasi ajaran-ajaran syariat Islam namun membutuhkan negara sebagai pemegang otoritas dalam penetapan hukum kepada masyarakat. Agama Islam negara adalah penjaga syariah supaya tidak mengalami distorsi dan penyelewengan prinsip-prinsip kebaikan seperti keadilan dan demokrasi[40].

[40]Tri Amanatun Nadliroh, "Relasi Agama dan Negara Perspektif Muhammad Amien Rais", *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2022.

Kendati terdapat persamaan tema dengan penelitian *Tesis* Tri Amanatun Nadliroh di atas, namun penelitian yang peneliti kaji sama sekali tidak sama, hal ini dilihat mulai dari pemikiran tokoh yang dibahas, pendekatan dan metode. Maka hal ini menunjukkan kebaruan dari peneliti sebelumnya.

2. Penelitian *Tesis* UIN Sunan Kalijaga yang dilakukan oleh Sulbi pada tahun 2020 dengan judul *Tesis* "Agama dan Politik dalam pandangan Nurcholis Majid". Penelitian pustaka ini dalam mendapatkan hasil menggunakan pendekatan sosiologi kontekstual dengan pisau analisis teori kolektivitas moral Emile Durkheim. Adapun hasil yang didapat Sulbi pada penelitian *Tesis* ini yaitu: 1) agama harus memberanikan diri untuk memisahkan diri dari simbol politik eksklusif melainkan kepada nilai universal kemanusiaan. 2) Pancasila dirumuskan untuk kolektivitas moral manusia yang terbuka, menjunjung pluralitas, demokrasi dan egaliter manusia. 3) negara bangsa menurut Nurcholis Majid merupakan semua warga dapat tumbuh maju dengan ide, fisik sehat dan tanpa diskriminasi.

   Kendati terdapat persamaan tema dan tokoh yang di bahas dengan penelitian *Tesis* UIN Sunan Kalijaga oleh Sulbi, namun kebaruan pada penelitian ini yaitu lebih melihat kepada bentuk sekularisasi relasi agama dan negara pemikiran Nurcholis Majid dan secara metode penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis dengan tawaran rekonstruksi melalui analisis krisis, sehingga memperoleh hasil baru dari penelitian sebelumnya.
3. Penelitian *Tesis* Institusi Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran Jakarta yang dilakukan oleh Harkaman pada tahun 2019 dengan judul "Relasi Agama dan Negara dalam Al Quran (Studi Komparasi Tafsir Al Azhar dan Tafsir Al

Misbah)"[41]. Studi komparasi yang dilakukan oleh Harkaman ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode Tafsir *Al Mauhu'i* dan historis kritis kontekstual. Adapun hasil yang didapatkan dalam penelitian *Tesis* ini yaitu komparasi antara tafsir Al Azhar dan Al Misbah pada relasi agama dan negara menunjukkan komparasi asosiasi; bentuk relasi ini disebut Harkaman pada penelitiannya tidak menghendaki berdirinya negara Islam melainkan antara keduanya saling menguatkan satu sama lain.

Terdapat persamaan bahasan dengan penelitian *Tesis* yang dilakukan oleh Harkaman yaitu sama-sama membahas mengenai relasi agama dan negara, namun banyak perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, baik dari segi metode maupun fokus penelitian.

4. Penelitian *Tesis* UIN Raden Intan Lampung tahun 2019 oleh jurnal *Madina-te* oleh Akmal Hawi dengan judul "Prinsip-prinsip Islam tentang Demokrasi: Studi Pemikiran Nurcholish Majid Tahun 1970-2005"[42]. Penelitian pustaka ini menggunakan metode deskriptif dan holistik. Adapun capaian hasil yang ingin dituju dalam penelitian ini yaitu ingin melihat secara holistik bagaimana prinsip Islam yang demokrasi yang digali berdasarkan pemikiran Nurcholish Majid.

   Dapat diungkap persamaan dengan penelitian Akmal Hawi dari segi kesamaan tokoh yang dikaji. Adapun kebaruan dari penelitian yang penulis kaji yaitu lebih menitik beratkan kepada pemikiran tokoh terkait sekularisasi pada relasi agama dan negara.

---

[41]Harkaman, "Relasi Agama dan Negara dalam Al Quran (Studi Komparasi Tafsir Al Azhar dan Al Misbah)", *Tesis* Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran Jakarta, 2019.

[42]Akmal Hawi, "Prinsip-prinsip Islam tentang Demokrasi: Studi Pemikiran Nurcholish Majid Tahun 1970-2005", *Madina-te: Jurnal Studi Islam*, 2019, Vol. 15, No. 1.

5. "Relasi Agama dan Negara: Analisis Politik Nurcholis Majid". Sebuah penelitian oleh Lismijar yang dimuat *Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora* Volume 5 No. 2 pada tahun 2017[43]. Penelitian yang dilakukan oleh Lismanijar ini bertujuan untuk melihat bagaimana pandangan Nurcholis Majid terkait relasi agama dan negara, penelitian ini juga berjenis penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil yang di peroleh Lismijar menunjukkan bahwa beberapa ide politik Nurcholis Majid terkait agama dan negara yaitu: *nation state,* Islam dan Pancasila, Islam dan demokrasi serta Islam dan Pluralisme.

   Lismijar sebagai peneliti terdahulu terhadap tokoh Nurcholis Majid sama berjenis penelitian pustaka dengan penelitian yang penulis lakukan. Ada pun perbedaan dari penelitian Lismijar yaitu pada penelitian ini penulis melihat pemikiran Nurcholis Majid secara rekonstruktif dengan pendekatan filosofis untuk memperoleh hasil kebaruan dari penelitian sebelumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendetan penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian pustaka *(library research)* yaitu upaya mencari bahan dan data penelitian dari kepustakaan seperti buku, catatan, jurnal, majalah, penelitian terdahulu dan lainnya yang berhubungan dengan bahasan penelitian. Sutrisno Hadi menyebutkan bahwa *library research* merupakan penelitian dengan studi literatur terkait bahasan penelitian[44]. Kajian pustaka ini merupakan studi tokoh dengan mengumpulkan bahan dan data dari literatur

---

[43]Lismijar, "Relasi Agama dan Negara: Analisis Politik Nurcholis Majid", *Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora,* 2017, Volume 5, No. 2.

[44]Sutrisno Hadi, *Metode Research,* (Yogyakarta: Andi Offset, 1999), h 2.

karya pemikiran tokoh kemudian disajikan dalam bentuk baru sebagai kebutuhan baru.

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis, yaitu untuk membantu penulis dalam memahami makna dan hakikat mendalam terkait objek kajian yang diteliti. Penelitian dengan pendekatan filosofis selain sebagai tinjauan kritis, juga merupakan upaya membaca dan memahami serta membangun atau menghidupkan kembali kajian yang diteliti[45].

2. Sumber data
    a. Sumber data primer, yakni literatur berupa karya-karya dari tokoh yang dikaji dalam penelitian ini yaitu Nurcholis Majid.
    b. Sumber data sekunder, yaitu literatur yang mendukung data primer dan bahasan penelitian seputar Nurcholis Majid, relasi agama dan negara baik berupa buku, jurnal, majalah dan literatur lainnya yang dapat ditemui peneliti.
3. Teknik pengumpulan data

    Pengumpulan data dalam penelitian merupakan sistematika yang tidak bisa dihindarkan, karena penelitian bisa tidak selesai tanpa kumpulan data. Adapun tahap dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan mengklasifikasikan data yang berhubungan dengan penelitian seperti buku, jurnal maupun karya dan penelitian terdahulu. Kemudian dilanjutkan dengan menggambarkan dan menganalisis data untuk disajikan dalam bentuk baru.
4. Teknik analisis data
5. Analisis data dalam penelitian digunakan untuk memahami dan menginterpretasi bahasan penelitian, sehingganya diperlukan analisis untuk pemahaman yang

[45]Zainal Abidin, *Pengantar Filsafat Barat,* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h 14-20.

lebih jelas[46]. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kritis, yaitu mengkaji secara dalam objek kajian melalui bahan yang ada guna mengungkap konstruksi yang berkembang[47].

G. Sistematika Penulisan

Supaya memudahkan memahami penelitian ini, maka peneliti mencoba menggambarkan sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bab l:
   Mengurai hal-hal pendahuluan dalam penelitian ini. Terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab ll:
   Membahas seputar tokoh yang diangkat dalam penelitian ini. Terdiri dari trajektori dan pemikiran tokoh yang dikaji.
3. Bab lll:
   Membahas persoalan relasi agama dan negara: seimbang sama (teokrasi), seimbang tidak sama (sekuler) dan saling bersesuaian (Pancasila) perspektif Nurcholish Majid.
4. Bab lV:
   Menyajikan landasan dan respon ide sekularisasi Nurcholish Majid serta menampilkan tawaran wacana rekonstruksi ide sekularisasi Nurcholish Majid.
5. Bab V: Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

---

[46]Syafrinal Randa, "Memahami Gagasan Dekonstruksi Pemikiran *Turatas*Islam Muhammad Arkoun", *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2022, h 20.

[47]Lihat: Dwi Setyawan Suraji, "Alisis Wacana Kritis dalam Pemaknaan Teks Lagu", *Seminar Nasional Bahasa dan Pengajarannya (KBSP),* Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

BAB II:
TRAJEKTORI DAN PEMIKIRAN SEKULARISASI NURCHOLISH MAJID

Pada Bab sebelumnya telah dibicarakan tentang pendahuluan penelitian ini yang dimulai dari latar belakang masalah sampai kepada sistematika penulisan penelitian. Adapun pada bab dua ini akan fokus pada pembahasan tentang "Trajektori seorang Nurcholish Majid". Bab ini merupakan presentasikan bagaimana perjalanan intelektual dari seorang Nurcholish Majid yang terdiri dari latar belakang lingkungan dan keluarga biografi, perjalanan akademik, dinamika dalam arus pembaharuan, pemikiran sekularisasi, kegiatan intelektual dan karya-karya Nurcholish Majid.

Sebelum masuk kepada latar belakang keluarga dan lingkungan, ada baiknya sedikit diulas tentang apa itu trajektori dalam penulisan bab ini. Trajektori merupakan sesuatu yang berarti lintasan laju dari objek yang mengikuti masa ruang dan waktu seperti rel. Penggunaan Istilah ini merupakan kesengajaan penulisan untuk mensenyawakan istilah yang dipakai dengan tokoh yang dikaji. Diketahui bahwa Nurcholish kecil bercita-cita sebagai Masinis Kareta Api; dengan ketentuan jelas seorang masinis tidak dapat beralih jalan dari rel kareta sehingga tujuannya jelas[1] seperti halnya trajektori yang menunjukkan makna sebuah lintasan.

Trajektori terhadap pemikiran tokoh adalah melihat lajur perjalan tokoh dalam upaya memproyeksikan ide gagasan yang diusung. Adapun trajektori pemikiran Nurcholish Majid merupakan salah satu langkah penulis dalam menjangkau bagaimana seorang pembaharu Islam Indonesia sampai kepada percaturan intelektual. Tentu dalam hal

---

[1]Omi Komaria Majid (Istri Cak Nur) dalam mengenang wafatnya Nurcholish Majid menceritakan bahwa Cak Nur dalam ruang kerjanya membuat permainan kareta api di atas papan ukuran 4 x 2,5 m yang dihiasi stasiun-stasiun, pertemuan rel, lambu dan bel. Disampaikan bahwa Cak Nur dalam kesibukannya bermain kareta api menjadi pembangun inspirasi Cak Nur. Solichin menyebutkan cita-cita menjadi seorang Marsinis oleh Nurcholish Majid merupakan adalah pilihan jalan hidup dengan arah substansi yang benar dengan tetap menjunjung kesepatan demi kemaslahatan. Lihat: M. Wahyuni Nafis, *Cak Nur Sang Guru Bangsa: Biografi Pemikiran Prof. Dr. Nurcholish Majid,* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2014).

demikian termuat lingkungan, proses belajar dan guru maupun tokoh yang diikuti beserta dengan karya-karya yang dihasilkan.

Nurcholish Majid merupakan salah satu tokoh pembaharu Islam Indonesia. Majalah Tempo menyebutkan Nurcholish sebagai penarik gerbong kemodernan di Indonesia. Oleh sebab itu tidak berlebihan untuk menyandingkan Nurcholish dengan tokoh pembaharu Islam di belahan bumi lain seperti Muhammad Abduh, Jalaludin al Afgani, Muhammad bin Abdul Wahab, Sir Muhammad Iqbal, Maulana Maududi, Ayatullah Khomeini, Sayid Qutb, dan tokoh lainnya[2]. Namun sebenarnya di Indonesia sendiri tidak hanya Nurcholish Majid sebagai pembaharu Islam, tokoh lainnya yang dapat disebutkan di sini misalnya yaitu Harun Nasution, Abdurrahman Wahid dan Buya Hamka.

Meskipun demikian, pembaharuan-pembaharuan Nurcholish Majid tidak dapat dilepaskan dari kontroversi, bahkan ia dituding sebagai seorang sekularis, agen Barat, sesat pikir dan lain sebagainya. Terlepas dari itu semua diterima atau ditolaknya, Nurcholish Majid telah tercatat sebagai tokoh pembaharu Islam Indonesia. Nurcholish berpandangan pembaharuan atau moderasi mengandung nilai rasionalisasi, yaitu perubahan pola pikir yang tidak akliah (rasional) kepada pemikiran yang rasional serta moderasi tersebut tidak bertentangan dengan Islam karena rasionalisasi bekerja sesuai fitrah dan sunatullah yang *Haqq.* Nurcholish seperti dinyatakan tersebut, moderasi ialah rasionaliasi menolak dengan tegas pengertian Moderasi adalah *Westernisasi.*[3]. kurang lebih demikianlah isi pidato Nurcholis Majid pada 2 Januari 1970 pada acara diskusi bersama HMI, PII, GPI, dan Parsami dengan makalah yang berjudul "Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat"[4].

Nurcholish Majid sebagai pembaharu Islam sejatinya sama dengan tokoh pembaharu Islam di belahan dunia mana pun, tapi mendapat

---

[2]Muhammad Saleh Tajuddin, "Filsafat Politik Nurcholish Majid", *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 9, No. 2, 2021, h 178.

[3]Nurcholish Majid, *Moderasi Tinjaun Islami dalam Karya Lengkap Nurcholish Majid,* (Jakarta, Nurcholish Majid Society, 2020), h 240-257.

[4]Muhammad Saleh Tajuddin, "Filsafat Politik Nurcholish Majid", *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 9, No. 2, 2021, h 178.

perhatian yang kontroversi di Indonesia seperti tudingan di atas dan puncak dari kontroversi tersebut terkait dengan ide sekularisasi oleh Nurcholish Majid. Bagaimana perjalanan intelektual dan pemikiran sekularisasi Nurcholish Majid tersebut, yakni akan diulas lebih lanjut sebagai berikut :

A. Trajektori Intelektualitas Nurcholish Majid

1. Latar Belakang Keluarga dan Lingkungan

M. Wahyuni Nafis dalam menulis biografi dan pemikiran Nurcholis Majid menyebutkan bahwa membicarakan seorang tidak cukup dengan melihat latar belakangnya saja melainkan sampai kepada aspek genealoginya yaitu mulai dari lingkungannya dibesarkan, pengaruh pemikiran, kultur budaya sampai kepada hasil karya yang dihasilkan[5]. Sebab demikian, penulis melihat genealogi dari seorang Nurcholish Majid dengan memulai dari latar belakang keluarga dan lingkungan dibesarkan.

Nurcholish Majid lahir sebelum kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada 17 Maret 1939 di desa Mojoanyar Jombang, Jawa Timur dan meninggal pada Senin, 29 Agustus 2005 di RS Pondok Indah, Jakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan pada esok harinya[6]. Nurcholish Majid berasal dari keluarga pesantren NU (Nahdatul Ulama) sekaligus tergabung dalam partai Islam Masyumi. Ayah Nurcholish Majid bernama H. Abdul Majid tamatan pesantren Tebuireng, secara personal merupakan murid dari KH. Hasyim Asy'ari, yaitu salah satu pendiri NU. Ibu Nurcholish Majid, Fathonah juga merupakan keluarga NU yang berasal dari Kediri, Jawa Timur[7].

Nurcholis Majid merupakan seorang yang diasuh dan dibesarkan dalam lingkungan NU (Nahdatul Ulama). Semenjak

---

[5]M. Wahyuni Nafis, *Cak Nur, Sang Guru Bangsa: Biografi Pemikiran Prof. Dr. Nurcholish Majid*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2014), h 3.

[6]Ahmad Nurcholis, *"Celoteh Cak Nur",* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), h xiii.

[7]Johan Setiawan, "Pemikiran Nurcholish Majid Tentang Plularisme Agama dalam Konteks Keindonesian", *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam,* Vol. 5, No. 1, 2019, h24.

kecil Nurcholish telah diarahkan oleh ayahnya untuk fokus bersekolah. Perhatian keluarga Nurcholish Majid yang serius terhadap pendidikan mengantarkannya menjadi salah satu pemikir Islam yang mendapat perhatian lebih sampai sekarang terlebih era 70 – 80 an.

Sisi lain sepanjang kehidupan Nurcholish tidak terlepas dari persoalan agama dan negara. Latar belakang keluarga NU (Nahdatul Ulama) yang tergabung dalam Masyumi secara sadar mengantarkan Nurcholish kepada salah satu pemikir yang terfokus kepada aspek agama dan negara. Sebab demikian banyak pengamat menyebutkan pemikiran Nurcholish terdiri dari tiga aspek, yaitu Islam, keIndonesiaan dan keModernan.

Latar belakang keluarga dan lingkungan sosial politik tersebut oleh M. Monib dan I. Bahrawi menyebutkan Nurcholish tumbuh dan dibesarkan dari dua pendekatan yang berbeda antara orde lama dan orde baru. Orde lama yang berupaya lepas dari kolonial mempunyai pendekatan ideologis dengan retorika, motivasi dan jargon kesemangatan merdeka. Sementara orde baru merupakan semangat membangun pasca Indonesia merdeka, bangsa hadir dengan pendekatan ekonomi[8].

2. Perjalanan Akademik

Disebutkan di atas bahwa keluarga Nurcholish Majid mempunyai kepedulian terhadap pendidikan, terlebih Nurcholish merupakan anak pertama yang mesti mempunyai kecerdasan yang kuat dalam keluarga. Ayah Nurcholish selalu berupaya menghadirkan semangat belajar kepada Nurcholish sedari kecil, sehingga faktor tersebut membuat Nurcholish Majid tidak memiliki bakat dalam bidang ekonomi seperti saudaranya yang mahir berdagang.

Perhatian yang serius terhadap pendidikan dari keluarga tersebut mengantarkan Nurcholish Majid ke dalam kancah pemikiran Islam secara luas. Nurcholish Majid memulai

[8]M. Monib I. Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Majid,* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h 18.

pendidikan dasar pada usia 9 tahun dan tamat pada usia 14 tahun di SR (Sekolah Rakyat) yang didirikan oleh kakeknya atas hasil lobi pemerintahan masa itu. Pagi hari Nurcholish belajar di SR, sore harinya Nurcholish belajar ilmu agama di *Madrasah Wathoniah* (Sekolah Patriot) yang didirikan oleh ayahnya Abdul Majid pada 12 Maret 1946[9].

Mengutip M. Wahyuni Nafis, Nurcholish melanjutkan pendidikannya ke tingkat *Tsawiyah* atau disebut oleh Nurcholish dengan nama SMPI (Sekolah Menengah Pertama Islam) pada tahun 1954 di Pesantren Darul Ulum Rejoso yang dipimpin oleh teman ayahnya Kiai Romli Tamim. Disebutkan bahwa pada masa itu di samping KH Hasyim Asy Ary, Kiai Romli Tamim adalah orang yang berpengaruh berikutnya di Jombang[10].

Nurcholish tidak menyelesaikan pendidikannya di Pesantren Darul Ulum Rejoso karena sesuatu dan lain hal[11]. Akhirnya Nurcholish melanjutkan pendidikan dengan pindah sekolah ke PM Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, di Pesantren Modern inilah Nurcholish merasa hidup sebagai seorang yang dapat berpikiran bebas dan memandang dunia luas. Salah satu kutipan favoritnya mengenang PM Darussalam

---

[9]M. Wahyuni Nafis, *Cak Nur, Sang Guru Bangsa: Biografi Pemikiran Prof. Dr. Nurcholish Majid*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2014), h 9.

[10]M. Wahyuni Nafis, *Cak Nur, Sang Guru Bangsa: Biografi Pemikiran Prof. Dr. Nurcholish Majid*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2014), h 11.

[11]*Faktor politik Masyumi dan NU menjelang pemilu 1955; di manasebelumnya NU tergabung dalam Masyumi dan keluar tahun 1952.Nurcholish anak seorang Masyumi yang sekolah di NU menjadi efek anak tiri pendidikan sehingga pindah sekolah. Ketegangan yang kendatara sampai masuk ruang Masjid; seperti contoh ayah Nurcholish, Abdul Majid menulis di dinding Masjid Masyumi yang didirikannya sebagai sikap politik dengan kutipan Hadits: "idza wusida al amru ila ghayri ahlihi, fantazhiru sa'ah" / jika suatu urusan diserahkan pada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. (lihat : siapakah Caknur oleh M. Wahyuni pada Cak Nur, Sang Guru Bangsa: Biografi Pemikiran Prof. Dr. Nurcholish Majid, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2014).*

Gontor yaitu “berani hidup, tak takut mati; takut hidup, mati saja[12].

Saat bersamaan; diketahui bahwa tahun 50-60 adalah tempat di mana perpolitikan tanah air sedang diuji pasca kemerdekaan oleh isu agama dan negara. Kaum nasionalis yang sepakat akan dasar negara Pancasila dipaksa menghadapi kawan sendiri yang beda paham persoalan agama dan negara seperti orang-orang Masyumi yang ingin Indonesia sebagai negara agama dan PKI (Partai Komunis Indonesia) ingin Indonesia sebagai negara komunis. Kecamuk politik yang panas menjadikan Nurcholish merasa nyaman berada di PM Darussalam Gontor[13], sebab sikap politik yang diterapkan oleh para pengajar yaitu “tidak boleh buta politik, dan tidak ikut praktik politik”[14].

Secara sepihak, sejauh ini menunjukkan latar belakang lingkungan dan kondisi politik yang menghiasi masa remaja awal Nurcholish, maka dapat dipahami prototipe jargon politik Nurcholish "Islam yes, Partai Islam no" bukan hadir begitu saja sebagai konsep setelah pemikirannya matang melainkan sudah sedari kecil dibayangi oleh isu relasi agama dan negara. Lebih jauh, jargon ini menitik beratkan kepada konsep yang membuat Nurcholish menjadi ada dalam wacana pemikiran Islam Indonesia, yaitu tentang ide sekularisasi.

Tahun 1960 Nurcholish Majid tamat dari PM Darussalam Gontor; atas saran KH. Zarkasi (Pimpinan pesantren saat itu) Nurcholish melanjutkan pendidikan ke Fakultas Adab IAIN

---

[12]Lihat: M. Wahyuni Nafis, *Cak Nur, Sang Guru Bangsa: Biografi Pemikiran Prof. Dr. Nurcholish Majid*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2014)

[13]*Diketahui bahwa Pesantren dan Masjid masa itu menjadi salah satu tempat Pembangunan gagasan dasar politik, maka tidak heran seorang anak Masyumi sekolah di kalangan NU akan menjadi anak tiri Pendidikan dan PM Darussalam Gontor dengan sikap tidak memihak terbebas belenggu dari dua golongan dalam satu koridor Islam yaitu Masyumi dan NU.*

[14]M. Wahyuni Nafis, *Cak Nur, Sang Guru Bangsa: Biografi Pemikiran Prof. Dr. Nurcholish Majid*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2014), h 21.

Ciputat (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekarang) pada tahun 1961. Selama menjadi mahasiswa Nurcholish banyak berganti-ganti tempat tinggal dan lama menetap di asrama Mesjid Agung Al Azhar sehingga Nurcholish dapat bertemu akrab dengan idola masa santrinya dulu yaitu Buya Hamka. Nurcholish banyak belajar dan saling bertukar pikiran bersama Buya Hamka selama tinggal di asrama Masjid Agung Al Azhar[15].

Nurcholish mempunyai kedekatan personal dengan Buya Hamka; suatu waktu Nurcholish menyampaikan keberatannya akan tafsiran ayat yang disampaikan oleh buya Hamka, setelah didalami bersama dapatlah benang merah bahwa pandangan Nurcholishlah yang dibenarkan. Lain kesempatan pada kegiatan rutinitas subuh jemaah Masjid Agung Al Azhar, Nurcholish dipercaya untuk menggantikan Buya Hamka memberi ceramah. Setelah tinggal selama 6 tahun antara 1963-1969 di asrama Masjid Agung Al Azhar akhirnya Nurcholish keluar karena berumah tangga[16].

Setamat IAIN Ciputat Nurcholish melanjutkan jalur akademiknya ke Amerika Serikat di Universitay of Chicago untuk gelar Ph. D. Selama menamatkan kampus tersebut Nurcholish awalnya mengambil konsentrasi Ilmu Politik di bawah bimbingan Prof. Leonard Binder sebelum akhirnya setelah dua tahun Nurcholish memilih pindah konsentrasi terhadap pemikiran Islam dan Filsafat di bawah bimbingan Prof. Fazlur Rahman[17].

Alasan Nurcholish mengambil Politik di University of Chicago karena menurutnya ilmu politik adalah instrumental keilmuan yang patut dimiliki oleh seorang akademisi, bukan

---

[15]M. Wahyuni Nafis, *Cak Nur, Sang Guru Bangsa: Biografi Pemikiran Prof. Dr. Nurcholish Majid*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2014), h 26-30.

[16]Nurcholish Majid, *Demi Islam,* (Jakarta: Paramadina, 1999), h 58-59.

[17]Agus Edi Santoso (penyunting), *Tidak Ada Negara Islam: Surat-surat Politik Nurcholish Majid- Muhammad Roem*, (Jakarta, Djambatan: 1997), h 12

suatu tujuan tapi patut dikuasai. Karena memang bukan tujuan utama dan *background* serta adanya ketidak sesuaian Nurcholish dengan pembimbingnya Prof. Leonard Binder akhirnya Nurcholish berpindah kepada Pemikiran Islam dan Filsafat[18].

Demikian karena memang minat sebenarnya yang ingin diraih oleh Nurcholish ditambah lagi kedekatannya dengan Prof. Fazlur Rahman yang telah terjalin semenjak masih berkonsentrasi Ilmu Politik. Akhirnya pada tahun 1984 meraih gelar Ph.D. dengan disertasi berjudul *"Ibn Taymiyah on Kalam and Filsafat: a Problem a Reason and Revelation in Islam"* selanjutnya Nurcholish pulang ke Indonesia untuk melanjutkan kiprahnya di tanah air dalam moderasi beragama dengan mengajar di Pascasarjana IAIN Jakarta[19].

3. Nurcholish Majid dalam dinamika Pembaharuan

Diketahui bahwa kemunculan Nurcholish telah menjangkau ruang nasional semenjak berstatus sebagai mahasiswa. Selain sebagai ketua umum HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), dalam bidang pemikiran Nurcholish Majid memulai proses dengan menulis artikel opini pemikirannya di media-media cetak. Aktifnya tersebut menjadikan Nurcholish tersemat sebagai Natsir Muda. Sematan tersebut sekaligus menjadi harapan orang-orang Masyumi kepada Nurcholish untuk dapat kelak menggantikan Natsir sebagai pemimpin Islam mendatang sebelum akhirnya kecewa dengan ide sekularisasi yang digalang Nurcholish[20].

---

[18]*Ketidaknyamanan yang dirasakan Nurcholish adalah sebab hubungannya hanya sebatas formalitas, menurut Nurcholis seorang Pembimbing dan anak bimbingannya bukan hanya itu melainkan layaknya hubungan guru dan murid di Pesantren. (lihat: M. Wahyuni Nafis, Cak Nur, Sang Guru Bangsa: Biografi Pemikiran Prof. Dr. Nurcholish Majid, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2014).*

[19]Agus Edi Santoso (penyunting), Tidak Ada Negara Islam: Surat-surat Politik Nurcholish Majid- Muhammad Roem, (Jakarta, Djambatan: 1997), h 13.

[20]Budhy Munawar Rachman,(Pengantar) *Karya Lengkap Nurcholish Majid,* (Jakarta, Nurcholish Majid Society, 2020), h xxxix.

Harapan sebagai pemimpin Islam mendatang oleh Masyumi tersebut dalam pembacaan penulis dapat dikemukakan beberapa alasan: *pertama*, keterlibatan Nurcholish dalam HMI; di mana HMI saat itu erat kaitannya dengan Masyumi (Partai Islam yang dipimpin Natsir). *Kedua,* Nurcholish merupakan anak dari sepasang anggota Masyumi; di mana ayah dan ibunya merupakan partisipan aktif dalam Masyumi yang dipimpin oleh Natsir, bahkan dalam sebuah wawancara Nurcholish bersama Tony Hasyim dan M. Isa Idris dari majalah Forum Keadilan ; Nurcholish menyebutkan bahwa yang merupakan Masyumi muda tersebut adalah dia dengan garis bawah Masyumi tahun 50 an[21]. *Ketiga,* pemikiran Nurcholish yang kuat melalui artikel-artikel menggambarkan Natsir yang gigih.

Budhy Munawar menyebut pemikiran Nurcholis Majid dibedakan kepada dua fase: Islam-Indonesia dan Islam-Modern. Kemunculan Nurcholish dalam arus dinamika pembaharuan Islam Indonesia dapat disebut melalui peluncuran beragam artikel yang ditandai dengan orasi ilmiah di depan mahasiswa HMI, PII, GPI dan Persami pada 2 Januari 1970 di Menteng Raya 58 dengan judul makalah "Keharusan Pembaruan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat"[22].

Perkembangan berikutnya muncul ide sekularisasi Nurcholish yang mendapat perhatian tersendiri, baik menerima maupun menolak atas beragam idenya. Terlepas dari itu, dalam arus pembaharuan pemikiran, Nurcholish dalam pembacaan *Tempo* disebut sebagai penarik gerbong pembaharu Islam Indonesia. Semenjak itulah Nurcholish kerap disebut sebagai seorang yang modernis. Melihat arus pembaharuan, selain dikelompokkan sebagai modernis, Nurcholish juga dapat ditarik

[21]Nurcholish Majid, *Karya Lengkap Nurcholis Majid:Dialog Keterbukaan,* (Jakarta Selatan, Nurcholish Majid Society: 2020), h 3536.

[22]M.Saleh Tajuddin, "Filsafat Politik Nurcholish Majid", *JURNAL POLITIK PROFETIK*, vol 9, No. 2, 2021, h 178.

kepada kelompok Neo-Modernis bahkan juga kepada Neo-Tradisionalis seperti yang diungkap oleh Azyumardi Azra[23].

Sebelum jauh terkait posisi Nurcholish dalam dinamika pembaharuan, sekiranya wajar menurut penulis untuk memperhatikan pondasi pemikirannya terlebih dahulu. Diketahui Nurcholish hadir untuk menanggapi kejumudan umat dalam berpikir di tengah hiruk pikuk persoalan politik bangsa, sehingga tidak heran dalam pengantar *Karya Lengkap Nurcholish Majid* oleh Budhy Munawar, menempatkan persoalan politik terutama konsep sekularisasi yang menyeret Nurcholish menjadi perhatian nasional sebagai pembaharu pemikiran Islam.

Menanggapi stagnasi yang dialami umat, Nurcholish berpandangan harus adanya pembaharuan pemikiran Islam. Konsep pembaharuan ini disebut sebagai modernisasi; di mana hal tersebut mengandung rasionalisasi dan bernilai ilmiah. Senada demikian, rasionalisasi dan ilmiah menurut Nurcholish Majid tidak bertentangan dengan hukum alam. Sementara itu dari sisi Islam Nurcholish menyatakan modernisasi atau pembaharuan merupakan semangat rasionalisasi yang menjadi keharusan umat bahkan dengan nada tegas disebutkan sebagai kewajiban mutlak. "modernisasi merupakan pelaksanaan perintah Tuhan yang Maha Esa[24].

Terlihat bahwa, upaya pembaharuan Nurcholish merupakan suatu gerakan Modernisasi dengan semangat rasionalisasi dan bernilai ilmiah. Nurcholish mencoba keluar dari kemapanan yang stagnasi dan pemikiran yang telah fosil. Pemikiran Islam Modern merupakan upaya keluar dari kungkungan pemikiran jumud yang selama ini mendominasi umat. Nurcholish merekonstruksi pemikiran Islam yang mandek

[23]Lihat: M. Saleh Tajuddin, "Filsafat Politik Nurcholish Majid", *JURNAL POLITIK PROFETIK*, vol 9, No. 2, 2021.

[24]Nurcholish Majid, *Islam Kemodernan dan KeIndonesiaan,* dalam Karya Lengkap Nurcholish Majid, (Jakarta: Nurcholish Majid Society, 2020), h 240.

dan stagnan tersebut, karena menurut Nurcholish pemikiran jumud dan stagnan adalah penyebab keterbelakangan umat.

Moderasi yang digalang Nurcholish terus berkembang, sampai dengan tawaran konsep sekularisasi. Konsep sekularisasi Nurcholish bertujuan melangitkan yang langit dan membumikan yang bumi, yaitu memandang hanya Tuhan sematalah yang transenden, melainkan Tuhan merupakan aksiden-aksiden. Sehingga segala kemandekan yang terjadi di tengah umat selama ini diharapkan dapat teratasi[25].

Perkembangan berikutnya dalam arus pembaharuan, diketahui bersama dan telah disebutkan di atas bahwa pemikiran Nurcholish sejatinya tidak dapat dipisahkan dari isu relasi agama dan Negara, kemudian bertransformasi kepada jargon politik Nurcholish yaitu "Islam yes, partai Islam no".

Selain sebagai Modernis dengan alasan di atas, Nurcholish dalam dinamika pemikiran pembaharu juga dikelompokkan kepada Neo-Modernis. Andilnya Nurcholish dengan semangat rasionalisasi dianggap mampu mendobrak tatanan pola pemikiran Islam yang berkembang. Gagasan tersebut telah dapat memompa semangat pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia, terutama upaya memahami teks-teks fundamental Islam seperti ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Greg Barton melalui M. Saleh Tajudin menyebut Neo-Modernis merupakan kombinasi antara pemikiran Islam liberal yang progresif dengan elemen fundamental Islam[26]. Maka Muhsin dalam penelitiannya mengungkap dan menempatkan Nurcholish Majid sebagai tokoh Neo-Modernis[27].

---

[25]Fokus dari konsep sekularisasi Nurcholish Majid pertama kali adalah untuk pemurnian Tauhid. Dewasa ini dapat dipahami bahwa dengan adanya sakralisasi oleh umat terhadap selain Tuhan merupakan nilai animism yang masih melekat dalam kehidupan bangsa. Maka sekularisasi merupakan bentuk rasionalisasi Nurcholish dalam menjembatani antara Tuhan yang transenden dengan selain-Nya yang aksiden.

[26]M. Saleh Tajuddin, "Filsafat Politik Nurcholish Majid", *JURNAL POLITIK PROFETIK*, vol 9, No. 2, 2021, h 176.

[27]Lihat: Muhsin, "Neo-Modernisme Dalam Perspektif Pemikiran Nurcholish Majid", *AL-MURSHALAH*, vol 2, No. 1, 2016.

Sisi lain Nurcholish juga dikelompokkan sebagai Neo-Tradisionalis. Azyumardy Azra mendeskripsikan bahwa terdapat perubahan arah dalam pemikiran Nurcholish sepulang dari Chicago; sebelumnya Nurcholish hadir sebagai Modernis atau Neo-Modernis dengan *shock therapy* melalui pemikirannya, sepulang dari Chicago pemikiran Nurcholish mengalami perubahan dan dapat dikategorikan kepada Neo-Tradisionalis[28].

Beberapa pertimbangan dikemukakan oleh Azyumardi Azra dalam menempatkan Nurcholish kepada Neo-Tradisionalis yaitu: *Pertama*, ide pemikiran Nurcholish mengakar kepada tradisi Islam yang kuat. *Kedua*, Nurcholish memiliki apresiasi esensial terhadap syariah Islam, meski fokus pemikirannya tidak dalam bidang syariah Islam namun menekankan penting kehidupan syariah dalam kehidupan. *Ketiga*, perhatian dalam aspek esoteris dalam bidang tasawuf. Nurcholish mengkritik penolakan Ibn Taimiyah terhadap tasawuf dan tidak menggeneralisasi tasawuf kepada umat[29].

4. Kegiatan Intelektual

Pada bagian ini penulis mengulas tentang bagaimana perjalanan intelektual Nurcholish dalam berorganisasi. Diketahui bahwa Nurcholish menjadikan organisasi sebagai tuangan ide pemikirannya. M. Wahyuni Nafis pada bagian kedua biografi Nurcholish Majid menyebutkan Institut telah menjadi peranti ide pemikiran oleh Nurcholish[30], sehingga tidak heran semenjak menjadi mahasiswa sampai menjalang ajalnya Nurcholish terlibat aktif dalam beragam gerakan pemikiran dan organisasi.

Kegiatan intelektual Nurcholish disadari dapat menyebar salah satunya adalah karena keaktifan dalam membangun

---

[28]Lihat: M. Saleh Tajuddin, "Filsafat Politik Nurcholish Majid", *JURNAL POLITIK PROFETIK*, vol 9, No. 2, 2021.

[29]Azyumardi Azra, "cak Nur: Neo-Modernis atau Neo-Tradisionalis?", 30 November 2000. lihat: http://www.paramadina-online (diakses pada 24 Mei 2024).

[30]Lihat: M. Wahyuni Nafis, *Cak Nur, Sang Guru Bangsa: Biografi Pemikiran Prof. Dr. Nurcholish Majid*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2014), Bagian dua.

kelompok atau organisasi pemikiran seperti ICMI, wakaf Paramadina dan lain sebagainya. Organisasi sekiranya efektif dalam menampung dan menyalurkan ide gagasan, hal ini disinyalir dari penulisan NDP (Nilai Dasar Perjuangan) untuk HMI oleh Nurcholish sewaktu belajar di IAIN Ciputat. Selanjutnya terdapat beberapa himpunan atau institut yang digaungkan oleh Nurcholis bersama kawan-kawan sebagai lembaran tulis ide kreatif dalam membangun moderasi. Maka dalam bagian ini penulis uraikan jalan Intelektualitas Nurcholish Majid sebagai track rekor dalam berorganisasi sebagai berikut:

a. Ketua Umum PB HMI 2 Periode (1966-1969/ 1969-1971)

Terpilihnya Nurcholish sebagai ketua umum PB HMI periode pertama tidak terlepas dari persoalan HMI dan Masyumi. Terdapat tanda tanya mahasiswa HMI akan sikap kontra terhadap rehabilitasi Masyumi pada kongres yang di adakan di Solo. Ketenangan Nurcholish menjelaskan persoalan tersebut mampu menyelamatkan nama baik ketua dan Organisasi, sehingga Nurcholish menjadi sosok yang menarik perhatian anggota kongres kala itu. Nurcholish menjelaskan sikap kontra ketua umum terhadap Masyumi adalah untuk menyelamatkan HMI; di mana faktor politik tanah air yang serat akan isu agama dan negara menyebabkan Masyumi dibubarkan, buntutnya adalah HMI yang dianggap sebagai anak Masyumi juga ikut dibubarkan jika seandainya tidak mengambil sikap antara HMI dan Masyumi adalah tidak ada hubungan sama sekali[31].

Nurcholish memuji keberanian ketua umum HMI atas sikap berani mengambil keputusan sekaligus berani menjadi kambing hitam atas persoalan demi keutuhan organisasi. Ketenangan dan kemahiran Nurcholish tersebut mendapat perhatian tersendiri anggota kongres, sehingga dengan

[31]Lihat: M. Wahyuni Nafis, *Cak Nur, Sang Guru Bangsa: Biografi Pemikiran Prof. Dr. Nurcholish Majid*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2014), Bagian Siapakah Nurcholish Majid?

sepakat Nurcholish dipilih sebagai ketua umum PB HMI untuk pertama kalinya periode 1966-1969[32].

Periode selanjutnya Nurcholish kembali terpilih, satu sisi Nurcholish merasa keberatan akan pencalonannya kembali karena merupakan kanibal jabatan atau terjadinya cacat re-generasi; di mana seharusnya yang menjadi ketua adalah generasi selanjutnya[33]. Akan desakkan berbagai pihak dan keutuhan organisasi akhirnya Nurcholish menjabat kembali sebagai ketua umum PB HMI untuk kedua kalinya. Selain menjabat sebagai ketua umum PB HMI, saat bersamaan Nurcholish juga dipilih menjadi ketua PEMIAT (Moslem Assocition of Southeast Asia) periode 1967-1969; serta aktif sebagai wakil presiden IIFSO (International IslamicFederation of Student Organization) pada 1969-1971[34].

b. Mendirikan wakaf Paramadina

Yayasan wakaf Paramadina yang disebut Paramadina diresmikan berdirinya pada 31 Oktober tahun 1986 di hotel Sari Pan Pacifict, Jakarta oleh Nurcholish dan kawan-kawan. Pendirian Paramadina bermula dari ide Dawam Rahardjo yang mencoba membuka komunikasi dengan kawan-kawan di Jakarta. Komunikasi yang berhasil menjalin sepakat, maka jadilah Paramadina dan dipimpin oleh Nurcholish Majid[35].

---

[32]Ulil Albab, "Islam Kultural: Pemikiran Pembaharuan Nurcholish Majid", *Al-Munqidz: Jurnal Kajian KeIslaman*, vol. 11, No. 3, 2023, h195.

[33]*Nurcholish Majid menyampaikan menyadari betul akan terjadinya kanibal jabatan namun banyak desekkan kepadanya dating dengan tuntutan jika seandainya Nurcholish tidak setuju akan pencalonan Kembali HMI akan terpecah menjadi dua atau dengan kata lain segala yang mendesak lebih memilih memisahkan diri. Seperti alasan sebelumnya yaitu untuk keutuhan organisasi akhirnya Nurcholish menyetujui pencalonnya kembali.*

[34]Muhammad Saleh Tajuddin, "Filsafat Politik Nurcholish Majid", *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 9, No. 2, 2021, h 178.

[35]Penjelasan Dawam Raharjo dalam acara titik temu yang diselenggarakan oleh *Nurcholish Majid Society* (NCMS), Omah Batri, 17 Juli 2014. (lihat: M. Wahyuni Nafis).

Nurcholish membangun pondasi Paramadina dengan tiga sifat dasar, yaitu: independen, terbuka dan kultural. Sifat Independen menunjukkan sikap yang tidak partisipan atau terafiliasi kepada kekuatan mana pun seperti keberpihakan politik. Sifat terbuka Paramadina, Nurcholish menyampaikan bahwa Paramadina sebuah lembaga yang terbuka menerima dan menampung segala ide masukan dan tidak menutup diri kepada pihak luar. Sifat kedua ini dipilih Nurcholish Majid untuk membangun Paramadina menjadi kokoh dengan segala bentuk pemikiran yang kuat. Sifat ketiga Paramadina yaitu kultural menunjukkan sikap yang berupaya menghasilkan kerja produktif dan konstruktif[36].

Paramadina merupakan salah satu dari peranti ide bagi Nurcholish. Berdasarkan tiga sifat pondasi Paramadina, maka tujuannya disampaikan oleh Nurcholish untuk meningkatkan perkembangan dan kesadaran beragama yang terbuka dan bertanggung jawab. Tujuan tersebut diyakini dapat menghadirkan pemikiran beragama yang sejahtera dan bermakna bagi kemanusiaan sehingga tercipta nilai dinamis dan nalar yang bertanggung jawab untuk perkembangan pendidikan agama yang berdaya guna tinggi[37].

Nurcholish dalam upaya mewujudkan tujuan Paramadina menggalang tiga program yaitu: klub kajian agama (KKA) dan paket kajian Islam; penerbitan buku Islam; dan membuka worksop, training dan seminar-seminar[38]. Selain program tersebut dengan terus berkembangnya Paramadina serta sifat terbuka dalam membangun mitra kerja membuat Paramadina mendirikan lembaga pendidikan seperti serambi ke-Islaman,

---

[36]M. Wahyuni Nafis, *Cak Nur, Sang Guru Bangsa: Biografi Pemikiran Prof. Dr. Nurcholish Majid*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2014), h 104-107

[37]Nurcholish Majid, *Pandangan Dasar Paramadina*, (Jakarta: Paramadina, 1986), (lihat: M. Wahyunu Nafis).

[38]Lihat: M. Wahyuni Nafis, *Cak Nur, Sang Guru Bangsa: Biografi Pemikiran Prof. Dr. Nurcholish Majid*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2014), h 104-116.

lembaga amil zakat dan salah satunya yang terkemuka sampai sekarang adalah Universitas Paramadina Jakarta[39].

c. Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI)

Dibalik sikap ogah-ogahan Nurcholish dalam keterlibatannya dalam ICMI, sebenarnya Nurcholish mempunyai andil yang besar dalam berdirinya ICMI. Adapun sikap yang menunjukkan tidak terlibatnya Nurcholish tidak lain karena faktor keterlibatan ICMI dalam politik praktis, Nurcholish menyebutkan keterlibatannya lebih kepada bidang intelektual[40].

Pembentukan ICMI berasal dari kebiasaan berkumpul mahasiswa Indonesia untuk musyawarah dan belajar bersama di Chicago Amerika. Maka Imamuddin mencoba menghidupkan semangat itu dengan membangun sebuah himpunan. Peranan Nurcholish di sini yaitu mengusulkan nama dan menuliskan proposal himpunan organisasi untuk disepakati oleh BJ Habibie sebagai ketua yang kala itu menjabat Menteri Presiden Soeharto. Membaca proposal Nurcholish akhirnya BJ Habibie tertarik dengan pembentukan ICMI. Maka melalui BJ Habibie-lah proposal itu diterus-lanjutkan kepada Presiden Soeharto[41]. Faktor semangat mengusung pembangunan, akhirnya Presiden menyetujui pembentukan ICMI karna sejalan dengan

---

[39]*Universitas Paramadina merupakan salah satu Lembaga yang bernaung di bawah Yayasan Paramadina. Univ. Paramadina mulai dirintis sejak 1994 atas kerja sama antara Yayasan Wakaf Paramadina di bawah pimpinan Nurcholish Majid dengan Yayasan Pondok Mulia di bawah Pimpinan Soedwikatmono.*

[40]Nurcholish Majid, *Karya Lengkap Nurcholish Majid: Dialog Keterbukaan*, (Jakarta, Nurcholish Majid Society, 2020), h 3651.

[41]Waktu BJ Habibie membicarakan proposal tersebut kepada Presiden Soeharto, BJ Habibie sendiri sejatinya belum mengetahui siapa sebenarna yang menulis proposal pembentukan ICMI. Karna berasal dari imad maka BJ Habibie menganggap proposal itu ditulis olehnya. Setelah diberitahu dalang dibalik pemikiran yang tertuang dalam proposal adalah Nurcholish BJ Habibie mengambil sikap untuk yang menulis khitbah pada Muktamar kedua juga Habibie.

program nasional yang diupayakan Presiden[42], Pak Harto menyadari betul bahwa pembangunan tidak saja fisik tapi juga pemikiran. Alhasil ICMI diresmikan di Malang pada 7 Desember 1990.

Setelah berproses cukup lama sampailah ICMI ke Muktamar yang kedua tahun 1995. Muktamar ini banyak orang merasa pantas membuat *khitbah* namun tidak substansial, maka akhirnya disepakati oleh BJ Habibie untuk membuat khitbah adalah Nurcholish Majid. Sikap yang dipilih BJ Habibie adalah karena dalam ruang ide yang berperan adalah Nurcholish maka untuk penulisan *Khitbah* ada baiknya juga ditulis Nurcholish sebagai lanjutan dari ide proposalnya. Demikian tersebut diungkap Nurcholish dalam karyanya *Dialog Keterbukaan* "keterlibatan saya di ICMI, terutama dalam ide. karena itu, saya diminta untut merumuskan Khitbah"[43].

d. Mendirikan Sekolah Madania dan Sekolah Sevilla

Sekolah Madania merupakan sekolah yang didirikan oleh Nurcholish dan kawan-kawan atas usul Ahmad Fuadi. Sekolah Madania yang digarap Nurcholish merupakan upaya memadukan pendidikan umum yang Modern dengan semangat belajar Pesantren yang tradisional. Usulan pendirian sekolah Madania oleh Ahmad Fuadi ini tepatnya setelah 10 tahun Nurcholish memimpin Paramadina; Ahmad Fuadi membayangkan bagaimana jika seandainya pemikiran Nurcholish diberi kaki-tangan sebagai perpanjangan untuk dipelajari di tingkat sekolah. Akhirnya Nurcholish bersama Ahmad Fuadi, Komarudin Hidayat, Khoirul Roziqin resmi mensahkan pendirian yayasan Madania pada 3 Mei 1995.

---

[42]Hemat penulis, penerimaan ICMI bukan saja alasan semngat pembangunan yang diusung, melainkan simpatisan Presiden dari kalangan cendikiawan muslim dari konsistensi Presiden membersihkan PKI.

[43]Nurcholish Majid, *Karya Lengkap Nurcholish Majid: Dialog Keterbukaan*, (Jakarta, Nurcholish Majid Society, 2020), h 3652.

Setelah berproses, sekolah Madania mengalami perkembangan, di mana awalnya hanya tingkat SMU berkembang mulai dari tingkat TK sampai dengan SMU. Adapun perkembangan itu ditandai dengan pergantian nama sekolahnya menjadi SMU Madania Boarding School yang terletak di Telaga kaharipan, Parung, Bogor[44].

Adapun sekolah Sevillah didirikan pada 6 Oktober 2002 merupakan sekolah pendidikan karakter dengan keinsafan dasar terhadap kearifan universal dari kehidupan dan kebudayaan. Sekolah Sevilla didirikan oleh Nurcholish Majid, Sudhamek AWS dan Vincent Jaya Saputra. Penamaan Sevilla adalah titipan Nurcholish terhadap nilai Modern yang dianut oleh kota Sevilla, Andalusia. Nurcholish menjelaskan Sevilla adalah simbol kejayaan Islam di Andalusia. Sevilla pada masa jayanya Islam mempresentasikan nilai-nilai Modern seperti terbuka, majemuk, saling menghargai, menerima kebenaran dan kearifan setiap rumpun manusia dan mengakui akan adanya tokoh-tokoh sebagai pengajar kebenaran dan kearifan[45].

e. Perkumpulan Membangun Kembali Indonesia (PMKI)

Perkumpulan ini terbentuk tidak lepasnya Nurcholish dari bursa pencalonan Presiden pada pemilu 2004, sedikit banyaknya orang menginginkan Nurcholish mencalonkan diri. Berupaya menjawab keinginan orang-orang di sekelilingnya dan terlebih kepada keinginannya untuk melakukan pembaharuan dalam bidang politik awalnya Nurcholish setuju untuk dicalonkan sebagai presiden pada pemilu 2004. Namun akan problema sosial yang terjadi akhirnya Nurcholish menarik niatnya untuk dicalonkan.

---

[44]M. Wahyuni Nafis, *Cak Nur, Sang Guru Bangsa: Biografi Pemikiran Prof. Dr. Nurcholish Majid*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2014), h 184-185.

[45]M. Wahyuni Nafis, *Cak Nur, Sang Guru Bangsa: Biografi Pemikiran Prof. Dr. Nurcholish Majid*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2014), h 199.

Terlepas dari itu, Nurcholish kembali tersadar bahwa peranannya selama ini adalah di ruang pemikiran serta Nurcholish akan menjilat lidah sendiri jika mencalonkan diri sebagai Presiden. Demikian diungkap Nurcholish dalam wawancara bersama M. Wahyuni Nafis, bahwa Nurcholish menyatakan seorang yang ingin dicalonkan menjadi presiden adalah seorang yang telah mengalami asam, asin, pahit, manisnya perjuangan dalam politik, sementara Nurcholish sendiri hanya berjuang dalam ranah pemikiran[46].

Menariknya dari keterlibatan Nurcholish dalam PMKI ini [47] yaitu persoalan pencalonan itu sendiri. Diketahui Nurcholish tidak mempunyai kendaraan politik untuk dicalonkan, kendatipun ada upaya ke sana namun akan saling tidak-enakan dengan para pejuang yang telah lama mengendarai kendaraan politik. Oleh sebabnya Nurcholish menggagalkan diri untuk dicalonkan, namun dalam ranah pemikiran Nurcholish tidaklah mundur. Nurcholish yang berniat memperbaiki tatanan politik menawarkan ide politik nurani, yaitu segala bentuk demokrasi bangsa harus atas keputusan yang etis untuk rakyat. Jadi sebetulnya PMKI merupakan perhimpunan yang mengusung ide Nurcholish dalam upaya memperbaiki moral politik bangsa ketika diminta sahabat dan anak muda untuk dicalonkan menjadi presiden pada pemilu 2004, maka didirikanlah PMKI pada 23, Mei 2003[48].

Pemikiran politik nurani Nurcholish mengusung 10 platform untuk diajukan kepada kendaraan politik.

---

[46]M. Wahyuni Nafis, *Cak Nur, Sang Guru Bangsa: Biografi Pemikiran Prof. Dr. Nurcholish Majid*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2014), h 202.

[47]Perkumpulan sahabat Nurcholish dan anak muda untuk mefasilitasi terselenggaranya sosialisasi ide politik Nurcholish dalam 10 platform untuk membangun Kembali Indonesia dengan moral politik yang baik kepada kendaraan politik atau partai yang bersedia.

[48]M. Wahyuni Nafis, *Cak Nur, Sang Guru Bangsa: Biografi Pemikiran Prof. Dr. Nurcholish Majid*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2014), h 204-205.

Nurcholish menyebutkan bahwa yang primer adalah politik nurani dengan 10 platform tersebut sedangkan dirinya adalah sekunder. Dewasa ini memberitahu bahwa Nurcholish memberi kesempatan kepada siapa saja untuk menegosiasikan pemikirannya kepada kendaraan politik, bahkan secara tidak langsung upaya Nurcholish tersebut adalah upaya membongkar undang-undang politik supaya dibolehkannya calon independen untuk serta dalam kontestasi politik.

Adapun 10 platform politik nurani Nurcholis Majid, yakni sebagai berikut:

- Mewujudkan *good governence*pada semua lapisan pengelolaan negara.
- Menegakkan supremasi hukum dengan konsisten dan konsekuen.
- Melaksanakan rekonsiliasi nasional dengan cara: a) menarik pelajaran pahit masa lalu dengan tekat tidak mengulanginya; b) menatap masa depan dengan perdamaian dan penyatuan seluruh kekuatan bangsa; c) menegaskan garis pemisah antara masa lalu dan masa mendatang.
- Merintis reformasi ekonomi dengan mengutamakan pengembangan kegiatan produktif dari bawah.
- Mengembangkan dan memperkuat pranata-pranata demikrasi: kebebasan civil (khususnya kebebasan pers dan akademik), pembagian tugas dan wewenang yang jelas antara pemerintah, perwakilan dan pengadilan.
- Meningkatkan ketahanan dan keamanan nasional dengan membangun harkat dan martabat personal dan pranata TNI dan Polri dalam bingkai demokrasi.
- Memelihara keutuhan wilayah negara melalui pendekatan budaya, peneguhan kebinekaan dan ke ekaan serta membangun atomisasi.
- Meratakan dan meningkatkan mutu pendidikan di seluruh Nusantara.

- Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai tujuan bernegara.
- Mengambil peran aktif dalam usaha bersama menciptakan perdamaian dunia[49].

5. Karya Nurcholish Majid

Karya pemikiran Nurcholish Majid secara umum berisikan kontek keIslaman, keIndonesiaan dan keModernan. Kurang lebih Nurcholish Majid telah menulis sebanyak 20 buku, dan banyak opini, esai dan tulisan lainnya yang tidak dibukukan. Karya pemikiran Nurcholish Majid tersebut disebut Budhy M. Rachman kebanyakan ditulis sepulang dari Chicago[50]. Adapun kara-karya pemikiran Nurcholish Majid yakni sebagai berikut:

1. *Islam, Kemodernan dan KeIndonesiaan*, Bandung: Mizan, 1987.
2. *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, Jakarta: Paramadina, 1992.
3. *Pintu-pintu Menuju Tuhan, Jakarta*: Paramadina, 1994.
4. *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia,* Jakarta: Paramadina, 1995.
5. *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia,* Jakarta: Paramadina, 1997.
6. *Kaki Langit Peradaban Islam*, Jakarta: Paramadina, 1997.
7. *Masyarakat Religius*, Jakarta: Paramadina, 1997.
8. *Ibrahim, Bapak Para Nabi dan Panutan Ajaran Kehanifan*, Jakarta: Paramadina, 1997.
9. *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina, 1997.
10. *30 Sajian Ruhani: Renungan di Bulan Ramadhan*, Bandung: Mizan, 1998.

---

[49]Nurcholish Majid*, Indonesia Kita*, (Jakarta: Paramadina, 2003), h 114-179.

[50]Budhy Munawar Rachman (Pengantar), *Karya Lengkap Nurcholish Majid: Dialog Keterbukaan*, (Jakarta, Nurcholish Majid Society, 2020), h xxx-xxxi.

11. *Dialog Keterbukaan Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, Jakarta: Paramadiana, 1998.
12. *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat*, Jakarta: Paramadina, 1999.
13. *Demi Islam-Demi Indonesia: Wawancara dengan Nurcholish Majid,* Jakarta: Paramadina, 1999.
14. *Pesan-pesan Takwa: Kumpulan Khutbah Jumat di Paramadina*, Jakarta: Paramadina, 2000.
15. *Perjalanan Religius Umrah dan Haji,* Jakarta: Paramadina, 2002.
16. *Fatsoen Nurcholish Majid*, Jakarta: Penerbit Republika, 2000.
17. *Atas Nama Pengalaman: Beragama dan Berbangsa di Masa Transisi, Kumpulan Dialog Jumat Paramadina*, Jakarta: Paramadina, 2002.
18. *The Trus Face of Islam: Essay on Islam and Modernity in Indonesia*, Jakarta: Voice Center Indonesia, 2003.
19. *Indonesia Kita*, Jakarta: Gramedia, 2004.
20. *The Fondation of Faith for Fiqh Interfaith in Sirry, Mun'im A, Interfaith Theology: Responses of Progresive Indonesian Muslim,* Jakarta: International Center for Islam and Pluralism, 2004.

B. Pemikiran Sekularisasi Nurcholish Majid

Melihat perjalanan Nurcholish Majid di atas memberitahu bahwa Nurcholish diasuh oleh lingkup keagamaan di tengah kecamuk politik tanah air. Fenomena tersebut menghiasi perjalanan hidup Nurcholish mulai semenjak memasuki remaja awal sampai saat Nurcholis menyelesaikan pendidikan di IAIN Ciputat. Sebab demikian mengantarkan Nurcholish untuk mempelajari Ilmu Politik ke luar negeri. Hemat penulis, Intelektualitas Nurcholish yang bebas dan terbuka merupakan bagian dalam upaya menyelesaikan persoalan yang menghiasi masa remaja awal sampai menjadi seorang guru bangsa terkait isu agama dan negara.

Nurcholish memahami bahwa muslim Indonesia mengalami kemandekan yang tidak lepas dari unsur-unsur animisme pribumi. Tradisi yang mendarah daging dalam kehidupan masyarakat tersebut menyimpan sebuah tanda tanya bahwa "manakah salah-satu antara agama dan tradisi dari kebiasaan masyarakat?". Nurcholish dalam persoalan ini menawarkan sebuah sistem filterisasi dengan menghadirkan konsep sekularisasi. Filterisasi tersebut merupakan upaya untuk membedakan yang sebenarnya sakral atau transenden dengan tradisi yang tidak transenden, dengan kata lain untuk membedakan antara agama dan tradisi.

Ridwan melalui Nasitotul Jannah menyebutkan bahwa kehadiran ide sekularisasi Nurcholish Majid sejatinya secara kacamata teologis muncul sebagai respon terhadap paham fundamentalisme, suatu pengaruh eksklusivisme yang ditambah dengan wacana formulasi syariat Islam dalam kehidupan bangsa dan negara dalam bidang politik[51]. Maka dalam wacana moderasi yang digalang Nurcholish tidak dapat menghindari sekularisasi guna memutus pemahaman yang salah, terlebih terhalangnya rasionalisasi[52].

Pada sub-bab ini penulis berupaya mencari titik terang bagaimana sejatinya konsep sekularisasi Nurcholish Majid. Menelusuri substansi konsep sekularisasi ini penulis melirik langsung kepada sumber primer tulisan Nurcholish dalam karya *Islam Kemodernan dan KeIndonesiaan.* Nurcholish menjelaskan bahwa sekularisasi bukanlah maksud kepada sekularisme dalam relasi agama dan negara, melainkan proses pembebasan kepada

[51]Nasitotul Jannah, "Nurcholish Majid dan Pemikirannya (di antara Kontibusi dan Kontroversi)", *CAKRAWALA: Jurnal Studi Islam,* Vol. XII, No. 1, 2017, h 46.

[52]Rasionalisasi dalam hal ini menunjukkan upaya moderasi, karna dalam kacamata Nurcholish Majid gerakan moderasi tersebut merupakan upaya rasionalisasi; padanya tidak melanggar hukum alam dan menyalahi aturan agama.

umat yang terjebak dalam proses itu sendiri dalam menempatkan nilai Islam yang sebenarnya[53].

Proses perjalanan sejarah telah menjebak umat Islam Indonesia yang pangling dalam membedakan antara yang transenden dan tidak transenden[54]. Nurcholish menaruh keprihatinan ketika menjadikan segala yang temporal sebagai transenden, demikian dinilai Nurcholish umat menyamakan Islam sebagai agama Tuhan dengan tradisi masyarakat yang merupakan hasil cipta budi manusia. Nurcholis dalam bahasanya menyebutkan: "Islam menjadi senilai dengan tradisi, dan menjadi Islamis sederajat dengan menjadi Tradisionalis"[55].

Nurcholish menyebutkan bahwa konsep sekularisasi bertujuan untuk memantapkan tugas manusia di muka bumi sebagai *khalifah*; di mana manusia mempunyai kebebasan dan daya rasio untuk berikhtiar memperbaiki kehidupan dunia. Secara konkret konsep sekularisasi ditujukan oleh Nurcholish untuk melawan segala kesyirikan, sehingga tidak heran konsep ini dalam kacamata teologi sebagai respon terhadap paham fundamentalisme di atas[56], serta sekularisasi disebut sebagai konsep teologi pembebasan dalam upaya Nurcholish mewujudkan *Nation State* dalam Pemikiran Islam[57].

---

[53]Nurcholish Majid, *Islam Kemodernan dan KeIndonesiaan,* (Bandung, Mizan: 1987), h 280.

[54]Faktor demikian dalam perjalanan bangsa Indonesia ialah karena tidak terlepas dari kepercayaan yang dianut manusia pribumi sebelum datangnya Islam seperti animisme dan termasuk pengaruh Hindu Budha serta tradisi masyrakat yang turun temurun. Proses Panjang tersebut menyebabkan terjadinya akulturasi antara Agama dan Budaya, persoalannya terletak pada mana salah satu antara keduanya, sehingga diharapakn apa yang menjadi agama tetaplah agama (Islam) dan budaya tetap menjadi budaya.

[55]NurcholishMajid, *Karya Lengkap Nurcholis Majid:Islam Kemodernan dan KeIndonesiaan,* (Jakarta Selatan, Nurcholish Majid Society: 2020), h 280.

[56]Nasitotul Jannah, "Nurcholish Majid dan Pemikirannya (di antara Kontibusi dan Kontroversi)", *CAKRAWALA: Jurnal Studi Islam,* Vol. XII, No. 1, 2017, h 46.

[57]Lihat: Budhy Munawar Rachman, *Pemikiran Islam Nurcholish Majid*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati dan Lembaga Studi Agama dan Filsafst (LSAF), 2022), h 43-48.

Wacana di atas memberi bahwa salah satu capaian konsep sekularisasi adalah bertujuan untuk pemurnian tauhid dengan melawan segala bentuk kesyirikan. Nurcholish mengemukakan bahwa sekularisasi bermaksud untuk menduniawikan yang dunia dan mengakhiratkan yang akhirat. Senada demikian merupakan upaya mentransendenkan Tuhan semata dan tidak mensakralkan sesuatu pun seperti tradisi dan lain sebagainya[58].

Konsep sekularisasi yang menjadi polemik, mengaharuskan Nurcholish untuk menyederhanakannya. Upaya pemyederhanaan tersebut dilakukan Nurcholish melalui pendekatan bahasa. Mengutip dari karya *Islam Kemodernan dan KeIndonesiaan,* bahwasanya Nurcholish mengutip Samuel Son "kita mesti hati-hati terhadap tirani kata". demikian memberitahu bahwa seseorang dapat saja terjerumus jika tidak mendapat perhatian dan tanggapan yang wajar seperti halnya perbedaan sekularisasi dengan sekularisme[59].

Melalui pendekatan bahasa Nurcholish menunjukkan perbedaan antara sekularisme dengan sekularisasi. Istilah tersebut berasal dari bahasa Inggris dan Jerman yang mengadopsi bahasa Latin yaitu *Saeculum* yang berarti zaman sekarang dan dunia. Adapun persamaannya dalam bahasa Latin tersebut yaitu *Mundus;* perbedaannya *saeculum* menunjukkan waktu sedangkan *mundus* menunjukkan ruang. Adapun lawan bahasanya yaitu *Eternum* yang berarti alam abadi yang merujuk kepada akhirat. Sekularisme identik dengan dunia karena menunjukkan masa waktu yang terbatas dan berlawanan dengan *eternum* yang abadi dalam masa dan waktu. Nurcholish dengan landasan bahasa menunjukkan tidak ada suatu kesalahan penempatan terhadap manusia sebagai makhluk sekular karna

[58]Nurcholish Majid, *Karya Lengkap Nurcholis Majid:Islam Kemodernan dan KeIndonesiaan,* (Jakarta Selatan, Nurcholish Majid Society: 2020), h 281.

[59]Lihat: Nurcholish Majid, *Islam Kemodernan dan KeIndonesiaan dalam Karya Lengkap Nurcholis Majid,* (Jakarta Selatan, Nurcholish Majid Society: 2020).

menunjukkan manusia hidup di dunia dan belum mati di akhirat[60].

Nurcholish menyebutkan terdapat perbedaan antara sekularisasi dan sekularisme; selain dari makna bahasa, sekularisasi merupakan suatu proses yang dinamis sedangkan sekularisme membentuk pengertian dunia baru dan menghasilkan filsafat sendiri serta berseberangan dengan agama mana pun karna sekularisme sudah seperti agama sendiri. Sekularisasi merupakan proses duniawi yang dinamis dengan pengakuan terhadap wewenang pengetahuan dalam prosesnya sehingga terus membentuk agenda baru dalam kehidupan dunia. Diketahui bahwa dalam mengusung konsep sekularisasi Nurcholish mengikuti Harvey Cox, dalam kutipannya menyebutkan bahwa:

> "Sekularisasi sebagai istilah deskriptif mempunyai arti yang luas dan mencakup. Ia muncul dalam samran-samaran yang berbeda-beda, tergantung kepada sejarah keagamaan dan politik suatu daerah yang dimaksudkan. Namun, di mana pun ia timbul ia harus dibedakan dari sekularisme. Sekularisasi menunjukkan adanya proses sejarah, hampir pasti tidak mungkin diputar kembali, di mana masyarakat dan kebudayaan dibebaskan dari kungkungan atau asuhan pengawasan keagamaan dan pandangan dunia metafisis yang tertutup, telah kita tegaskan bahwa sekularisasi, pada dasarnya adalah perkembangan pembebasan. Sedangkan sekularisme nama untuk suatu ideologi, suatu pandangan dunia baru yang tertutup yang berfungsi sangat mirip sebagai agama baru"[61].

Selain Harvey Cox, pandangan luar yang dikutip oleh Nurcholish adalah Robert N. Bella berkenaan dengan pendekatan sosiologis terhadap sekularisasi. Bella berpandangan sekularisasi sama dengan devaluasi radikal dan tidak menghalangi kepada orientasi beragama.

---

[60]"*Proporsi Istilah "Sekular" dari Segi Bahasa*", lihat: Nurcholish Majid:*Islam Kemodernan dan KeIndonesiaan*, (Bandung, Mizan: 1987).

[61]"*Kutipan Nurcholish terhadap Harvey Cox"*,lihat:Nurcholish Majid, *Karya Lengkap Nurcholis Majid:Islam Kemodernan dan KeIndonesiaan,* (Jakarta Selatan, Nurcholish Majid Society: 2020), h 293.

Sekularisasi atau devaluasi radikal melalui pendekatan sosiologis, dipaparkan oleh Bella bahwa sebenarnya sekularisasi munculnya bersamaan dengan hadirnya Islam. Guna mewujudkan capaian suci terhadap Tuhan, Islam menghapus paham penyucian terhadap suku di tanah Arab. Oleh sebabnya agak lain jika sekularisasi dalam skala sosial tidak ada dalam Islam. Membaca Bella tersebut, Nurcholish berpandangan konsep sekularisasi merupakan pembebasan dan berorientasi terhadap monoteisme Tuhan, sehingga jika diproyeksikan kepada dunia sekarang dapat memberantas segala bentuk syirik seperti bidah dan khurafat[62].

Perbedaan antara sekularisasi dan sekularisme yang lainnya diungkap oleh Nurcholish yaitu sekularisasi merupakan proses duniawi tanpa paham dunia sedangkan sekularisme merupakan pandangan dunia dengan paham dunia dan tanpa akhirat. Untuk melengkapi argumen ini Nurcholish mengutip QS Al Qasas ayat 77, bahwasanya Tuhan memerintahkan umat untuk memperhatikan kehidupan akhirat kelak dan tutut memedulikan nasibnya di dunia sekarang[63].

Setelah ditinju kembali sebagai agenda lembaran kerja, pada akhirnya sekularisasi merujuk kepada konsep tersendiri dalam upaya pembaharuan Nurcholish Majid. Konsep sekularisasi pada tahap selanjutnya dibingkai dengan pendekatan nilai-nilai tradisi Islam. Oleh sebabnya tidak heran Azyumardi Azra mengklasifikasikan Nurcholish Majid kepada Neo-Tradisional, yaitu pembaharuan dengan

---

[62]Nurcholish Majid, *Karya Lengkap Nurcholis Majid:Islam Kemodernan dan KeIndonesiaan,* (Jakarta Selatan, Nurcholish Majid Society: 2020), h 340-342.

[63]*QS Al Qasas: 77,* "Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan".Akses:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag

elaborasi antara nilai Modern dan nilai Fundamental[64]. Lebih lanjut konsep sekularisasi telah menjadi pola dan proses berpengetahuan dalam pembaharuan Nurcholish seperti mendalami nilai penegasian dan afirmasi dalam *syahadat Islam;* nilai sekuler antara Animisme dan Tauhid; hari dunia dan hari akhirat serta Ar-Rahman dan Ar-Rahim[65].

Beberapa poin dapat dikemukakan dari uraian di atas yaitu secara substansi konsep sekularisasi Nurcholish Majid merupakan upaya pemurnian tauhid dengan menetapkan nilai sekuler (pembeda) antara yang sakral dan temporal. Tahapannya merupakan proses duniawi oleh manusia sebagai khalifah yang berikhtiar menuju hidup lebih baik. Luar dari pada itu, hal yang tidak kalah penting selain hubungannya dengan persoalan tauhid adalah bagaimana hubungannya dengan persoalan politik terkait isu agama dan negara?.

Secara bertahap ide sekularisasi tersebut dalam bidang politik bertransformasi kepada sebuah jargon "Islam yes, Partai Islam no". Keterkaitan dengan politik inilah sebenarnya menyebabkan Nurcholish mendapat kritikan dari sebagian cendekiawan muslim. Kendati telah dipaparkan di atas, beragam perbedaan antara sekularisme dengan ide sekularisasi yang diusung Nurcholish, namun bagaimanapun bicara sekularisasi adalah konsep tentang hubungan agama dan negara, karna di lain sisi sekularisasi merupakan proses dalam ideologi sekularisme.

Terkait persoalan politik, Nurcholish tidak sepaham dengan Partai Islam yang bercita-cita mendirikan negara Islam, bagi Nurcholish keinginan mendirikan negara Islam hannyalah kecenderungan apologetik semata, baik terhadap

---

[64]lihat: Azyumardi Azra, "cak Nur: Neo-Modernis atau Neo-Tradisionalis?", 30 November 2000. lihat: http://www.paramadina-online Atau M. Saleh Tajuddin, "Filsafat Politik Nurcholish Majid", *JURNAL POLITIK PROFETIK*, vol 9, No. 2, 2021.

[65]"*Sekali Lagi Tentang Sekularisasi*", Lihat: Nurcholish Majid, *Karya Lengkap Nurcholis Majid:Islam Kemodernan dan KeIndonesiaan,* (Jakarta Selatan, Nurcholish Majid Society: 2020), h 297-311.

ideologi Barat maupun legalisme Islam sendiri[66]. Lain sisi Nurcholish memiliki pandangan yang hampir mirip dengan paham sekularisme, yaitu antara agama dan negara tidak dapat digabungkan tapi tidak terpisah sehingga antara agama dan negara merupakan dua unsur yang berbeda. Mengutip Dona R. Fitri dkk, bahwasanya Nurcholish berpandangan negara merupakan kehidupan dunia yang rasional dan kolektif sementara agama mempunyai sisi spiritual dan personal[67].

Selain dinilai kecenderungan apologetik, jargon politik Nurcholish "Islam yes, Partai Islam no", muncul sebagai akibat ketidakpuasan Nurcholish terhadap partai politik Islam yang gagal menebar syiar agama, yang terlihat tidak atas Islam melainkan kepentingan pribadi atau oknum partai, serta banyaknya kubu-kubu dalam Islam yang menunjukkan tidak satu visi, bahkan parahnya partai Islam terlibat dalam kasus korupsi[68].

---

[66]Yusafrida Rasyidin, "Menjelajahi Pemikiran Politik Nurcholish Majid Tentang Agama dan Negara", *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam,* Vol 16, No. 1, h 41.

[67]Donna R. Fitri dkk, "Pemikiran Neo-Modernisme dalam Hubungan Agama dan Negara di Indonesia: Studi Komparatif Pemikiran Nurcholish Majid dan Abdurrahman Wahid", Al Imam, Vol 3, h 4.

[68] Agus Riyadi, "Islam yes, Partai Islam no: Analisa terhadap Pemikiran Nurcholish Majid Tentang Politik Islam", *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006, h vi.

BAB III:
RELASI AGAMA DAN NEGARA PERSPEKTIF NURCHOLISH MAJID

A. Relasi agama dan negara

Kajian tentang relasi agama dan negara merupakan topik yang selalu hangat dari waktu ke waktu, khususnya dikaitan dengan konteks ke-Indonesian. Islam sebagai agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tapi juga hubungan antar sesama manusia sebagai makhluk sosial, tidak terkecuali hubungan Islam dan persoalan kenegaraan atau politik.

Sebagai contoh, Indonesia dengan penduduknya mayoritas muslim tidak pernah lepas dari persoalan-persoalan terkait agama dan negara, mulai dari semenjak berdirinya sampai sekarang. Sebagaimana yang telah disinggung bab sebelumnya.

Pada masa awal kemerdekaan persoalan yang muncul terkait relasi agama dan negara lebih kepada persoalan asas negara, apakah negara Republik Indonesia didasarkan pada Islam atau perlu penerapan syariar Islam. Akan tetapi dewasa ini perdebatan mengenai relasi agama dan negara sudah tidak lagi menyangkut dasar negara karena praktis umat Islam sudah menerima Pancasilasebagai dasar negara Republik Indonesia. Sebagaimana dapat dilihat pada perjuangan partai-partai politik Islam yang diwakili antara lain oleh PKS, PPP, PKB dan PAN.

Relasi agama dan negara merupakan variabel utama dalam penulisan *Tesis* ini. Telah diungkap pada bab awal bahwa terdapat tiga persinggungan antara agama dan negara yaitu kekuasaan, sosial dan hukum. M Arief Khumaidi dalam bedahannya pada tiga persinggungan tersebut menyatakan bahwa: *Pertama*, Kekuasaan: agama mengatasnamakan Tuhan terhadap kekuasaan yang dimilikinya, sedangkan negara melegitimasi kekuasaan atas nama kedaulatan rakyat. *Kedua*, Sosial: agama memberi tuntunan untuk menjadi pedoman dalam berinteraksi sesama manusia, sedangkan negara mengatur hubungan antar warga dalam kehidupan sosial warga negara. *Ketiga,* Hukum: agama mempunyai doktrin untuk

dilaksanakan umat berupa *amar makru nahi munkar*, sedangkan negara menetapkan regulasi sebagai pedoman dalam bernegara yang diikuti seluruh warga negara[1].

Selain tiga persinggungan agama dan negara di atas, dalam hubungannya terdapat tiga relasi agama dan negara yaitu teokrasi, sekularisme dan tamyiz. Ahmad Sadzali dalam bukunya menyatakan relasi *Teokrasi,* merupakan penyatuan antara agama dan negara dalam satu ideologi. Pada sistem ini agama menjadi panduan bernegara dalam kehidupan warganya. Relasi *Sekularisme* merupakan sebalikny, antara agama dan negara tidak ada hubungan sama sekali atau keduanya saling bertolak dan terpisah. Negara dengan sistem sekulerisme tidak peduli terhadap agama warganya, namun praktik agama warga diharapkan tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan. Relasi *Tamyiz* yaitu antara agama dan negara saling terkait dan berupaya saling melengkapi, dalam sistem ini negara turut mengatur bagaimana warganya beragama dan aturan-aturan tersebut diupayakan sesuai dengan norma agama[2].

Agus Handoko membagi tiga relasi tersebut dengan menggunakan istilah *Integralistik* untuk teokrasi, *Sekularistik* untuk sekularisme dan *Simbiotik* untuk tamyiz[3]. Adapun dalam penulisan *Tesis* ini penulis menggunakan istilah seimbang sama untuk teokrasi, seimbang tidak sama untuk sekularisme dan saling kombinasi untuk tamyiz, untuk lebih lanjutnya penulis paparkan pada sub-bab berikutnya:

1. Seimbang Sama (Teokrasi)

   Teokrasi merupakan relasi yang seimbang sama dalam hubungan agama dan negara; di mana antara agama dan negara merupakan suatu hubungan yang integral, yaitu tergabung sehingga antara keduanya satu kesatuan, dengan kata lain relasi

[1]Muhammad Arief Khumaidi, "Agama dalam Negaraantara Teokrasi, Sekuler dan Tamyiz", Jurnal Iman dan Spiritual, Vol 1, No. 4, 2021, 554.

[2]Lihat: Ahmad Sadzali, *Relasi Agama dan Negara: Teokrasi, Sekuler Tamyiz,*(Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam (PSHI), 2018).

[3]Lihat: Agus Handoko, "Relasi Agma dan Negara dalam Tafsir Al-Nukat wal Al-'Uyun Karya Al Mawardi", *Disertasi* Universitas PTIQ Jakarta 2023.

seimbang sama antara agama dan negara menjadikan negara sebagai wadah penerapan aturan agama. Relasi pada sub-bab ini menunjukkan antara dua objek yang disandingkan dinilai seimbang. Secara semiotika relasi seimbang sama dapat dilihat sebagai mata uang koin dengan ke-dua sisinya, yaitu satu kesatuan yang tidak terpisah.

Relasi seimbang sama agama dan negara merupakan suatu hal yang bersifat integral yaitu keseluruhan yang utuh antara agama dan negara[4]. Agus Handoko dalam *Disertasi*nya mengikuti pemetaan Alex Medani menggunakan kata integralistik untuk relasi seimbang sama ini[5]. Integralistik pada relasi agama dan negara merupakan teori yang menyebutkan antara agama dan negara menyatu (integrated), sebab demikian pemegang kekuasaan adalah pemimpin agama dan politik negara sekaligus. Relasi integralistik berpandangan, negara selain sebagai lembaga politik sekaligus sebagai lembaga agama[6].

Pandangan seimbang sama pada relasi agama dan negara meletakkan keduanya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah. Dilihat dari sisi Islam, dipahami Islam merupakan agama komprehensif dan universal yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, sehingga negara dalam legitimasi politikpun dapat berdasarkan agama. Demikian itu dapat dilihat bagaimana penerapan syariat agama di Madinah saat dipimpin Rasulullah. Mengutip Ahmad Khalwani, bahwasanya Allah SWT menetapkan Nabi Muhammad SAW sebagai Khalifah pengganti-Nya untuk merapkan norma agama sebagai aturan dalam kehidupan manusia [7].

---

[4]KBBI Online: integral berarti keseluruhan, lengkap, utuh dan bulat sempurna. Lihat: *https://kbbi.web.id/integral.html*(diakses, 6 Juni 2024).

[5]Lihat: Alex Medani, "Pola Hubungan Agama dan Negara Menurut Farag Fouda dalam Siyasa Sar'iyah", *Jurnal Hukum Islam Al-Hurriyah,* Vol 2, No. 2, 2017.

[6]Agus Handoko, "Relasi Agma dan Negara dalam Tafsir Al-Nukat wal Al-'Uyun Karya Al Mawardi", *Disertasi* Universitas PTIQ Jakarta 2023, h 102.

[7]Ahmad Khalwani, "Relasi Agama dan Negara dalam Pandangan Ibnu Khaldun", resolusi, Vol 2, No. 2, 2019, h 110.

Relasi seimbang sama antara agama dan negara selain dinilai sebagai integral juga disebut dengan Teokrasi; di mana secara relasi dianggap sama antara agama dan negara, yaitu kekuasaan Tuhan melalui wakilnya di muka bumi atau dengan kata lain Teokrasi meletakkan Tuhan sebagai kekuasaan tertinggi. Merujuk kepada KBBI, menunjukkan arti teokrasi kepada pemerintahan negara berdasarkan kepercayaan terhadap Tuhan yang memegang kekuasaan, hukum yang berlaku adalah hukum Tuhan dan pemerintahan negara oleh ulama atau organisasi keagamaan[8].

Sistem teokrasi dalam relasi agama dan negara merupakan relasi yang seimbang antara agama dan negara; di mana keduanya berjalan sejajar tanpa ada pemisahan dalam roda pemerintahan. Dengan demikian tidak mengherankan dalam relasi ini disebut Tuhan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Seperti diketahui, dalam sistem agama, percaya bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa dan manusia di bumi merupakan Khalifah atau pengganti Tuhan dalam menjalankan ajaran agama untuk keselamatan menuju akhirat.

Terkait teokrasi secara garis besar masing-masing agama memiliki pandang yang sama. Yahudi memahami teokrasi dengan pemerintahan berupa kedaulatan dan otoritas di tangan Tuhan, sementara rakyat mengakui Tuhan sebagai Pencipta dan pemilik segala yang baik. Sementara agama Kristen memahami teokrasi dengan sistem politik yang dijalankan oleh para Pendeta[9]. Adapun teokrasi dalam Islam tercermin pada sistem khilafah, di mana fungsi khalifah untuk menjaga, mengatur dan menjalankan kehidupan dunia dengan berpegang pada Al-Qur'an.

2. Seimbang Tidak Sama (Sekularisme)

Selain relasi seimbang sama, dalam hubungan agama dan negara juga terdapat relasi simbang tidak sama. Relasi seimbang

[8]KBBI: https://kbbi.web.id/teokrasi (diakses 17 Juli 2024)

[9]Muhammad Hisyam, "Tinjauan Buku: Islam Indonesia dan Utopia Negara Sekuler", *Masyarakat Indonesia*, Vol 38, No. 2, 2012. h 464.

tidak sama merupakan dua unsur yang dinilai berbeda dan tidak dapat disatukan satu sama lain. Relasi seimbang tidak sama menunjukkan agama berdiri di luar institusi negara atau sebaliknya negara menutup diri akan kehadiran agama dalam pemerintahan dan politik. Konsep ini disebut dengan ideologi sekularisme, yaitu pemisahan antara agama dan negara[10].

Telah disinggung di atas bahwa sistem teokrasi atau integral bertolak belakang dengan paham sekuler, integral merupakan penggabungan sementara sekuler pemisahan. Sekuler merupakan paham yang berpandangan bahwa agama dan negara harus terpisah, agama merupakan privat personal yang tidak boleh dihadirkan dalam ruang publik[11]; di mana lingkup publik merupakan tempat umum yang bersifat netral dan diatur oleh negara. Maka dalam negara sekuler kehadiran urusan privat ke publik merupakan suatu ketidak-etisan tersendiri.

Secara harfiah sekuler dalam KBBI menunjukkan makna sesuatu yang bersifat duniawi atau kebendaan (bukan bersifat keagamaan atau kerohanian)[12]. Sekularisme menunjukkan arti kepada paham atau pandangan yang berpendirian bahwa moralitas tidak perlu didasarkan pada ajaran agama[13]. Melirik makna harfiah dari KBBI antara sekuler dan sekularisme dengan kaitannya pada negara dapat dipahami bahwa agama tidak menjadi pokok yang harus ada di dalam negara serta pada prinsip moralpun tidak dibutuhkan.

Secara leksikal paham sekularisme berasal dari bahasa Latin *"Saeculum"* yang berarti waktu dan tempat sekarang[14].

---

[10]Costatinus P. Y Mofun, "Negara Sekuler atau Negara Agama: Tinjauan Hubungan Agama-Negara dari Perspektif Calvinis",*Fidei: Jurnal Teologi Sistematika dan Praktika,* Vol 6, No. 2, 2023, h320.

[11]M. Arief Khumaidi, "Agama dan Negara: antara Teokrasi, Sekuler dan Tamyiz", *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol 1, No. 4, 2021, h 554.

[12]KBBI Online: https://kbbi.web.id/sekuler (diakses 17 Juni 2024).

[13]KBBI Online: https://kbbi.web.id/sel\kularisme (diakses 17 Juni 2024).

[14]M. Fahri Angga Soli dkk, "Pengaruh Sekularisme Bagi Politik Indonesia", *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol 23, No. 1, 2024, h 2.

Padanan senyawa dengan bahasa Indonesia bisa diterima bahwa sekularisme merupakan persoalan bagaimana konsep kehidupan di dunia sekarang ini yang secara spesifik penggunaannya menunjukkan negara atau politik. Paham sekularisme memberitahu bahwa masa dan waktu yang sekarang ini tidak berafiliasi terhadap waktu besok atau hari mendatang berupa kepercayaan terhadap akhirat.

Pertama kali penggunaan kata sekuler ini dari bahasa Latin *saeculum,* yang menunjukkan arti ruang dan waktu oleh penulis Inggris Goerge Holyoake pada tahun 1864. M. Fahri Angga Soli menyebut tanpa mendiskereditkan agama dan kepercayaan manusia G. Holyoake mendukung tatanan sosial yang bebas dari agama sehingga dalam pandangan G. Holyoake sekularisme merupakan sistem etik atas moralitas alami dan menunjukkan kebebasan netral tanpa paksaan terhadap agama, wahyu dan supranatural atau kepercayaan tertentu[15].

Praktik kehidupan masyarakat sekuler dianggap sebagai pola hidup Modern yang tampak pada pola bangsa Barat yang benar-benar telah melakukan pemisahan agama dan negara. Bangsa Barat dianggap selesai dengan persoalan terkait dengan memilih sekularisme sebagai ideologi. Sebagai sebuah ideologi dan cara pandang membawa bangsa Barat kepada pengecaman terhadap semangat spiritualitas, sehingga agama menjadi urusan privat dan ketentuan norma dan moralitas yang ditetapkan oleh negara pada publik merupakan nilai non-agama bahkan anti agama[16].

3. Saling Kombinasi (Tamyiz)

Relasi saling kombinasi menempatkan agama dan negara pada relasi tidak teokrasi sekaligus tidak sekuler tetapi saling melengkapi satu sama lain, yaitu dua unsur yang beda tapi tidak

[15]M. Fahri Angga Soli dkk, "Pengaruh Sekularisme Bagi Politik Indonesia", *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol 23, No. 1, 2024, h 1.

[16]Masykuri Abdillah, "Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi", *Ahkam*, Vol XIII, No. 2, 2013, h 248.

terpisah[17]. Istilah lain yang digunakan untuk relasi kombinasi ini yaitu tamyiz dan simbiotik; di mana negara bukan teokrasi bukan juga sekuler melainkan integrasi antara keduanya[18].

Relasi saling kombinasi merupakan sintesa dialektik antara sekuler dan teokrasi. Ia muncul sebagai kritik pada paham sekularisme dan sekaligus untuk memberi tempat bagi agama dalam negara.

Adapun kaitannya dengan Islam yaitu pada dasarnya Islam menolak ideologi sekularisme, karena faktanya sejak Nabi Muhammad SAW sampai dengan sekarang ini Islam terlibat dalam kekuasaan. Namun demikin apakah keterlibatan Islam itu sebagai bagian dari ajaran Islam ataukah sebagai pemenuhan tuntutan situasi dan kondisi, para pemikir berbeda pendapat. Bagi yang menganggap bagian dari ajaran Islam dengn sendirinya adalah penganut teokrasi Islam, sementara yang menganggap keterlibatn Islam dalam negara hanya nilai dan tuntutan situasi dan kondisi lebih menganut padangan ketiga, di antaranya yaitu Muhammad Abduh, M. Husein Haikal, Fazlur Rahman dan Muhammad Arkoun[19].

Relasi tamyiz banyak dianut oleh negara Islam, dalam artian mayoritas seperti Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim. Meskipun Indonesia tidak menjadikan Islam sebagai dasar negara, namun Indonesia tidak bisa disebut sebagai negara sekuler karena Indonesia memberikan tempat yang tinggi pada agama melalui sila pertama Pancasila atau dasar negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, negara Republik Indonesia tidak dapat disebut negara sekuler dan negara agama, sehingga negara

---

[17]Agus Handoko, "Relasi Agma dan Negara dalam Tafsir Al-Nukat wal Al-'Uyun Karya Al Mawardi", *Disertasi* Universitas PTIQ Jakarta 2023, h 110.

[18]Indah Khoril Bariyyah, *Relasi Islam dan Negara di Negara Muslim: Studi Komparatif Pemerintahan Recep Tayyep Erdogan di Turki dan Tuan Dr. Muhathir di Malaysia*, (Tanggerang Selatan: BBC Publisher, 2022), cet 1, h 46.

[19]Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, shari'ah dan HAM, Fundamentalisme dan Antikorupsi*, (Jakarta; Kencana, 2013), h 46.

Republik Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara penganut relasi tamyiz agama dan negara.

Indah Khoiril Barriyah mencatat dalam bukunya bahwa relasi tamyiz ini merupakan pandangan moderat dalam hubungan agama dan negara. Negara diakui sebagai produk ijtihad atas dasar kontrak sosial nasional, sehingga relasi tamyis atau disebut juga relasi simbiotik lebih dinamis[20] dengan mengedepankan nilai keterbukaan, toleransi, kemajemukan, pluralisme dalam kehidupan bernegara di banding dua relasi agama dan negara sebelumnya.

Relasi saling kombinasi yang disebut dengan tamyiz. Secara konseptual menunjukkan makna saling terikat, memelihara dan menguatkan satu sama lain. Tamyiz merupakan relasi yang tidak menggabungkan dan tidak menyatukan antara agama dan negara, melainkan memilah antara sistem teokrasi dan sekuler sesuai kebutuhan negara. Bahkan M. Imarah melalui Ahmad Sadzali menyebutkan sejatinya dalam hubungan agama dan negara tidak ada teokrasi dan sekularisme tapi hanya tamyiz[21]. Pada Laman yang sama, pandangan M. Imarah diamini oleh Saadeddine Othmani dan Rachid Gannouchi, bahwasanya tamyiz merupakan hubungan agama dan negara dengan pembedaan dan pemilahan[22].

Relasi saling kombinasi selain disebut tamyiz, peneliti sebelumnya juga menggunakan istilah simbiosis atau simbiotik, dengan kata lain relasi tamyiz adalah hubungan antara agama dan negara yang saling timbal balik. Mengutip Muamar Khalif, simbiotik merupakan hubungan agama dan negara yang saling

---

[20]Indah Khoril Bariyyah, *Relasi Islam dan Negara di Negara Muslim: Studi Komparatif Pemerintahan Recep Tayyep Erdogan di Turki dan Tuan Dr. Muhathir di Malaysia*, (Tanggerang Selatan: BBC Publisher, 2022), cet 1, h 46.

[21]Tamyiz pada relasi agama dan negara menetapkan tidak sekuler karena agama dibutuhkan dalam membina moral bangsa dan tidak teokrasi karna dianggap agama bukanlah suatu institusi terlebih Islam.

[22]Ahmad Sadzali, *Relasi Agama dan Negara: Teokrasi, Sekuler Tamyiz,*(Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam (PSHI), 2018), h 46.

membutuhkan. Agama membutuhkan negara sebagai pengembangan ajaran, sementara negara membutuhkan agama sebagai pembimbing etika dan moral spiritual[23]. Sehingga menurut Agus Handoko dalam *Disertinya* relasi simbiosis senyawa dengan pemikiran Ibnu Taimiyah; bahwasanya negara merupakan alat agama[24].

B. Relasi agama dan negara dalam pemikiran Nurcholish Majid

Relasi agama dan negara seperti telah disebutkan sebelumnya merupakan kajian menarik yang tidak pernah berhenti. Hal demikian dikarenakan selalu terdapat gesekan antara keduanya baik secara kasar seperti penolakan peranan agama dalam negara maupun secara halus seperti politisasi agama yang marak terjadi seperti di Indonesia. Nurcholish Majid sebagai salah satu pemikir pembaharu Islam Indonesia turut menjadikan persoalan agama dan negara sebagai salah satu topik pemikirannya, demikian itu dibuktikan dengan ide sekularisasinya.

Persoalan agama dan negara bukan suatu yang baru melainkan sudah berabad-abab sebelumnya telah dibicarakan, tepatnya dalam Islam dimulai semejak Rasulullah SAW pindah dari Makkah ke Madinah dalam mengemban tugas suci. Hubungan agama dan negara yang dipimpin Rasulullah di Madinah merupakan bentuk integral antara agama dan negara. Masduki Duryat dalam bukunya menulis masa ini merupakan masyarakat paling modern dengan budaya yang tinggi, menghasilkan entitas sosial politik; di mana kekuasaa tidak diperintah atas kemauan pribadi melainkan bersama-sama[25].

Seperti disebutkan di atas Nurcholish merupakan pemikir pembaharu Islam Indonesia yang turut mengkaji persoalan agama dan negara dengan ide sekularisasi dan jargon politiknya. Ide

---

[23]Khalif Muammar, "Agama dan Negara: Melangkaui Dua Pendekatan yang Ekstrim, *Jurnal Peradaban Islam,* Vol 5, No. 2, 2020, h 23.

[24]Agus Handoko, "Relasi Agma dan Negara dalam Tafsir Al-Nukat wal Al-'Uyun Karya Al Mawardi", *Disertasi* Universitas PTIQ Jakarta 2023, h 110.

[25]Masduki Duryat, *Islam Majemuk: Pengejahwatahan Pendidikan, Interpretasi dan Model Islam keIndonesiaan*, (Yogyakarta: K-Media, 2018), h 169-170.

sekularisasi Nurcholish disebutkan tidak sama seperti paham sekularisme yang memisahkan agama dan negara. Selain ide tersebut, Nurcholish Majid dalam perhatiannya terhadap kajian hubungan agama dan negara menklaim tidak ada negara Islam, apologi negara Islam dan menunjukkan pemikiran yang setuju dengan Pancasila.

Terlepas dari itu, upaya melihat bagaimana pandangan Nurcholish Majid pada relasi agama dan negara merupakan upaya untuk memetakan posisi Nurcholish dari ketiga relasi agama dan negara, apakah teokrasi, sekuler atau tamyiz. Upaya ini sekaligus menunjukkan konstruksi baru relasi agama dan negara perspektif Nurcholish Majid, untuk mendapatkan jawaban tersebut penulis meninjau pokok-pokok pemikiran Nurcholish Majid tentang agama dan negara, yakni sebagai berikut:

1. Apologi negara Islam

   Kehadiran Nurcholish Majid sebagai pemikir pembaharu Islam Indonesia tidak bisa dilepaskan dari Masyumi, hal ini baik dikarenakan anak dari penggiat Masyumi (ayah dan ibu Nurcholish sepasang penggiat Partai Masyuni), maupun harapan Masyumi terhadap Nurcholish untuk menggantikan Muhammad Natsi menjadi pemimpin Islam Indonesia nantinya. Oleh sebabnya Nurcholish kerab disebut sebagai Natsir Muda.

   Nurcholish menyatakan negara Islam merupakan sebuah apologi semata[26], baik terhadap ideologi Barat maupun legalisme Islam sendiri[27]. Secara pasti Nurcholish menyatakan persoalan

[26]Apologi dalam kacamata Nurchlish Majid merupakan konsep kerendahan diri dalam menampik arus zaman yang sejatinya konsep apologetis itu lemah dan tidak mengandung krativitas yang orisinal. (lihat: Upaya Menyegarkan Paham Keagamaan Dikalangan Umat Islam Indonesia pada Karya Lengkap Nurcholish Majid, (Jakarta: Nurcholish Majid Society, 2020), h 319-320.

Sementara dalam KBBI menunjukkan arti apologi sebagai tulisan atau pembicaraan formal yang dipergunakan untuk mempertahankan gagasan, kepercayaan dan sebagai pembelaan. Lihat: (diakses pada 6 Juli 2024).

[27]Yusafrida Rasyidin, "Menjelajahi Pemikiran Politik Nurcholish Majid Tentang Agama dan Negara", *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam,* Vol 16, No. 1, h 41.

negara bukanlah kewajiban tapi tidak dapat dipisahkan dari Islam. Nurcholish tidak sepaham dengan Masyumi yang mencitakan Negara Islam, bagi Nurcholish negara Islam mendistorsi hubungan mapan antara agama dan negara, Nurcholish berpandangan negara merupakan kehidupan dunia yang rasional dan kolektif sementara agama mempunyai sisi spiritual dan personal[28].

Apologi negara Islam disebut Nurcholish sebagai konsep dengan kerendahan diri, sehingga pendirian negara Islam menjadikan Islam rendah seperti halnya senilai dengan ideologi-ideologi yang dipahami[29]. Dalam *Upaya menyegarkan paham keagamaan dikalangan umat Islam Indonesia*, Nurcholish menempatkan apologi Negara Islam sebagai salah satu lembar kerja yang urgensi untuk dijawab.

Nurcholish menyoroti dua poin apologi negara Islam: *pertama*, apologi terhadap ideologi Barat seperti demokrasi, sosialisme, komunisme dan lainnya. Apologi tersebut membawa kepada cita-cita pendirian negara Islam, dengan dalih Islam adalah agama kompleks yang meliputi politik, ekonomi, sosial, budaya dan lainnya. *Kedua,* legalisme, merupakan apresiasi terhadap Islam yang serba legalistis. Demikian disebut oleh Nurcholish penghayatan Islam adalah agama yang struktur dan kumpulan hukum. Lebih lanjut Nurcholish pada legalisme apologi negara Islam ini menyebut sebagai kelanjutan dari fiqisme Modern yang telah mengalami perubahan, sehingga tidak lagi murni hukum Islam[30].

Melihat Pemikiran Nurcholish Majid pada poin pemikiran tentang apologi negara Islam di atas, memberitahu

---

[28]Donna R. Fitri dkk, "Pemikiran Neo-Modernisme dalam Hubungan Agama dan Negara di Indonesia: Studi Komparatif Pemikiran Nurcholish Majid dan Abdurrahman Wahid", Al Imam, Vol 3, h 4.

[29]Lihat: Apologi Negara Islam pada *Islam Kemodernan dan KeIndonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1983).

[30]Nurcholish Majid, *Karya Lengkap Nurcholish Majid: Islam KeModernan dan KeIndonesiaan,* (Jakarta: Nurcholish Majid Society, 2020), h 334-338.

bahwa dalam relasi agama dan negara Nurcholish tidak setuju dengan sistem teokrasi atau negara agama yang menggabungkan antara kekuasaan agama dengan negara. Tidak setujunya Nurcholish dengan negara agama atau teokrasi ini juga tercermin dari karyanya dengan judul *Tidak Ada Negara Islam*[31], sehingga dapat dikatakan Nurcholish dalam relasi agama dan negara bukanlah penganut teokrasi.

Akan tidak teokrasi Nurcholish tersebut, apakah Nurcholish seorang sekularis? Singkatnya belum tentu, sejauh ini terlalu prematur untuk mengatakan Nurcholish sebagai seorang sekularis hanya karena tidak seorang teokrasi. Oleh sebab itu pada poin yang menunjukkan Nurcholish bukan penganut teokrasi ini apakah Nurcholish seorang sekularis? untuk mendapatkan jawaban tersebut penulis turut meninjau bagaimana pandangan agama dan negara pemikiran Nurcholish pada ide sekularisasi, yakni pada poin di bawah ini.

2. Ide sekularisasi Nurcholish Majid

Sebelum masuk kepada persoalan apakah pemikiran sekularisasi Nurcholish adalah upaya menuju sekularisme? sedikit penulis ingin menyinggung apa itu sekularisasi dan kaitannya dengan moderasi. Sekularisasi merupakan upaya menuju sekularisme (dari kacamata filsafat sekularisme); di mana pada masa pencerahan Eropa telah melahirkan ideologi sekularisme dengan mengasingkan agama ke ruang privat, sehingga dalam upaya untuk menjadi sekularis filsafat sekularisme menjadikan sekularisasi sebagai upaya menuju sekularisme.

Adapun keterkaitan sekularisasi dengan moderasi adalah saling terikat satu sama lain. Diketahui pencerahan di Eropa tersebut adalah upaya untuk menuju modern dengan keluar dari segala keterikan kepada non empirik, irrasional dan tidak ilmiah seperti agama. Sisi lain menjadi modern berarti menempatkan

[31]Lihat: Nurcholish Majid, *Surat-surat Politik Nurcholish Majid-Muhammad Roem: Tidak Ada Negara Islam,* (Jakarta, Djambatan Klasik, 2004).

manusia menjadi makhluk positivistik yang tidak terikat dengan hal-hal teologis. Maka kenyataan tersebut memberitahu bahwa antara sekularisasi dan modernisasi adalah sejalan beriringan. Poin-poin inilah yang menjadi kritik terhadap Nurcholish sebagai seorang sekularis oleh beberapa cendekiawan muslim masa itu, yaitu menempatkan Nurcholish sebagai sekularis dari kacamata filsafat sekularisme.

Sekularisasi dan moderasi yang tak terpisahkan tersebut sejatinya juga sama dengan apa yang diupayakan oleh Nurcholish Majid; di mana dalam upaya moderasi Nurcholish menyemat ide sekularisasi. Pertanyaannya adalah apakah sama sekularisasi pada filsafat sekularisme dengan ide sekularisasi Nurcholish dalam hal moderasi? Sederhananya tidak, tapi akan pertanyaan tersebut, penulis dapat memahami akan kritikan yang diarahkan kepada Nurcholish; di mana pada kenyataannya sekularisasi bukan tempat proses sosial melainkan proses filsafat sekularisme di Barat.

Lanjut melihat perbedaan ide sekularisasi Nurcholish dengan sekularisme, seperti jawaban singkat di atas tidaklah sama antara keduanya. Ide sekularisasi Nurcholish bergerak dalam rung sosial masyarakat yang tidak mengasingkan agama sedangkan sekularisasi pada sekularisme merupakan proses menuju sekularis dalam ruang filosofis dengan mengasingkan bahkan menghilangkan agama.

Sebelumnya telah dijabarkan bagaimana substansi pemikiran sekularisasi Nurcholish pada bab dua, yaitu dapat dipahami dalam bukunya dengan jelas menyatakan tidak sama antara sekularisasi yang diemban oleh Nurcholish dengan sekularisasi dalam paham sekularisme, kendati keduanya sama-sama sebagai upaya moderasi.

Oleh sebab demikian dengan meninjau ide sekularisasi Nurcholis dengan kaitannya terhadap sekularisme dan moderasi menunjukkan Nurcholish bukanlah seorang sekularis. jika demikian, di mana posisi Nurcholish dalam relasi agama dan negara masih menjadi tanda tanya karena pada poin sebelumnya

menunjukkan Nurcholish bukan seorang teokrasi dan poin ini juga bukan seorang sekularis. Oleh sebab itu kuat dugaan dalam relasi agama dan negara Nurcholish bertempat di tengah antara sekularisme dan teokrasi yaitu tamyiz, mengenai jawaban benar tidaknya Nurcholish adalah tamyiz dalam relasi agama dan negara, penulis lihat pada kesejalan Nurcholish dengan pancasila, yakni pada poin berikutnya.

3. Sejalan dengan Pancasila

Menurut penulis, sebagai upaya lanjutan dalam melacak pemikiran Nurcholish Majid dalam hubungan agama dan negara adalah dengan melihat kesejalanan Nurcholish dengan Pancasila. Demikian itu karena Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang pada dasarnya berkaitan erat dengan persoalan agama dan negara. Luar dari pada itu nama besar Nurcholish sendiri tidak bisa dilepaskan dari tiga aspek pemikiran tentang Islam, Indonesia dan Modern, sehingga melihat bagaimana pandangan Nurcholish terhadap dasar negara Indonesia sekiranya dapat menentukan posisinya pada relasi agama dan negara.

Indonesia dengan dasar Pancasila merupakan suatu ideologi yang sudah final dan teruji. Kefinalan Pancasila sendiri merupakan ujian sejarah yang merintanginya. Terkait relasi agama dan negara, Indonesia dengan dasar Pancasila dapat dikelompokkan kepada tamyiz; di mana tidak teokrasi dan tidak pula sekuler. Kenyataan ini merupakan persamaan antara Pancasila dengan tokoh yang dikaji yakni Nurcholish Majid.

Mengutip Dona R. Fitri dkk menyebutkan Nurcolish turut mengamini finalnya Pancasila sebagai dasar negara[32]. Muhammad Taufiq dan Asep Saeful menyatakan Nurcholish berpandangan Pancasila adalah jalan tengah yang tepat sebagai solusi ideologi yang diperdebatkan oleh nasionalis, Islam formalis dan Islam sekularis. Penerimaan Nurcholish terhadap

[32]Donna R. Fitri dkk, "Pemikiran Neo-Modernisme dalam Hubungan Agama dan Negara di Indonesia: Studi Komparatif Pemikiran Nurcholish Majid dan Abdurrahman Wahid", *Al Imam*, Vol 3, h 5.

Pancasila karna dinilai sejalan dengan Islam; di mana tidak satu pun sila yang bertentangan dengan Islam. Sebab itu Nurcholish menganjurkan muslim Indonesia untuk menerima Pancasila. Penerimaan ini disebutkan Nurcholish sama halnya dengan Piagam Madinah tidak dinyatakan sebagai piagam Islam, karna kepentingan semua golongan bukan muslim saja, begitupun Pancasila adalah kepentingan seluruh masyarakat Indonesia bukan satu golongan saja[33].

Wacana tersebut kembali menguatkan hipotesa penulis bahwa secara relasi agama dan negara Nurcholish menempati posisi Tamyiz. Menariknya sejauh ini adalah tamyiznya Nurcholish bukan karna tidak setuju dengan teokrasi negara Islam dan tidak sepaham dengan sekularisme, tapi berdasarkan kesejalanan dengan Pancasila.

Nucholish berpandangan Pancasila sebagai dasar negara merupakan ideologi yang terbuka. Sila pertama "ketuhanan yang maha Esa" merupakan pengakuan Indonesia dalam penerimaan terhadap agama yang dianut warga negara Indonesia. Diketahui Indonesia mengakui lima agama dan menurut Nurcholish kelimanya tersebut bukanlah asli Indonesia, akan nilai keterbukaan Pancasila mengakui dan menerima agama-agama tersebut menyiratkan baik minor ataupun mayor diterima di Indonesia[34].

Sekiranya cukup banyak Nurcholish menujukkan sikap sejalan dengan Pancasila, begitupun banyak menuliskan tentang Pancasila, salah satu dalam tulisannya menenegaskan sepaham dengan Pancasila yakni dituliskan:

> "negara kita adalah negara demokrasi-sekurangnya inilah yang diidealkan dan menjadi cita-cita kita semua-tentu tidak perlu lagi dipersoalkan. Cita-cita itu sudah menjadi tekad para pendiri Republik

[33]M. Taufiq Rahman dan Asep Saeful M, "Konsep Politik Islam Kultural Perspektif Nurcholish Majid", *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya,* vol 3, No. 2, 2018, h 390-391.

[34]Masduki Duryat, *Islam Majemuk: Pengejahwatahan Pendidikan, Interpretasi dan Model Islam keIndonesiaan*, (Yogyakarta: K-Media, 2018), h172.

> dan merupakan salah satu unsur dorongan batin yang sangat kuat bagi mereka untuk berjuang merebut, mempertahankan dan kemuadian mengisi kemerdekaan"[35].

Menurut Nurcholish lima sila Pancasila merupakan kemanunggalan atau satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisahkan unsur-unsurnya. Sebab demikian, dinilai oleh Nurcholish praktik Pancasila dalam kehidupan juga harus utuh dengan tidak mengedepankan salah satu sila antara sila lainnya[36]. Keutuhan praktik ini disoroti oleh Nurcholish dapat berdampak baik terhadap akhlak, sebagai contoh Nurcholish memberi gambaran pada opini seorang dalam tulisannya yang menggambarkan pengaruh praktik yang tepat dari Pancasila, bahwa seorang yang mengamalkan Pancasila saat melintas dengan mobil di jalan yang digenangi air akan melambatkan kendaraannya di sisi pejalan kaki[37].

Sisi lain penerimaan Nurcholish terhadap Pancasila dapat disinyalir dari konsep pluralisme yang diusungnya. Nurcholish sejalan dengan pemikiran Abdurrahman Wahid (Gusdur)[38], yang sama-sama mengedepankan nilai pluralisme dalam bernegara, yaitu memahami bangsa dengan sikap penerimaan dan terbuka terhadap kemajemukan Indonesia, karena tujuan negara oleh Nurcholish adalah supaya terselenggaranya pemerintahan yang demokrasi, adil, dinamis dan pengakuan kedaulatan[39]. Nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kacamata Nurcholish merupakan ideologi terbuka yang plural sekaligus tidak

---

[35]Nurcholish Majid, *Tantangan Demokrasi Pancasila di Masa Depan: Karya Lengkap Nurcholish Majid,* (Jakarta: Nurcholish Majid Society, 2020), h 3046.

[36]Nurcholish Majid, *Karya Lengkap Nurcholish Majid,* (Jakarta: Nurcholish Majid Society, 2020), h 3039.

[37]Lihat: "Pancasila Hendak dilaksanakan Secara Lebih Tepat?!" dalam Karya Lengkap Nurcholish Majid atau dalam Islam Kerakyatan dan KeIndonesiaan karya Nurcholish Majid.

[38]Masduki Duryat, *Islam Majemuk: Pengejahwatahan Pendidikan, Interpretasi dan Model Islam keIndonesiaan*, (Yogyakarta: K-Media, 2018), h172.

[39]Nurcholish Majid, *Islam Kemodernan dan KeIndonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1983), 84

bertentangan dengan Islam. Nurcholish menyatakan Islam tidak mengharuskan negara yang terpenting adalah esensi dan substansi dari Islam itu sendiri bukan sekedar simbol[40].

Maka sub-bab ini menunjukkan pemikiran agama dan negara Nurcholish Majid secara relasi dapat dikelompokkan kepada tamyiz atau relasi saling kombinasi. Penempatan Nurcholish sebagai penganut relasi tamyiz dalam hubungan agama dan Negara tidak saja berdasarkan bukan teokrasi dan tidak sekularisnya Nurcholish, melainkan tamyiznya Nurcholish juga atas penerimaan dan kesejalanan dengan Pancasila.

[40]Donna R. Fitri dkk, "Pemikiran Neo-Modernisme dalam Hubungan Agama dan Negara di Indonesia: Studi Komparatif Pemikiran Nurcholish Majid dan Abdurrahman Wahid", *Al Imam*, Vol 3, h 5.

BAB IV:
REKONSTRUKSI PEMIKIRAN SEKULARISASI NURCHOLISH MAJID

Sebelumnya pada bab II telah dibahas tentang trajektori dan pemikiran sekularisasi Nurcholish Majid, serta di bab III tentang relasi agama dan negara perspektif Nurcholish Majid. Tidak terlepas dari bab sebelumnya, pada bab IV ini akan dibicarakan tentang rekonstruksi pemikiran sekularisasi Nurcholish Majid. Rekonstruksi merupakan upaya membangun kembali, dalam hal ini adalah membangun kembali pemikiran sekularisasi Nurcholish Majid dengan teknik analisis kritis, yaitu dengan memperhatikan konstruksi yang berkembang sebagai presentasi wacana guna mengungkap pandangan dan identitas wacana[1].

Rekonstruksi artinya membangun kembali atau menghidupkan kembali sebuah gagasan konsep pemikiran sebagaimana mestinya. B. N. Marbun menyebutkan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ke tempat semula, yakni upaya menggambarkan kembali melalui bahan yang ada kepada semulanya[2]. Maka penulisan ini berupaya merekonstruksi pemikiran Nurcholish Majid tentang ide sekularisasi, karena problematika yang dihadapi masyarakat dewasa ini terkait hubungan agama dan negara memiliki kemiripan-kemiripan dengan apa yang terjadi pada saat Nurcholish Majid menggagas ide sekularisasinya. Sebagai contoh 10 tahun terakhir, khususnya pada era Presiden Jokowi terjadi polarisasi yang cukup kental di tengah kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh politisasi agama, misalnya isu kepala negara atau kepala daerah harus beragama Islam dengan anggapan bahwa agama melarang mengangkat pemimpin yang bukan muslim. Isu ini tampak sekali pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, begitu pula politik identitas; di mana cukup marak selama periode 10 tahun terakhir.

---

[1]Lihat: Dwi Setyawan Suraji, "Analisis Wacana Kritis dalam Pemaknaan Teks Lagu", Seminar Nasional Bahasa dan Pengajarannya (KBSP), Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

[2]B. N. Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h 469.

James P. Chaplin dalam bukunya menuliskan rekonstruksi merupakan penafsiran data psikoanalisis untuk menjelaskan perkembangan beserta makna materinya[3]. Sementara dalam KBBI, rekonstruksi menunjukkan arti pengembalian seperti semula dan penyusunan kembali[4]. Memahami hal tersebut, kendati rekonstruksi diharapkan mampu menunjukkan wacana baru, namun poin penting dalam upaya merekonstruksi adalah bagaimana fenomena latar belakang untuk dibangun kembali dan tidak melenceng dari konstruksi aslinya atau merekonstruksi juga berarti menjaga orisinalitas ide dalam perjalanan waktu.

Secara garis besar pemikiran pembaharuan Nurcholish Majid membahas tentang tiga hal utama yaitu Islam, ke-Modernan dan ke-Indonesiaan[5]. Terkait dengan Islam Nurcholish menaruh perhatian yang besar dengan menunjukkan pemikiran yang tidak setuju dengan politisasi agama, menurut Nurcholish agama (Islam) yang dipolitisasi akan kehilangan esensinya. Sementara kemodernan dalam pandangan Nurcholish merupakan sikap yang tidak bisa dihindarkan dalam perkembangan masyarakat, Nurcholish mengedepankan semangat modernitas dalam pembaharuan karena Nurcholish menilai antara Islam dan modernitas tidaklah bertentangan. Adapun pemikiran Nurcholish tentang Indonesia merupakan sikap realistis teradap negara dan agama; di mana Nurcholish mensintesiskan antara keduanya dengan pengakuan terhadap kemajemukan di Indonesia berupa pengakuan terhadap Pancasila sebagai dasar negara. dipahami dari tidak

Tiga pemikiran utama Nurcholish Majid di atas, terdapat salah satu konsep atau gagasan ide yang tidak terlepas darinya yaitu ide sekularisasi; di mana ide tersebut merupakan topik yang menarik dan paling kontroversi dalam perjalanan hidup Nurcholish Majid, dalam hal ini yang dimaksud dengan ide sekularisasi Nurcholish Majid ialah upaya moderasi untuk memantapkan pelaku dalam menjalani kehidupan di

---

[3]James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: Raja Grasindo Persada, 1997), h421.

[4]KBBI Online: https://kbbi.web.id/rekonstruksi (diakses pada 27 Juni 2024).

[5]Ulil Albab, "Islam Kultural: Pemikiran Pembaharuan Nurcholish Majid", *Al-Munqidz: Jurnal Kajian KeIslaman*, vol. 11, No. 3, 2023, h195.

dunia, yaitu dengan tidak terjebak dalam menetapkan nilai agama, atau sering disebut dengan melangitkan yang langit dan membumikan yang bumi.

Oleh sebab itu, Nurcholish Majid atau akrab disebut Cak nur disebut sebagai pemikir yang dinamis dan fleksibel oleh Budhy M. Rachman dan tokoh yang menginspirasi oleh Azyumardi Azra[6]. Sehingga menarik minat penulis untuk membicarakan atau meneliti ide sekularisasi Nurcholish tersebut pada saat sekarang dengan merekonstruksinya. Bagaimana penelitian *Tesis* relasi agama dan negara ini disusun, yakni sebagai berikut:

A. Landasan Ide Sekularisasi Nurcholish Majid

1. Tauhid/desakralisasi

   Diketahui bahwa ide sekularisasi dari kacamata teologi tidak lepas dari persoalan tauhid. Nurcholish melihat adanya kecenderungan masyarakat yang masih terikat dengan tradisi yang disakralkan, sehingga praktik demikian membahayakan pada ketauhidan si pelaku[7]. Menurut Nurcholish sejatinya yang sakral dengan nilai transenden hanya Tuhan semata, sementara tradisi adalah nilai budaya dalam kehidupan yang tidak transenden. Kekawatiran Nurcholish ialah akan adanya anggapan tauhid senilai dengan tradisi atau bertradisi sama dengan bertauhid, oleh sebab itu dalam hal yang lebih definitif Nurcholish merekonstruksi sendiri konsep sekularisasinya kepada diksi desakralisasi, yaitu bermaksud mensakralkan Tuhan sematalah.

   Melihat persoalan di atas, Kendati manusia modern tidak lagi begitu terikat dengan tradisi, namun konstruksi zaman tanpa disadari menjebak manusia pada pensakralan kepada hal lainnya dan menuju kepada kesyirikan. Demikian itu diamati pada bagaimana zaman sekarang menjadikan manusia sebagai

---

[6]Azyumardi Azra, "cak Nur: Neo-Modernis atau Neo-Tradisionalis?", 30 November 2000. lihat: http://www.paramadina-online (diakses pada 29Juni 2024).

[7]NurcholishMajid, *Karya Lengkap Nurcholis Majid:Islam Kemodernan dan KeIndonesiaan,* (Jakarta Selatan, Nurcholish Majid Society: 2020), h 280.

makhluk industri yang menuhankan nilai-nilai keduniaan seperti pangkat, jabatan ketenaran dan lainnya yang membuat dimensi spiritualitas menjadi terkikis. Argumen tersebut terlihat pada banyaknya fenomena yang menunjukkan sikap amoral dari kehidupan bernegara dewasa ini.

Sisi lain dapat dilihat dari realitas virtual manusia modern yang mempunyai akses luas. keterbukaan akses terhadap dunia luar memungkinkan baik nilai spiritual maupun tradisi dapat tergantikan oleh hal baru yang diadopsi oleh pelaku, misalnya mengadopsi *fashion* Barat yang tidak sesuai porsi sehingga memalingkan pandang rakyat dan melemahkan nilai bangsa. Kekawatiran dari hal tersebut adalah munculnya pemahaman bahwa spiritual tidak lagi diperlukan dan tradisi dianggap kuno, sehingga spiritual dan tradisi ditinggalkan.

Gambaran di atas mendorong penulis untuk merekonstruksi pemikiran sekularisasi Nurcholish Majid; di mana dengan menghidupkan kembali ide tersebut dapat mendorong tumbuhnya kesadaran bahwa dalam percepatan dunia bagaimana pun manusia adalah makhluk yang tidak terlepas dari pengawasan Tuhan, sehingga dalam kehidupan dunia sekarang akhirat juga capaian hidup manusia seperti halnya dalam ide sekularisasi Nurcholish, yaitu tidak memisahkan agama dengan negara yang dunia.

Dalam pada itu membangun kembali ide sekularisasi dengan konteks zaman dapat menunjukkan bagaimana menghidupi bangsa sendiri dengan budaya tradisinya di sisi agama berupa filterisasi kepada budaya dan nilai yang patut untuk diadopsi oleh warga negara; karena Nurcholish menghadirkan sekularisasi untuk dapat membedakan antara yang transenden dan aksiden, yaitu untuk dapat membedakan yang sepatutnya dan yang tidak. Oleh sebab itu, merekonstruksi pemikiran sekularisasi merupakan keperluan pada saat ini.

2. Depolitisasi Agama

Ide sekularisasi yang diusung oleh Nurcholish melalui kacamata teologi dapat dipahami sebagai penampik kesyirikan

seperti diutarakan di atas. Pada dinamika politik ide sekularisasi Nurcholish Majid juga berkaitan dengan perpolitikan Indonesia kala itu. Ide sekularisasi Nurcholish merupakan pembeda antara yang substansi dengan yang tidak, hal ini pada lanjutannya bertransformasi kepada jargon politik "Islam yes, Partai Islam no". Jargon tersebut merupakan marginalisasi subjektivitas untuk menunjukkan substansi Islam tidak terletak pada kegiatan politik partai Islam.

"Islam yes Partai Islam no" menunjukkan perhatian utama Nurcholish terhadap agama. Jargon ini dimunculkan bukan tanpa alasan, melainkan atas ketidak puasan Nurcholish terhadap Partai Islam yang tidak merefleksikan nilai-nilai Islam; di mana terdapatnya perilaku amoral seperti penambahan angka korupsi oleh umat Islam[8]. Jargon Islam yes, partai Islam no, bukan maksud Nurcholish untuk mengharamkan adanya partai Islam, akan tetapi Nurcholish tidak ingin agama (Islam) diperalat atau dijadikan barang dagang untuk kepentingan politik oleh kelompok tertentu atau dengan kata lain tidak melakukan politisasi agama, karena agama merupakan kemuliaan.

Apa yang dikawatirkan Nurcholish beberapa tahun lalu terkait dengan politisasi agama juga terlihat dewasa ini, bahkan dengan wajah yang lebih mengerikan. Selain praktik korupsi yang meningkat, juga terlihat beberapa hal yang mencengangkan dalam hal politisasi agama seperti pemanfaatan mimbar-mimbar agama untuk kepentingan politik, peristiwa pengkafiran teradap lawan politik serta menjual ayat untuk kepentingan politik seperti peristiwa pemilu 2019 atau Pilkada DKI Jakarta 2017 yang menyebabkan perpecahan di tengah kehidupan masyarakat.

Hal di atas menunjukkan bahwa ide sekularisasi juga berkenaan dengan politisasi agama; hemat penulis, demikian tersebut dalam negara dengan relasi tamyiz seperti Indonesia merupakan sikap yang tidak elok, karena agama yang

[8]M. Nur Ilham dkk, "Telaah Pemikiran Nurcholish Majid Terhadap Politik Identitas", *Tasamuh* 2024, Vol 16, No 2, h 272.

mengandung nilai transenden dan dijunjung tinggi di Indonesia melalui sila pertama Pancasila diperalat untuk meraih kekuasaan. Sementara menurut Nurcholish keberadaan negara merupakan Instrumen untuk meningkatkan umat; di mana negara adalah penting sebagai wadah menampung umat untuk dapat terselenggaranya kehidupan beragama[9], bukan untuk disalah gunakan demi kepentingan politik

Oleh sebab itu, dewasa ini merekonstruksi ide sekularisasi Nurcholish Majid menjadi penting dan diharapkan menjadi nilai tambah pemahaman masyarakat bernegara untuk terhindar dari praktik feodalisme politik dalam artian ikut-ikutan membesarkan suatu kelompok tanpa dasar pemikiran yang kuat serta untuk membangun sikap profesionalitas dalam negara yang berelasi tamyiz.

B. Respon terhadap Ide Sekularisasi Nurcholish Majid

Terdapat beberapa respon teradap pemikiran sekularisasi Nurcholish Majid seperti menerima, mengkritik dan menolak dengan tudingan yang cukup tajam. Oleh sebab itu sebagai landasan teoritis dalam penelitian ini, ada baiknya menurut penulis terlebih dahulu melihat bagaimana problematika pro kontra yang dihadirkan termasuk intepretasi ide sekularisasi tersebut. Ahmad Zamakhsari menyatakan bahwa problematika pro kontra teori dapat menjadi landasan teoritis keilmuan dalam melakukan rekonstruksi[10].

Nurcholish menyatakan bahwa konsep sekularisasi bertujuan untuk memantapkan tugas manusia di muka bumi sebagai *khalifah*; di mana manusia mempunyai kebebasan dan rasio untuk berikhtiar memperbaiki kehidupan dunia. Secara konkret sekularisasi ditujukan untuk melawan segala kesyirikan, sehingga tidak heran konsep ini dalam kacamata teologi dianggap sebagai respon terhadap paham

---

[9]Yusafrida Rasyidin, "Menjelajahi Pemikiran Politik Nurcholish Majid Tentang Agama dan Negara", *Jurnal Tapis*, Vol 16, no. 1, 2020, h 41.

[10]Ahmad Zamakhsari, "Rekonstruksi Pemikiran Mulla Sadra Dalam Integrasi Keilmuan: Membangun Pendidikan Integratif Non Dikatomik", 2014, *Tesis* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, h 23.

fundamentalisme[11], serta sekularisasi disebut sebagai konsep teologi pembebasan dalam upaya Nurcholish mewujudkan *Nation State* dalam Pemikiran politik Islam[12].

Lebih jauh, sebagai batasan orisinalitas ide yang dijaga dalam penelitian ini, yaitu seperti yang diungkapkan oleh Nurcholish bahwa sekularisasi bukan maksud kepada sekularisme, melainkan pembebasan dari sekularisme atas umat yang terjebak dalam mengislamkan atau mengakhiratkan segala hal termasuk yang bersifat duniawi sekali pun pada tempat yang tidak sebenarnya atau dalam bahasa Nurcholish mentransendenkan segala yang temporal[13]. Terlepas dari itu, terdapat beberapa respon terhadap ide sekularisasi Nurcholish tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Menerima

   Setelah dijelaskan dan dijernihkan bagaimana konsep sekularisasi yang diusung oleh Nurcolish perlahan konsep yang dikira awalnya sebagai langkah menuju sekularisme seperti di dunia Barat akhirnya perlahan diterima, hal tersebut dibuktikan dengan mulai banyaknya pengkajian teradap pemikiran Nurcholish seperti mengintepretasi ide sekularisasi Nurcolish. Sebagai respon penerimaan ide sekularisasi tersebut, dalam penelitian ini penulis menampilkan beberapa intepretasi teradap ide sekularisasi Nurcholish Majid:

   a. Pembebasan

      Ide sekularisasi sebagai makna pembebasan merupakan intepretasi yang paling banyak diterima, karena dianggap paling mendekati substansi ide sekularisasi Nurcholish, seperti misalnya konsep teologi pembebasan dengan pendekatan teologi atas penyimpangan tauhid; di mana ide

---

[11]Nasitotul Jannah, "Nurcholish Majid dan Pemikirannya (di antara Kontibusi dan Kontroversi)", *CAKRAWALA: Jurnal Studi Islam,* Vol. XII, No. 1, 2017, h 46.

[12]Lihat: Budhy Munawar Rachman, *Pemikiran Islam Nurcholish Majid*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati dan Lembaga Studi Agama dan Filsafst (LSAF), 2022), h 43-48.

[13]Nurcholish Majid, *Islam Kemodernan dan KeIndonesiaan,* (Bandung, Mizan: 1987), h 280.

sekularisasi tersebut dalam kacamata teologi berupaya mendobrak paham fundamentalisme yang dianggap kaku dengan pola tekstualnya[14].

Selain sebagai teologi pembebasan, ide sekularisasi juga dipahami sebagai pembebasan secara umum dari segala irasional tepatnya pada masa itu berkenaan dengan kemandekan berpikir yang tengah dialami masyarakat. Esensi dari pembebasan bertujuan agar pemahaman terhadap agama dapat menghadirkan velue positif dan menjadi nilai sosial yang tinggi antar umat sebagai dialog antar iman[15].

Tidak sampai di situ, intepretasi dengan makna pembebasan juga dimaksudkan kepada representasi agama yang tidak kaku, hal tersebut dinilai sejalan dengan pandangan Nurcholish bahwa agama tidak saja dapat menghasilkan tatanan sosial tapi juga dapat membentuk tatanan negara. lebih lanjut ide sekularisasi sebagai makna pembebasan juga berarti memberi hak batasan antara hal yang privat dengan publik guna tidak merusak eksistensi negara plural seperti Indonesia[16].

b. Pembeda

Intepretasi dengan makna pembeda merupakan respon positif terhadap gagasan sekularisasi Nurcholish; di mana makna pembeda bukan maksud untuk menunjukkan perbedaan agama dan negara seperti paham sekularisme melainkan sekularisasi diterima untuk membedakan ’ruang’ antara agama dan negara, khususnya negara majemuk seperti Indonesia guna menghindari gesekan dan konflik sosial. Zulfikar menyebutkan sekularisasi sebagai pembeda sejalan

---

[14]Nasitotul Jannah, “Nurcholish Majid dan Pemikirannya (di antara Kontibusi dan Kontroversi)”, *CAKRAWALA: Jurnal Studi Islam,* Vol. XII, No. 1, 2017, h 46.

[15]Abdullah, Budhy Munawar dkk, *Pemikiran Islam Nurcholish Majid*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati dan Lembaga Studi Agama dan Filsafst (LSAF), 2022), h 46-47.

[16]Muhammad Latief, “Islam dan Sekularisasi Politik di Indonesia”, *Tsaqafah,* vol. 13, No. 1, 2017, h 9.

dengan pemikiran Nurcholish yang berpandangan bahwa perbedaan antara agama dan negara selaras dengan menghilangkan penyucian terhadap selain Tuhan[17].

Makna pembeda sebagai intepretasi ide sekularisasi menunjukkan perbedaan ruang antara agama dan negara. Demikian karena negara yang dunia dipandang sebagai hal yang temporal atas pertimbangan rasio, berbeda dengan agama yang spiritual. Fahri Ali dan Bahtiar Efendi melalui Budy Prayetno menyebutkan bahwasanya konsep sekularisasi Nurcholish Majid dapat diterima sebagai suatu lembaga sistem oleh umat Islam khususnya Indonesia untuk membedakan antara agama dan Negara, bukan untuk memisahkan agama dan Negara seperti paham sekularisme[18].

c. Penengah atau Saling Mengisi

Selain sebagai teologi pembebasan dan pembeda ruang agama dan negara, Ide sekularisasi Nurcholish juga diintepretasi oleh Abdullah sebagai penengah atau saling mengisi antara agama dan negara. Demikian itu mengacu kepada persoalan filsafat politik terkait relasi agama dan negara; di mana sekularisme hadir sebagai respon politis terhadap agama dalam suatu negara yang memonopoli penetapan nasional terhadap agama lain. Sehingga konsep sekularisasi Nurcholish sebagaimana disebut oleh Abdullah dapat menjadi penengah dan saling mengisi antara kedua kutub sebagai jalan keluar dari gejolak isu agama dan negara, sekaligus mewujudkan nasional yang kuat dalam beragam agama, suku, ras dan lainnya; sehingga sekularisasi dapat menjadi jalan tengah untuk mewujudkan *Nation State*[19].

---

[17]Zulfikar, "Sekularisasi Politik Menurut Nurcholish Majid dan Relevansinya Terhadap Perkembangan Sistem Politik di Indonesia", Tesis UIN Ar-Raniry Aceh, 2022, h 95.

[18]Budy Prayetno, "Konsep Sekularisasi Dalam PemikiranNurcholish Majid", *Sulesena*, Vol. 11, No. 2, 2017, h 122.

[19]Lihat: Abdullah, Budhy Munawar dkk, *Pemikiran Islam Nurcholish Majid*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati dan Lembaga Studi Agama dan Filsafst (LSAF), 2022).

Penerimaan konsep sekularisasi sebagai penengah dan saling mengisi dinilai oleh Abdullah sebagai representasi Nurcholish terhadap Piagam Madina dalam membangun peradaban yang tidak saling intimidasi oleh pihak yang dominan dalam suatu negara. Abdullah dalam interpretasinya pada ide sekularisasi sebagai penengah atau saling mengisi menyebutkan sekularisasi merupakan suatu upaya untuk menciptakan *Nation State,* karena ide sekularisasi dapat saling mengisi dan melengkapi antara agama dan negara[20].

2. Menolak

Beberapa poin di atas memperlihatkan bagaimana konstruksi ide sekularisasi yang berkembang berupa intepretasi sebagai penerimaan secara umum ide sekularisasi Nurcholish. kendati didapati jernihnya ide tersebut, namun bukan berarti ide sekularisasi tersebut tidak mengalami kekurangan atau tidak mendapat kritikan dari pihak lainnya.

Nurcholish sendiri menyadari bahwa ide sekularisasi tersebut banyak dipahami sebagai langkah menuju sekularisme, sehingga pada perkembangannya Nurcholish mencoba melakukan peralihan diksi dari 'sekularisasi' menjadi 'desakralisasi' sebagai upaya menjernihkan pemahaman umum kepada ide sekularisasi tersebut, yakni bermaksud untuk hanya mensakralkan Tuhan semata. Hal demikian memberitahu bahwa pada kenyataannya ide sekularisasi Nurcholish tersebut mengalami persoalan seperti kesalahpahaman dalam penerimaannya, maka dapat dikatakan di sini bahwa, kendati telah dijernihkan dan banyak intepretasi terhadapnya, tetap terdapat problema yang dihadirkan oleh ide sekularisasi Nurcholish Majid.

Lebih lanjut bagaimana persoalan yang ditimbulkan, dalam suatu kondisi Nurcholish mengakui akan adanya problema, bahwasanya ide sekularisasi bagaimanapun tidak akan lepas dari

[20]Abdullah, Budhy Munawar dkk, *Pemikiran Islam Nurcholish Majid*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati dan Lembaga Studi Agama dan Filsafst (LSAF), 2022), h 45-47.

kontroversi. Sebagai contoh disebutkan oleh Nurcholish banyaknya penolakan tokoh seperti Prof. Rasyidi yang bereaksi keras dengan tudingan Nurcholish seperti agen Barat yang menaruh curiga kepada Islam[21]. Penolakan tersebut karena konsep yang berasal dari Barat ini pada masa *Elightement* Eropa, kenyataannya telah melahirkan Filsafat Sekularisme yang anti terhadap agama, sehingga sekularisasi pada dasarnya merupakan diksi yang menunjukkan proses menuju sekularisme. Oleh sebab itu Nurcholish menilai benar akan kritikan Prof. Rasyidi padanya, terlebih Nurcholish juga mengakui tidak diketahui secara mendetail kapan proses sekularisasi secara sosiologis itu terjadi[22].

3. Mengkritik

Selain kalangan tua yang diwakili oleh Prof. Rasyidi sebagai bentuk penolakan ide sekularisasi Nurcholish, juga terdapat kritikan terhadap ide sekularisasi Nurcolish yang berasal dari kalangan muda, misalnya Endang Syaifuddin Anshari, Ismail Hasan dan Abdul Qadir Djailani. M. Syafi Anwar melalui Budi Prayetno menyebutkan penolakkan dari kalangan muda seperti Abdul Qadir Djailani menyatakan bahwa "Nurcholish hendak menganjurkan paham sekuler yang bertentangan dengan Islam, padahal Islam menurutnya tidak sejalan dengan sekularisme tersebut". Adapun Endang Syaifuddin Anshari berpendapat bahwa memang benar Al Quran tidak menjelaskan konsep negara Islam, namun mengingkari Al Qur'an dengan memberi kaidah tentang negara merupakan suatu distorsi besar. Endang dalam menanggapi Nurcholish lebih bersikap bagaimana seolah

[21]Lihat: M. Syafi Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendikiawan Muslim Orde Baru,* (Jakarta: Paramadina, 1995).

[22]NurcholishMajid, *Karya Lengkap Nurcholis Majid:Islam Kemodernan dan KeIndonesiaan,* (Jakarta Selatan, Nurcholish Majid Society: 2020), h 342.

Nurcholish ingin memperlihatkan kepada publik akan usaha umat Islam menuju kekuasaan seperti sebuah dosa besar[23].

Terlepas dari hal di atas dapat dipahami bahwa ide sekularisasi Nurcholish merupakan upaya moderasi yang menekankan berbeda dengan paham sekularisme, yaitu desakralisasi terhadap selain Tuhan. Lain sisi diakui bahwa ide tersebut mengalami pro kontra, sebagian pihak menerima ide tersebut dan sebagian lainnya tidak. Oleh sebab itu merekonstruksi pemikiran sekularisasi Nurcholish selain sebagai upaya menjaga orisinalitas ide dalam perjalanan waktu, juga wacana yang ditujukan untuk menjembatani problema pro kontra ide tersebut sehingga orisinalitasnya terjaga dan diterima pihak mana pun baik pro maupun kontra.

C. Wacana Rekonstruksi Ide Sekularisasi Nurcholish Majid

Tentu kita sepakat dan memahami bahwa ide sekularisasi Nurcholish mempunyai maksud yang baik, yaitu bukan tujuan kepada ideologi sekularisme. Kendati demikian bukan berarti ide tersebut tanpa kekurangan dan kritikan, hal tersebut dibuktikan dengan adanya problematika yang ditimbulkan seperti pro kontra pemahaman, oleh karena itu dalam upaya menjaga orisinalitas ide sekularisasi yang berbeda dengan paham sekularisme tersebut perlu dilakukan rekonstruksi dengan menghadirkan wacana baru guna mengatasi pro ide sekularisasi Nurcholish sekaligus menjadi relevansi zaman.

Seperti diketahui, tujuan dari rekonstruksi adalah untuk mengembalikan dan menghidupkan sesuatu kepada semulanya berdasarkan bahan-bahan yang ada[24]; di mana hal tersebut merupakan upaya untuk menjaga orisinalitas ide dalam perjalanan waktu dengan menghadirkan wacana baru sebagai tawaran rekonstruksi. Oleh sebab itu dalam merekonstruksi pemikiran

---

[23]Budi Prayetno, "Konsep Sekularisasi dalam Pemikiran Nurcholish Majid", *Sulesena,* vol. 11, No. 2, 2017, h 7-8.

[24]B. N. Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h 469.

sekularisasi Nurcholish ini penulis menghadirkan beberapa wacana dengan tetap menggarisi perbedaan ide sekularisasi Nurcholish dengan paham sekularisme.

Adapun beberapa wacana dalam rekonstruksi ide sekularisasi Nurcholish Majid, yaitu sebagaimana di bawah ini:

1. Sekularisasi Sebagai Dualisme

Merekonstruksi pemikiran sekularisasi Nurcholish Majid merupakan upaya yang tidak terlepas dari fenomena dewasa ini terkait dengan relasi agama dan negara; di mana masih banyak warga negara yang belum memahami bagaimana sebaiknya bersikap dalam negara dengan relasi tamyiz seperti Indonesia.

Terlepas dari itu, diketahui bahwa Ide sekularisasi Nurcholish sejalan dengan Harvey Cox dan Robert N. Bellah; Nurcholish merujuk kepada Harvey yang berpandangan bahwa sekularisasi bukan mengasingkan agama ke ruang privat apalagi meniadakan agama dengan membunuh Tuhan seperti paham sekularisme, tapi sekularisasi adalah pemisahan kehidupan negara dan agama supaya tidak saling berbenturan. Sementara Nurcholish sepaham dengan Robert N. Bellah yang menyatakan sekularisasi merupakan gerak sosial masyarakat yang berkesinambungan, bukan upaya untuk memperkuat filsafat dalam ideologi sekularisme.

Dengan mengikuti dua tokoh tersebut, dipahami bahwa konsep sekularisasi Nurcholish tidak sama dengan paham sekularisme, namun secara relasi agama dan negara Nurcholish merupakan tokoh yang menganut relasi tamyiz agama dan negara. Tamyiz merupakan relasi yang tidak sekuler sekaligus tidak teokrasi, melainkan pandangan moderat yang berupaya mengintegrasikan atau mengombinasikan antara kedua ideologi sebelumnya. Kendati demikian, hal yang patut dipahami dalam relasi tamyiz agama dan negara ialah terdapatnya nilai atau unsur sekuler dan teokrasi di dalamnya, sehingga tidak heran dalam praktiknya Indonesia sering disebut sebagai negara sekuler meski sila pertama Pancasila berbunyi “ketuhanan yang mana Esa”.

Berdasarkan relasi tamyiz agama dan negara yang terdiri dari unsur sekuler dan teokrasi tersebut, maka ide sekurisasi dapat disinyalir sebagai konsep yang dualisme, yaitu tidak teokrasi dan sekuler melainkan kombinasi antara keduanya sehingga ide sekularisasi merupakan dualisme. Klaim dualisme ini dapat dikonfirmasi melalui pandangan Nurcolish dalam relasi agama dan negara; di mana Nurcolish tidak setuju dengan teokrasi namun ide sekularisasi bukan maksud kepada sekularisme.

Dengan demikian, dasar wacana rekonstruksi "sekularisasi sebagai dualisme" ini adalah berdasarkan relasi tamyiz agama dan negara yang dianut oleh Nurcholish, yaitu tidak hanya dibangun dari unsur sekuler tapi juga terdapat nilai teokrasi di dalamnya. Hal tersebut memberitahu bahwa dalam relasi tamyiz perspektif Nurcholish, ide sekularisasi menyimpan ruang ganda di dalamnya yaitu agama dan dunia atau teokrasi dan sekuler sehingga dalam dualisme ide sekularisasi tersebut terdapat sisi sekuler dan teokrasi.

Dalam pada itu wacana sekularisasi sebagai dualisme ini secara pragmatis penulis maksudkan untuk menjembatani pro kontra posisi Nurcholish akan ide sekularisasi dalam relasi agama dan negara, yakni antara seorang sekularis atau teokratis; di mana dengan wacana 'sekularisasi sebagai dualisme' dapat menjadi solusi akan pro kontra tersebut dengan tidak menyatakan Nurcholish sebagai seorang sekularis dan teokratis tulen, melainkan alih wahana sesuai dengan relasi tamyiz agama dan negara yang dianut oleh Nurcholish.

Terlepas dari hal di atas, sisi sekuler yang penulis maksud dalam ide sekularisasi sebagai dualisme yaitu bahwasanya Nurcholish tidak menganut prinsip teokrasi dalam hubungan agama dan negara, atau dengan kata lain Nurcholish menolak gagasan negara agama, demikian itu dapat dilihat pada surat

politik Nurcholish dengan M. Roem dalam menanggapi wawancara Amin Rais terkait hubungan agama dan negara[25].

Sisi sekuler Nurcholish dalam dualisme ide sekularisasi lebih jauh penulis tinjau dari dua aspek pemikiran Nurcholish yaitu pada surat politik dan jargon politik Nurcholish. Kedua aspek tersebut dapat menunjukkan bagaimana Nurcholish memiliki sisi sekuler dalam relasi tamyiz agama dan negara. Adapun tinjauan pada dua aspek tersebut yakni sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat politik

   Poin ini penulis mulai dengan klaim bahwa "tidak teokrasi menunjukkan sisi sekuler", maka tidak teokrasinya Nurcholish menunjukkan sisi sekulernya Nurcholish. Sisi sekuler Nurcholish tersebut terlihat pada pemikiran yang menyatakan bahwa pendirian negara Islam sebagai sikap apologetik semata. Selain pemikiran tersebut, sisi sekuler Nurcholish pada poin ini dilihat pada surat politik antara Nurcholish dengan M. Roem yang akhirnya dibukukan dengan judul *Tidak Ada Negara Islam*[26].

   Hemat penulis, sepihak dari judul buku tersebut telah memberitahu bahwa Nurcholish bukanlah seorang teokratis, sehingga memiliki sisi sekuler. Mengutip dari Yusafrida, bahwasanya Nurcholish sejalan dengan M. Roem yang menyatakan tidak ada negara Islam, hal tersebut karena negara Islam itu tidak ada dalam sunah. Nurcholish menyatakan bahwa tidak ada perintah untuk mendirikan negara Islam baik dari Al-Qur'an maupun sunah[27].

---

[25]Lihat: Nurcholish Majid, *Surat-surat Politik Nurcholish Majid-Muhammad Roem: Tidak Ada Negara Islam,* (Jakarta, Djambatan Klasik, 2004).

[26]Lihat: Nurcholish Majid, *Surat-surat Politik Nurcholish Majid-Muhammad Roem: Tidak Ada Negara Islam,* (Jakarta, Djambatan Klasik, 2004).

[27]Yusafrida Rasyidin, "Menjelajahi Pemikiran Politik Nurcholish Majid Tentang Agama dan Negara", *Jurnal Tapis*, Vol 16, no. 1, 2020, h 42.

Lebih lanjut dalam surat politik tersebut Nurcholish merekapitulasi pandangan Fathi Osman terkait negara Islam, yaitu meskipun Islam diharapkan dapat mengilhami ideologi politik muslim, tapi Islam tidak bisa disebut sebagai ideologi atau teori; serta Nurcholish tidak sungkan menyatakan dalam politik tidak ada salahnya belajar kepada non muslim sekali pun, yang penting tidak bertentangan dengan nilai Islam[28].

Senada dengan di atas pada laman berikutnya Nurcholish menyatakan negara Islam yang formil itu tidak pernah digunakan, baik oleh nabi sendiri maupun penerus setelahnya kecuali muncul sebagai gejala zaman Modern. Adapun terkait Piagam Madinah, disebut Nurcholish sebagai kesepakatan antara muslim dan non muslim yang menunjukkan bahwa dalam Islam umat tidak dilarang oleh nabi untuk bekerja sama dengan golongan lain dalam konteks sosial-masyarakat yang dapat dipahami sebagai hidup bernegara. Sehingga tatanan negara disebut Nurcholish bisa beragam bentuknya, asalkan tatanan tersebut tidak menghalangi agama Islam[29].

2. Berdasarkan jargon politik

Jargon politik Nurcholish merupakan slogan yang tidak asing lagi di telinga, sebuah slogan pendek yang mampu menjadi *shock therapy* kala itu. Melihat jargon tersebut, merupakan pola yang banyak digunakan pada Indonesia tempo dulu. M. Monib dan I. Bahrowi menyatakan Nurcholish hidup di dua era atau bahkan tiga era yang berbeda, salah satunya yaitu orde lama. Pada saat orde lama berkuasa semangat merdeka sangat kental, pola yang terbangun kala itu adalah semangat retorika dengan jargon-

[28]Nurcholish Majid, *Surat-surat Politik Nurcholish Majid-Muhammad Roem: Tidak Ada Negara Islam,* (Jakarta, Djambatan Klasik, 2004), cet 3, h 17-27.

[29]Nurcholish Majid, *Surat-surat Politik Nurcholish Majid-Muhammad Roem: Tidak Ada Negara Islam,* (Jakarta, Djambatan Klasik, 2004), cet 3, h 29-30.

jargon kemerdekaan[30], sehingga pada gilirannya Nurcholish mengeluarkan jargon tersebut.

Selain pemikiran tidak ada negara Islam dalam surat politik, jargon yang mengatakan tidak kepada Partai Islam sebagai instrumen resmi negara juga dapat disinyalir sebagai sikap yang menunjukkan sisi sekuler Nurcholish. Jargon "Islam yes, Partai Islam no" menunjukkan sikap tidak setuju dengan upaya penggarapan syariat melalui partai politik. hal ini sejajar dengan tidak setujunya Nurcholish dengan teokrasi pada pendirian negara Islam oleh partai Islam.

Tidak setuju Nurcholish dengan partai Islam bukan faktor subjektif atau apologis semata, melainkan atas ketidaksanggupan bahkan melencengnya partai dari upaya menyebarkan nilai Islam[31]. Seperti adanya terlibat dalam kasus korupsi, contoh lainnya disebutkan Nurcholish misalnya argumen yang menyatakan "kalau tidak mencoblos Partai Islam dalam pemilu, maka kita bukan Islam"[32].

Dua poin di atas (surat politik dan jargon politik) merupakan poin yang menunjukkan Nurcholish memiliki sisi sekuler akan ide sekularisasi dalam wacana dualisme; di mana surat politik memperlihatkan sisi sekuler Nurcholish atas tidak teokrasi dalam relasi agama dan negara, sedangkan jargon politik memperlihatkan sisi sekuler Nurcholish dengan tidak setuju akan legalitas agama melalui organisasi partai politik. Dengan demikian, wacana rekonstruksi ini didirikan berdasarkan analisis wacana pemikiran Nurcholish untuk dibangun kembali, karena menurut penulis ide sekularisasi masih relevan pada saat sekarang, khususnya dalam membangun sikap profesionalitas

---

[30]M. Monib I. Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Majid,* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h 18.

[31]Lihat: Ngainum Naim, "Islam dan Pancasila: Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Majid", *Episteme*, Vol 10, No. 2, 2015.

[32]M. Taufiq Rahman dan Asep Saeful M, "Konsep Politik Islam Kultural Perspektif Nurcholish Majid", *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya,* vol 3, No. 2, 2018, h 389.

oleh warga negara yang berelasi Tamyiz seperti Indonesia yang majemuk.

Selain sisi sekuler, dalam dualisme ide sekularisasi juga terdapat sisi teokrasi di dalamnya. Sisi teokrasi yang penulis maksud dalam ide sekularisasi yaitu Nurcholish tidak menganaktirikan agama dalam bernegara; di mana Nurcholish tidak setuju dengan praktik politisasi agama atau agama dijadikan alat politik dalam berebut kekuasaan. Oleh sebab itu, kendati sebelumnya disebutkan Nurcholish memiliki sisi sekuler akan ide sekularisasi, namun catatan yang patut digaris bawahi adalah meskipun ide sekularisasi menunjukkan sisi sekuler, namun tidak menyatakan Nurcholish sebagai seorang sekularis atau sekuler tulen.

Mengingat demikian, maka persoalan yang ingin dibahas pada bagian ini adalah bagaimana sisi teokrasi Nurcholish atau ruang agama dalam pemikiran sekularisasi Nurcholish. Dalam menjawab pertanyaan tersebut penulis mulai dengan menunjukkan pandangan Nurcholish tentang keutamaan negara atau bangsa dinilai dari seberapa bermoralnya negara tersebut atau dengan kata lain seberapa mampu negara dalam menerapkan nilai agama.

Dinyatakan dalam karya *Indonesia Kita*, Nurcholish menyebutkan spirit dan moral beragama yang benar dapat membesarkan suatu bangsa yang baru lahir. Nurcholish melihat kondisi Nusantara menjadi porak poranda akibat kedatangan Imperialisme Portugis dan Spanyol yang menguasai Malaka, demikian karena lemahnya semangat dan moral beragama. Lebih jauh Nurcholish menyatakan, kenyataan tersebut disebabkan karena kongkalikong antara pendatang dengan tokoh terkemuka seperti Ulama dan Sultan, sehingga tidak heran menurut Nurcholish di negara kita banyak yang menjadi pahlawan adalah ulama dan sultan[33].

[33]"Permulaan Imperialis Eropa dan Perjuangan Melawan Kaum Imperialis", lihat: Nurcholish Majid, *Karya Lengkap Nurcholis Majid:Indonesia Kita,* (Jakarta Selatan, Nurcholish Majid Society: 2020)

Fenomena tersebut memberitahu bahwa akan ketidak-benaran moral suatu negara menjadikan bangsa tersebut dapat dikuasai oleh pendatang. Hal ini memberitahu akan pentingnya keberadaan agama dalam negara sebagai terapan nilai moralitas, sehingga negara dapat menjadi komponen aktif yang terus berkembang dan maju jika mengambil nilai agama. Penulis memahami bahwa agama dapat menjadi identitas nasional sekaligus daya tahan berupa filterisasi dari budaya luar yang masuk. Penerapan tersebut dapat menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kultur bangsa yang bermartabat di mata dunia.

Memahami agama sebagai terapan moral bernegara tersebut dalam konteks Indonesia bagi Nurcholish antara agama dan Pancasila tidak bertentangan, semisal "musyawarah", implementasi tersebut secara langsung merupakan nilai etika Islam. Sehingga sebagai muslim khususnya Indonesia etika Islam dapat terwujud dengan penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara. M. Taufiq Rahman mencatat bahwa bagi Nurcholish negara tidak harus dilabeli Islam, dengan penerapan agama yang benar secara langsung telah menunjukkan pengakuan masyarakat negara terhadap agama (Islam), sehingga demikian itu dapat menunjukkan masyarakat Indonesia sebagai *civil religion*[34].

Melihat lebih jauh moralitas agama sebagai nilai bangsa tersebut, menarik bahwa pada satu titik akan menunjukkan fenomena negara agama. Hal ini disinggung oleh Nurcholish dalam surat politiknya "*Tidak Ada Negara Islam",* tentang bagaimana kenyataan Amerika Serikat dengan basis sekuler diakui sebagai negara Kristen Protestan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Amerika berdiri di atas etika WASP (*White Anglo-Saxon Protestan)*[35].

---

[34]M. Taufiq Rahman dan Asep S. Mimbar, "Konsep Politik Islam Kultural Perspektif Nurcholish Majid", *Fikri: Jurnal kajian Agama, Sosial dan Budaya*, vol 3, No. 2, 2018, h 392.

[35]WASP merupakan etika Kristen Protestan yang banyak diadopsi oleh masyarakat Amerika yang banyak berperan dalam bidang sosial, politik dan ekonomi. Sehingga dalam penggunaan mayoritas etika tertentu menunjukkan agama sebagai identitas negara penganut. (Lihat: Nurcholish

Hal di atas bisa saja terwujud di negara lainnya, yaitu dengan menganut moral agama akan menunjukkan fenomena negara agama. Demikian dinilai sejalan dengan Islam oleh Nurcholish, bahwasanya Islam merupakan agama kebaikan untuk manusia karena Islam *Rahmatan li al-'alamin*[36]. Keberadaan agama dalam lingkupan negara dapat menjadikan suatu negeri yang aman, seperti ungkapan seorang penyair bahwa "amin terbuat dari iman yang menjadikan rasa aman"[37]. Kutipan tersebut memberitahu bahwa negara dapat berjalan dengan baik jika berpakaian agama, nilai-nilai agama diterapkan dalam kehidupan bernegara dapat menjauhkan diri dari nilai amoral bernegara seperti yang tampak sekarang ini.

Sejatinya dengan keterbukaan Nurcholish dalam menjawab persoalan bagaimana agama dapat menjadi nilai moral dalam bernegara menawarkan pemikiran politik berdasarkan hati nurani, yaitu suatu pandangan lurus dan setia berdasarkan keluhuran hati. M. Jawahir menyebut dengan hati nurani Nurcholish menekankan sikap bijak dalam menentukan pilihan dengan meninggalkan segala hal yang merugikan, terlebih hal tersebut merupakan taruhan terhadap kehidupan bernegara atau kepentingan masyarakat umum, sehingga pertimbangan yang baik adalah berdasarkan hati nurani masing-masing[38].

Berpolitik berdasarkan hati nurani dianggap sebagai solusi bijak dikarenakan menurut Nurcholish manusia pada dasarnya mempunyai sifat yang mulia, dengan sifat tersebutlah manusia dapat bertindak. Demikian dalam hal politik dapat dipahami bahwa dengan hati nurani seorang manusia dalam etika politiknya akan terbuka menerima kebenaran, hemat penulis

---

Majid, *Surat-surat Politik Nurcholish Majid-Muhammad Roem: Tidak Ada Negara Islam,* (Jakarta, Djambatan Klasik, 2004), cet 3, h 34.

[36]M. Taufiq Rahman dan Asep S. Mimbar, "Konsep Politik Islam Kultural Perspektif Nurcholish Majid", *Fikri: Jurnal kajian Agama, Sosial dan Budaya*, vol 3, No. 2, 2018, h 389-390.

[37]Kutipan puisi *Kamus Kecil* karya Joko Pinurbo

[38]M. Jawahir, "Analisis Pemikiran Nurcholis Majid Tentang Politik Islam", *Skripsi* UIN Walisongo Semarang 2016.

meskipun Nurcholish tidak menyatakan hati nurani dalam hal ini adalah agama tapi secara tersirat dapat dipahami bahwa dengan politik hati nurani Nurcholish menunjukkan etika politik merupakan nilai agama, karena seperti disebutkan Goemawan Muhammad bahwasanya Nurcholish menyatakan kita tidak boleh hanya *hablum minallah* saja, harus sampai pada *halum minannas*. Budhy M. Rachman dalam menanggapi pandangan Nurcholish menyatakan ada dua jenis fitrah manusia yaitu kitab suci sebagai petunjuk dan hati nurani manusia.[39] Sehingga dengan demikian, berpolitik dengan hati nurani tidak bertentangan dengan sunatullah atau dengan kata lain adalah upaya menerapkan agama sebagai nilai moral bernegara.

Alhasil, sebagai bentuk rekonstruksi wacana sekularisasi sebagai dualisme pada poin sisi teokrasi adalah bagaimana agama sebagai nilai moral dapat diadopsi oleh negara bukan untuk mendominasi satu sama lain sehingga terhindar dari justifikasi kebenaran antara keduanya. Senada dengan itu disampaikan oleh Abdullah, Budhy M. Rachman dkk, bahwasanya pemikiran Nurcholish tentang agama dan negara diharapkan dapat terhindar dari justifikasi dominan antara agama dan negara dalam kehidupan masyarakat[40].

Maka dengan melihat sisi sekuler dan teokrasi Nurcholish dalam relasi tamyiz agama dan negara bukan manakah wilayah dominan antara keduanya dalam ide sekularisasi, tapi saling beririsan dengan menekankan bagaimana keterhubungan keduanya pada konteks yang tidak terpisah dan tidak identik, sehingga dapat disebut dengan dualisme; di mana agama dapat menjadi nilai moral suatu negara atau dengan bahasa lain agama merupakan nilai yang dapat melingkupi negara.

2. Sekularisasi sebagai Post-sekularisme

---

[39]Bahrur Rosi, "Kalimah Sawa' Sebagai Konsep Teologi Inklusif Nurcolish Majid", *Skripsi,* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2017.

[40]Lihat: Abdullah, Budhy Munawar dkk, *Pemikiran Islam Nurcholish Majid*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati dan Lembaga Studi Agama dan Filsafst (LSAF), 2022).

Sekularisasi sebagai post sekularisme merupakan wacana yang dibangun atas kesamaan capaian, yaitu keduanya sama-sama menginginkan keberadaan agama dalam negara. Kendati berbeda antara ide sekularisasi Nurcholish dengan paham sekularisme, namun tidak tertutup kemungkinan ide sekularisasi tersebut sejalan dengan post-sekularisme, karena post-sekularisme merupakan paham lanjutan dari sekularisme yang menginginkan keberadaan agama kembali hadir dalam negara. Post-sekularisme merupakan antitesis dari sekularisme, yaitu paham yang menghendaki kiprah agama di dalam kehidupan sosial politik. Pemikiran post-sekularisme dapat dipahami sebagai kritik terhadap sekularisasi di Barat yang mengalami kegagalan dalam upaya menuju modern dengan mengasingkan agama ke ruang privat.

Melihat demikian, maka dalam lanjutan rekonstruksi ide sekularisasi Nurcholish sebagai pengembangan gagasan, kali ini penulis mengemukakan wacana "sekularisasi sebagai post-sekularisme". Hal demikian dibangun dari persamaan capaian antara ide sekularisasi Nurcholish dengan post-sekularisme, yaitu sama-sama menghendaki adanya agama dalam bernegara. Dalam dari pada itu tujuan wacana rekonstruksi yang kedua ini adalah untuk membawa Nurcholish dalam dinamika pembaharuan tidak hanya sebagai pemikir yang modernis, neomodernis dan neotradisionalis seperti yang disebutkan pada bab dua, melainkan juga tergolong kepada pemikir post-sekularisme.

Wacana rekonstruksi yang kedua ini penulis mulai dengan menyoroti bagaimana sekularisasi dalam kacamata filsafat sekularisme; di mana sekularisasi merupakan proses penggantian agama dengan ilmu pengetahuan di ruang publik sebagai upaya menuju modern. Adapun kritik post-sekularisme terhadap sekularisasi tersebut dikarenakan pada kenyataannya proyek sekularisme melalui proses sekularisasi tersebut tidak mampu

menjadi jalan keluar manusia modern yang mengalami krisis moral[41].

Mengutip dari Otto G. Madung, menyebutkan post-sekularisme merupakan revisi sekaligus jawaban atas krisis masyarakat sekuler. Dalam tulisan Otto G. Madung tersebut menyatakan bahwa masyarakat sekuler bagaimana pun tetap harus memperhitungkan agama dalam kehidupan, hal ini disorot dari mandeknya proyek modernitas pada rel yang telah ditentukan dan mengalami pelencengan, sehingga peranan agama menjadi nilai yang mendesak untuk memberi makna yang etis dalam kehidupan manusia sekuler[42].

Hal demikian dikarenakan pandangan sekularisme yang berupaya menuju modern dengan mengasingkan agama dan nilai spiritual lainnya melalui sekularisasi dan digantikan dengan akal budi pengetahuan yang bersifat positivistik dianggap gagal oleh aliran post-sekularisme. Aliran post-sekularisme dengan pelopor filsuf J. Habermas menilai sekularisasi oleh sekularisme mengalami kegagalan karena masyarakat sekuler hadir dengan nilai individualistik. Kegagalan tersebut dinyatakan J. Habermas karena potensi agama lebih solidaritas sehingga sekularisme perlahan terhapuskan oleh kehadiran peran post-sekularisme yang menginginkan keberadaan agama dalam negara[43].

Memahami deskripsi tentang post-sekularisme di atas, sedikitnya telah menunjukkan kesejalanan antara post-sekularisme dengan ide sekularisasi Nurcholish dalam wacana rekonstruksi ini; di mana Ideologi sekularisme yang memisahkan antara agama dan negara menjadikan manusia semakin Industrial, non spiritual dan individual sehingga mengalami kekosongan rohani. Akan hal tersebut muncul aliran post-

[41]Lihat: Otto Gusti Madung, *Post-Sekularisme, Toleransi dan Demokrasi,* (Yogyakarta: Ladelero, 2017).

[42]Otto Gusti Madung, *Post-Sekularisme, Toleransi dan Demokrasi,* (Yogyakarta: Ladelero, 2017), h 36.

[43]Lihat: Hedi, "Agama Dalam Masyarakat Post Sekularisme Jurgen Habermas", *Penangkaran*, vol 3, No. 2, 2019.

sekularisme yang kembali ingin adanya keberadaan agama dalam negara seperti halnya ide sekularisasi Nurcholish, yaitu ruang yang tidak menghapus agama dalam bernegara.

Mencermati kesejalanan antara ide sekularisasi Nurcholish dengan post-sekularisme, sekurangnya dapat dikemukakan dua pendapat, yaitu: *pertama*, ide sekularisasi Nurcholish berbeda dengan sekularisasi dalam ideologi sekularisme, sehingga kritik post-sekularisme terhadap sekularisasi bukan terhadap model sekularisasi yang diupayakan oleh Nurcholish; sekularisasi oleh sekularisme menyebabkan kekosongan spiritual dalam kehidupan masyarakat modern, sedangkan ide sekularisasi Nurcholish berupaya mengisi nilai spiritualitas dalam masyarakat modern. *Kedua*, menunjukkan kesamaan capaian antara post-sekularisme dengan ide sekularisasi Nurcholis, yaitu sama-sama menginginkan keberadaan agama dalam bernegara.

Lebih jauh bagaimana ide sekularisasi Nurcholish menunjukkan sejalan dengan post-sekularisme dalam wacana ini, penulis pahami dengan menganalisis konsep politik Islam tentang pendekatan formalis dan substansialis. Kedua konsep tersebut yakni *pertama,* pendekatan formalis merupakan persoalan bagaimana membentuk masyarakat Islam berdasarkan hal formal seperti organisasi, instansi dan lainnya, *Kedua,* pendekatan substansialis merupakan persoalan bagaimana nilai Islam dapat diimplementasikan dalam kehidupan bernegara. Dari dua pendekatan tersebut Agus Riyadi menempatkan Nurcholish sebagai tokoh yang mengadopsi pendekatan Substansialis[44].

Menurut Nurcholish dalam menerapkan nilai syariat dalam bernegara baiknya adalah dengan cara dari dalam, yaitu dengan menunjukkan substansi Islam sebagai nilai yang dapat diadopsi dan diimplementasikan oleh negara. Berdasarkan pendekatan substansialis tersebut, terlepas dari politik legitimasi yang

[44]Agus Riyadi, "Islam yes, Partai Islam no: Analisa terhadap Pemikiran Nurcholish Majid Tentang Politik Islam", *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006, h vi.

ditudingkan kepada Nurcholish terhadap orde baru[45], konsep Nurcholish ini mampu menjadikan Islam sebagai akomodasi negara dengan bukti mulai munculnya aktivis muslim dalam birokrasi kabinet orde baru yang notabene bukan dari partai politik Islam[46].

Pemikiran politik Nurcholish yang mengedepankan nilai Substansi Islam dengan cara dari dalam tersebut tercermin dari anggapan penting kepada keberadaan institusi agama di dalam negara sebagai kontrol terhadap masyarakat. Disebut M. Taufiq Rahman bahwa Nurcholish setuju dan mengakui pentingnya lembaga agama dalam negara seperti Departemen Agama, Pengadilan Agama dan sebagainya[47].

Maka kendati memiliki sisi sekuler akan ide sekularisasi berdasarkan relasi tamyiz agama dan negara, menurut Nurcholish dengan cara dari dalam dapat diterapkan nilai syariat atau dengan kata lain dapat ditarik nilai-nilai teokrasi dalam bernegara, seperti misalnya keberadaan pengadilan agama; di mana negara hadir mengatasi persoalan agama masyarakat negara. Demikian disebut Nurcholish bahwa Indonesia yang modern jelas membutuhkan agama sebagai landasan nilai dan moral secara Universal guna kestabilan masyarakat[48].

---

[45]Menurut M. Yusuf dan J. Mawalidin dalam penelitiannya tidak ada hubungan sama sekali antara legalistis orde baru dengan Nurcholish Majid. Ide sekularisasi pada jargon politik Nurchlish merupakan genuinnya Nurcholish sendiri. Hal tersebut dibuktikan dengan bantahan Nurcholish terhadap Tesis M. Kamal Hasal dari Malaysia yang menyebutkan jargon tersebut hadir karena Nurcholish mengikuti Ali Moertopo. (lihat: Muhammad Yusuf dan Jum Mawalidin, "Pergeseran Pemikiran Nurcholish Tentang Partai Politik Islam di Indonesia, *POLITICA*, vol 9, No. 1, hal 78).

[46]Muhammad Yusuf dan Jum Mawalidin, "Pergeseran Pemikiran Nurcholish Tentang Partai Politik Islam di Indonesia, *POLITICA*, vol 9, No. 1, hal 78).

[47]M. Taufiq Rahman dan Asep S. Mimbar, "Konsep Politik Islam Kultural Perspektif Nurcholish Majid", *Fikri: Jurnal kajian Agama, Sosial dan Budaya*, vol 3, No. 2, 2018, h 390.

[48]Yusafrida Rasyidin, "Menjelajahi Pemikiran Politik Nurcholish Majid Tentang Agama dan Negara", *Jurnal Tapis*, Vol 16, no. 1, 2020, h 38.

Alhasil, pandangan Nurcholish melalui pendekatan substansialis di atas menunjukkan sejalan antara pemikiran Nurcholish dengan paham post-sekularisme sekaligus menunjukkan konstruksi baru posisi Nurcholish dalam dinamika arus pembaharuan, yaitu selain sebagai pemikir yang modernis, neomodernis dan neotradisionalis, terakhir dalam wacana rekonstruksi ini Nurcholish juga salah satu pemikir post-sekularisme, yaitu menghendaki peranan agama dalam kehidupan bernegara.

3. Sekularisasi Sebagai koeksistensi

Wacana ketiga ini merupakan rekonstruksi yang bertujuan untuk mengelaborasi lebih jauh bahasan yang dikaji. Diketahui bahwa dalam merekonstruksi selain sebagai upaya untuk menjaga orisinalitas ide, juga diharapkan hadirnya wacana baru sebagai bentuk pengembangan dan inovasi gagasan dalam memperkaya keilmuan. Kuntowijoyo melalui M. Zainul Badar menyatakan bahwasanya rekonstruksi sama halnya dengan menuliskan sejarah; di mana masa lalu ditulis ulang untuk dikontekstualisasikan dengan zaman sekarang dan keperluan masa depan[49].

Hendri Nadiran dalam menganalisis pemikiran rekonstruksi Hassan Hanafi menyatakan bahwa merekonstruksi berarti bertujuan untuk memberi makna baru pada konstruksi yang dikaji dan memberi nama baru kepada konstruksi tersebut[50]. sehingga pada wacana ini rekonstruktor namai sekularisasi dengan sebutan koeksistensi. Mengapa demikian? Karena Koeksistensi merupakan kondisi di mana suatu kelompok (negara) dengan beragam latar belakang masyarakat dapat hidup berdampingan dengan damai.

---

[49]Lihat: Muhammad Zainul Badar, "Pemikiran Sejarah Kuntowijoyo Dalam Kajian Filsafat Sejarah", 2020, *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

[50]Hendri Nadiran, "Pemikiran Kalam Hassan Hanafi: Rekonstruksi Epistemologi Keilmuan Kalam dan Tantangan Modernitas", *Intizar,* Vol 21, No. 2, 2015.

Wacana sekularisasi sebagai koeksistensi merupakan wacana yang penulis bangun berdasarkan persoalan politisasi agama dewasa ini, yang pada realitanya memperlihatkan kehidupan disharmoni kehidupan masyarakat, yaitu isu politik identitas. Andre dan Muslih menyatakan politik identitas sudah menjadi bagian dalam politik di Indonesia; di mana banyak terlihat kampanye dengan mengungkap identitas seperti agama dan suku saat pemilu[51].

Politik identitas sejatinya bukan suatu larangan dalam negara demokrasi seperti Indonesia, namun poin yang menjadi hambatan dalam praktiknya adalah kemungkinan memunculkan perpecahan dalam kehidupan masyarakat, karena politik identitas merupakan jalan pintas berpolitik untuk meraih kekuasaan dengan memanfaatkan identitas tertentu seperti suku, ras, warna kulit, maupun agama dan lainnya. Di Indonesia sendiri dari semenjak berdirinya sampai sekarang politik identitas selalu mengacu kepada dua bentuk identitas yaitu nasionalis dan agamis[52].

Oleh sebab itu diakui bahwa politik identitas memang bagian dalam perpolitikan di Indonesia, misalnya di sebut oleh Hubertus dan Robertus pada masa perjuangan yang mengedepankan identitas kelompok suku bangsa seperti jong Java, jong Ambon dan lainnya dalam mengusir penjajah. Adapun pasca reformasi hingga sekarang politik identitas banyak ditemui dengan wajah agama; di mana politik identitas dengan basis agama tersebut dikawatirkan dapat menimbulkan perpecahan nasional, karna pada satu titik politik identitas dengan basis agama menginginkan berdirinya negara *khilafah* berdasarkan syariat Islam oleh kelompok agama, sebut saja misalnya HTI, FPI dan

[51]Andre P. Perdana dan Muslih, "Dampak Politik Identitas Pada Pemilian Umum 2024 Mendatang", *Jurnal Kelitbangan*, Vol 11, No 2, 2023, h 234.

[52]Andre P. Perdana dan Muslih, "Dampak Politik Identitas Pada Pemilian Umum 2024 Mendatang", *Jurnal Kelitbangan*, Vol 11, No 2, 2023, h 228.

lain sebagainya[53]. Tentu hal tersebut akan menimbulkan konflik besar dan memakan korban jiwa, seperti contoh peristiwa GAM (Gerakan Aceh Merdeka)[54] atau pada saat sekarang yaitu aksi separatis sebagian masyarakat Papua yang ingin merdeka dan tidak terlepas dari identitas yang diusungnya.

Mengutip dari Andre dan Muslih, bahwasanya politik identitas dapat mengancam kestabilan nasional, tidak demokratis dan memicu pertikaian. Demikian itu terlihat pada bagaimana terjadinya disharmoni kehidupan akibat politik identitas di Indonesia dengan basis agama atau politisasi agama pada pemilu 2019 dan Pilkada DKI 2017. Andre dan Muslih menyatakan beberapa bahaya dari praktik politik identitas yaitu: mengancam keutuhan NKRI, menimbulkan adu domba/ perpecahan, ancaman terhadap pluralisme, menimbulkan polarisasi dan fragmentasi kekuatan politik, serta membawa perselisihan/konflik[55].

Uraian di atas memberitahu bahwa dewasa ini dalam relasi agama dan negara masih ada politisasi agama dengan bentuk politik identitas. Demikian tersebut merupakan relevansi dengan ide sekularisasi Nurcholish; di mana telah disampaikan di awal bab bahwa ide sekularisasi selain berlandaskan Tauhid juga berkenaan dengan politisasi agama. M. Nur Ilham dkk menyatakan bahwa menurut Nurcolish politik dengan motif agama cenderung mengakibatkan perpecahan dalam masyarakat. Demikian dinyatakan sebagai suatu hal yang dapat memperburuk sekte antar kubu agama, terlebih lagi akan mengabaikan kepentingan nasional, karena politik identitas dengan basis agama hanyalah kepentingan jangka pendek semata[56].

---

[53]Hubertus Herianto dan Robertus Wijanako, "Populisme Berwajah Politik Identitas Keagamaan di Indonesia", *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol 5, No 1, 2022, h 59-60.

[54]Aldo Faruqi Tutukansa, "Maraknya Pengaruh Kompleks Politik Identitas di Indonesia", *Khazanah*, Vol 14, No 1, 2022, h. 28.

[55]Andre P. Perdana dan Muslih, "Dampak Politik Identitas Pada Pemilian Umum 2024 Mendatang", *Jurnal Kelitbangan* 2023, Vol 11, No 2, h 228-231.

[56]M. Nur Ilham dkk, "Telaah Pemikiran Nurcholish Majid Tehadap Politik Identitas", *Tasamuh,* Vol 16, No 2, 2024, h 272.

Hal di atas memberitahu bahwa ide sekularisasi yang diusung oleh Nurcholish terkait politisasi agama pada saat sekarang juga terjadi, bahkan lebih bahaya lagi; di mana dahulunya ide sekularisasi Nurcholish merupakan upaya menyangkal praktik yang dilakukan oleh para elitis berupa partai, namun dewasa ini menjadi kebiasaan yang populis. Demikian itu dibuktikan oleh Hubertus dan Robertus dalam penelitiannya yang berjudul "Populisme Berwajah Politik Identitas Keagamaan di Indonesia"[57]. Oleh sebab itu menjadi kelogisan untuk mengusung kembali atau merekonstruksi ide sekularisasi Nurcholish Majid dengan tawaran wacana koeksistensi.

Koeksistensi merupakan persoalan dewasa ini yang banyak disuarakan dalam beberapa literatur sebagai jalan tengah teradap masyarakat yang multikultural seperti Indonesia yang majemuk. Koeksistensi secara leksikal merupakan bahasa majemuk yang terdiri dari dua kata, "*ko"* dan "*sistensi"*. Ko berarti bersama atau dengan, sedangkan sistensi berarti berada, sehingga secara literal koeksistensi adalah hidup bersama. Sementara dalam KBBI menunjukkan arti koeksistensi sebagai keadaan hidup berdampingan secara damai antara dua negara atau lebih yang berbeda atau bertentangan pandangan politiknya[58].

Syamsul Alam dalam kutipannya pada *Cambridge Dictionary of American English*, menyebutkan Koeksistensi merupakan hidup atau berada bersama secara damai di tempat yang sama, sementara dalam *The American Heritage Dictionary* disebutkan koeksistensi sebagai: 1) berada bersama pada saat yang sama di tempat yang sama; 2) hidup damai bersama orang lain meskipun terdapat perbedaan. Oleh sebab itu Syamsul Alam menyatakan koeksistensi agama merupakan keadaan di mana berbagai agama dapat hidup berdampingan secara harmonis

[57]Lihat: Hubertus Herianto dan Robertus Wijanako, "Populisme Berwajah Politik Identitas Keagamaan di Indonesia", *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol 5, No 1, 2022.

[58]*KBBI Online*: (diakses pada 16 Januari 2025)

dalam masyarakat dengan nilai saling pengertian, toleransi dan bekerja sama[59].

Tujuan dari konsep koeksistensi adalah untuk mengubah hubungan sosial politik, struktur dan wacara demi meminilisir perpecahan dan konflik lainnya dalam kehidupan masyarakat[60]. Weiner melalui Asep L. Hamid menyatakan bahwa koeksistensi merupakan keadaan hidup bersama yang saling menghormati perbedaan dan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, sementara Toyese Adesokan menekankan koeksistensi sebagai hidup damai yang bergantung pada pengertian dan toleransi[61].

Berdasarkan hal di atas, maka sebagai bentuk pengembangan dan inovasi gagasan ide sekularisasi Nurcholish Majid, dalam hal ini dikemukakan wacana "koeksistensi" sebagai tawaran rekonstruksi. Sebelumnya telah disebutkan bahwa tawaran wacana koeksistensi disebabkan oleh praktik politisasi agama yang marak dewasa ini, yaitu politik identitas dengan basis agama. Lain sisi, tawaran wacana koeksistensi merupakan upaya kontekstualisasi zaman dalam menyikapi relevansi ide sekularisasi Nurcholish terkait persoalan politisasi agama dewasa ini.

Dalam pada itu, koeksistensi sebagai wacana ide sekularisasi merupakan konsep yang sejalan dengan pemikiran Nurcholish, yaitu tentang pluralisme atau mengakui dan menghormati keberagaman; di mana konsep ini mengakui kebenaran tidak hanya berdasarkan satu identitas dalam konteks keindonesian. Nurcholish menyatakan dengan toleransi dan pengakuan

---

[59]Syamsul Alam, "Kerukunan Dalam Beragama: Koeksistensi Antar Agama Dalam Upacara Rambu Solo Tanah Toraja", *Sosioreligius,* Vol 8, No 1, 2023, 5.

[60]Syamsul Alam, "Kerukunan Dalam Beragama: Koeksistensi Antar Agama Dalam Upacara Rambu Solo Tanah Toraja", *Sosioreligius,* Vol 8, No 1, 2023, 5.

[61]Asep L. Hamid, "Analisis Fenomenologi Koeksistensi Damai Antara Muslim dan Penghayat Kebatinan Perjalanan di Desa Pakutandang, Ciparay, Kabupaten Bandung", *Sosiologi USK: Media Pemikiran dan Aplikasi*, Vol 18, No 1, 2024, h 106.

terhadap pluralitas merupakan modal utama umat Islam Indonesia dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapinya[62].

Oleh sebab itu, wacana koeksistensi dapat memenuhi asas universal kehidupan masyarakat terkait politik identitas, karena koeksistensi merupakan kondisi kehidupan yang harmonis dengan saling toleransi antar beragam latar belakang identitas dan pandangan politik, sehingga tidak hanya fokus pada satu identitas untuk dikecualikan, dimuliakan atau dibenarkan; melainkan pandangan yang sama kepada seluruh identitas yang memungkin dalam praktik politik identitas seperti suka, ras dan lainnya.

Berdasarkan unsur sejalan antara pemikiran Nurcholish dengan konsep koeksistensi, menunjukkan bahwa pemikiran Nurcholish Majid sendiri mengandung nilai koeksistensi di dalamnya, seperti moderasi beragama yang menjunjung toleransi dan mengakui keberagaman atau pluralitas. Siti N. Auliani menyebutkan moderasi beragama yang didorong oleh Nurcholish mengedepankan toleransi, pluralitas, dialog dan saling menghormati sebagai tindakan untuk memahami nilai kemanusiaan[63], sementara Syamsul Alam menyebutkan koeksistensi mengedepankan pengertian, toleransi dan kerja sama[64], sehingga koeksistensi dapat menjadi wacana rekonstruksi ide sekularisasi Nurcholish Majid.

Selain hal di atas, mengapa koeksistensi dapat menjadi tawaran wacana rekonstruksi ide sekularisasi Nurcholish adalah untuk membangun nilai agama yang baik dan tidak kaku dalam tantangan zaman; di mana koeksistensi dengan toleransi dan tanpa intimidasi dapat menunjukkan bagaimana agama yang

---

[62]Johan Setiawan, "Pemikiran Nurcolish Majid Tentang Pluralisme Agama Dalam Konteks Keindonesiaan", *Zawiyah,* Vol 5, No. 1, 2019, h 35.

[63]Siti N. Auliani dkk, Pemikiran Nurcholish Majid Tentang Moderasi Beragama:Relevansinya Dalam Mengahadapi Radikalisme di Indonesia", *Aklak*, Vol 2, No1, 2025, h 195.

[64]Syamsul Alam, "Kerukunan Dalam Beragama: Koeksistensi Antar Agama Dalam Upacara Rambu Solo Tanah Toraja", *Sosioreligius,* Vol 8, No 1, 2023, 5.

sebenarnya atau dalam konsep sekularisasi disebutkan untuk menunjukkan substansi Islam. Sebagai contoh, dapat menyangkal paham radikalisme dalam beragama. Hal tersebut dibuktikan oleh Siti N. Auliani dkk dalam sebuah penelitian; bahwasanya dengan menunjukkan nilai koeksistensi dalam pemikiran Nurcholish seperti kebebasan, toleransi, plural dan lain sebagainya dapat mencegah paham radikalisme[65].

Menyikapi hal tersebut, maka konsep koeksistensi dapat menjadi tawaran baru sebagai wacana rekonstruksi ide sekularisasi Nurcholish Majid, karena mengedepankan nilai universal terhadap kehidupan masyarakat dalam perbedaan kepentingan politik. Bahkan disebutkan Moch Qoyum Mahfud, konsep koeksistensi tidak hanya dapat menjadi jalan keluar terhadap persoalan politisasi agama seperti politik identitas tapi juga dapat menjadi jalan keluar atas konfrontasi antara Timur dan Barat atau Islam dan Kristen selama ini[66].

Oleh sebab itu, tawaran wacana ini merupakan upaya untuk mengatasi problematika politik identitas; di mana koeksistensi merupakan kondisi hidup bersama secara damai atas beragam latar belakang identitas dan pandangan politik. Sehingga dengan sekularisasi sebagai koeksistensi dapat mengatasi persoalan politisasi agama dewasa ini (politik identitas) dengan tidak mempolitisasi identitas dalam menjaga keharmonisan hidup masyarakat.

---

[65]Lihat: Siti N. Auliani dkk, Pemikiran Nurcholish Majid Tentang Moderasi Beragama:Relevansinya Dalam Mengahadapi Radikalisme di Indonesia", *Aklak*, Vol 2, No1, 2025

[66]Lihat: Moch Qoyum Mahfud, "Dialog Islam-Kristen Antara Ahmed Al-Tayyeb dan Paus Fransiskus Dalam Mewujudkan Hubungan Perdamaian Timur dan Barat Untuk Koeksistensi Manusia, *Alhusna Islamika*, Vol 1, Issue 1, 2024.

BAB V:
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisis yang telah penulis lakukan dalam penelitian *Tesis* ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Nurcholish Majid merupakan pemikir pembaharu Islam yang bijak, moderat dan berwawasan luas. Hal tersebut terlihat pada pemikiran-pemikirannya yang progresif atau maju, terutama pada aspek Islam dan politik; di mana Nurcholish lebih mengedepankan peranan moral dalam berpolitik. Cara pandang Nurcholish tersebut melalui gagasan yaitu:
   a. Sekularisasi, merupakan sebuah gagasan desakralisasi, yaitu hanya mensakralkan Tuhan semata atau tidak mensakralkan yang profan. Gagasan sekularisasi ini adalah upaya Nurcholish untuk menempatkan agama pada tempat yang sebenarnya atau dengan bahasa Nurcholish yaitu tidak mensakralkan yang temporal dan secara umum diingat dengan melangitkan yang langit dan membumikan yang bumi.
   b. Pluralisme, selain gagasan sekularisasi Nurcholish sebagai pemikir yang bijak, moderat dan berwawasan luas juga mengakui akan keberagaman bangsa atau kemajemukan Indonesia. Di mana konsep pluralisme yang diakui Nurcholish adalah mengedepankan toleransi dan dialog sebagai jalan keluar. Nurcholish menyatakan toleransi dan mengakui pluralitas merupakan modal utama muslim Indonesia untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi Indonesia.
2. Nurcholish Majid merupakan pemikir muslim yang kontroversial. Meskipun pemikiran-pemikirannya telah membuka wacana baru dalam pemikiran Islam di Indonesia, akan tetapi tidak semua kalangan muslim yang menerima pemikiran Nurcholish, bahkan di antaranya ada yang menuding Nurcholish sebagai sekularis dan agen Barat yang menaruh curiga kepada

Islam. Namun seiring berjalannya waktu, pemikiran Nurcholish tentang sekularisasi dapat diterima oleh kalangan muslim. Demikian itu karena Nurcholish membedakan antara sekularisasi dengan sekularisme; di mana sekularisasi menempatkan agama sebagai nilai yang transenden sedangkan sekularisme memisahkan antara agama dengan negara, dan hal itu ditolak ole Nurcholish Majid.

3. Pemikiran-pemikiran Nurcolish terkait hubungan agama dan negara masih sangat relevan untuk masa kini, bahkan dapat menjadi solusi yang tepat bagi polarisasi yang sempat melanda kehidupan politik masyarakat sepuluh tahun terakhir yang berdampak pada disharmoni kehidupan bernegara, bukan hanya pada masyarakat luas tapi sampai pada tingkat keluarga. Dengan memahami bahwa berpolitik masuk kategori profan atau bukan transenden seorang muslim seharusnya tidak terjebak pada politisasi agama yang digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingannya. Sehingga dengan demikian, rekonstruksi pemikiran Nurcholish Majid terkait relasi agama dan negara masih sangat relevan bahkan sebuah keniscayaan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian Tesis ini, penulis ingin memberi saran kepada pembaca maupun peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan lagi baik terkait filsafat politik Islam maupun pemikiran Nurcholish Majid dengan melihat dari berbagai sudut pandang dan pendekatan. Pembaca ataupun Peneliti selanjutnya dapat menggali lebih dalam berbagai aspek filsafat Politik Islam atau pemikiran Nurcholish Majid, seperti mendekonstruksi pemikiran politik, bagaimana konsep relasi agama negara dan lain sebagainya. Kajian tersebut dapat dikorelasikan dengan perkembangan zaman seperti isu politik tanah air, politik identitas atau bahkan terkait bagaimana fenomena yang ditunjukkan oleh generasi terbaru sekarang (gen z).

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Amin. 1995. *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Abdullah. Budhy Munawar dkk. 2022. *Pemikiran Islam Nurcholish Majid*. (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati dan Lembaga Studi Agama dan Filsafst (LSAF)).

Abidin, Zainal. 2011. *Pengantar Filsafat Barat*. (Jakarta: Rajawali Press).

Albab, Ulil. 2023. "Islam Kultural: Pemikiran Pembaharuan Nurcholish Majid". *Al-Munqidz: Jurnal Kajian KeIslaman*. Volume 11. No. 3.

Alam, Syamsul. 2023. "Kerukunan Dalam Beragama: Koeksistensi Antar Agama Dalam Upacara Rambu Solo Tanah Toraja". *Sosioreligius.* Volume 8. No 1.

Andariati, Leni. 2020. "Filsafat Politik Plato". *Jurnal Review Politik.* Volume 10. No. 01.

Anwar, M. Syafi. 1995. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendikiawan Muslim Orde Baru.* (Jakarta: Paramadina).

Argenti, Gili. 2020. "Ideologisasi Partai Islam Masyumi di Indonesia". *JPI: Jurnal Politikom Indonesiana*. Volume 5. No. 1.

Arif, M Fathurrahman. Muh Iqbal. Asman. 2021. "Dakwah Digital Sebagai Sarana Peningkatan Pemahaman Moderasi Beragama di Kalangan Pemuda". *Jurnal Ilmu Dakwah.* Volume 41. No. 2.

Auliani, Siti N dkk. 2025. Pemikiran Nurcholish Majid Tentang Moderasi Beragama:Relevansinya Dalam Mengahadapi Radikalisme di Indonesia". *Aklak*. Volume 2. No 1.

Azra, Azyumardi. 2000. "Cak Nur: Neo-Modernis atau Neo-Tradisionalis?".*(30 November: http://www.paramadina-online).*

Badar, Muhammad Z. 2020. "Pemikiran Sejarah Kuntowijoyo Dalam Kajian Filsafat Sejarah". *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Basyir, Kunawi.2016. "Ideologi Gerakan Politik di Indonesia". *Al – Tahrir.* Volume 16. No. 2.

Chaplin, James P. 1997. *Kamus Lengkap Psikologi*. (Jakarta: Raja Grasindo Persada).

Danial Muhammad. 2021. "Relasi Agama dan Negara (Studi Komparasi Pemikiran Nurcholis Majid dan Abdurrahman Wahid) ". *Skripsi.* IAIN Jember.

Darussalam, Fajrul I. dan Andi B. Indra. 2021. "Kedaulatan Rakyat dalam Pemikiran Filsafat Politik Montequie". *Jurnal Politik Profetik*. Volume 9. No. 2.

Duryat, Masduki. 2018. *Islam Majemuk: Pengejahwatahan Pendidikan, Interpretasi dan Model Islam keIndonesiaan*. Yogyakarta: K-Media.

Fauzi, Ammar (Penyunting). 2021. *Kitab Filsafat M.T Mizbah Yasdi: Pendekatan Komparatif Filsafat Islam.* (Jakarta: Sadra Press).

Fitri, Nofia. 2015. "Plato dan Aristoteles: Sebuah Telaah Pemikiran Politik Yunani Kuno. *Jurnal Universitas Indonesia.*

Hadi, Sofyan. 2018. "Relasi dan Reposisi Agama dan Negara: Tatapan Masa Depan Keberagaman di Indonesia". *RI'AYAH*. Volume 03. No. 01.

Hadi, Sutrisno. 1999. *Metode Research.* Yogyakarta: Andi Offset.

Hamid, Asep L. 2024. "Analisis Fenomenologi Koeksistensi Damai Antara Muslim dan Penghayat Kebatinan Perjalanan di Desa Pakutandang, Ciparay, Kabupaten Bandung". *Sosiologi USK: Media Pemikiran dan Aplikasi*. Volume 18. No 1.

Handayani, Puji A. Dinie, Angraeni D. 2021. "Implementasi Pancasila sebagai Dasar Negara". *Jurnal Kewarganegaraan.* Volume 5. No. 1.

Handoko, Agus. 2023. "Relasi Agma dan Negara dalam Tafsir Al-Nukat wal Al-'Uyun Karya Al Mawardi". *Disertasi* Universitas PTIQ Jakarta.

Harkaman. 2019. "Relasi Agama dan Negara dalam Al Quran (Studi Komparasi Tafsir Al Azhar dan Al Misbah)". *Tesis* Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran Jakarta.

Hawi, Akmal. 2019. "Prinsip-prinsip Islam tentang Demokrasi: Studi Pemikiran Nurcholish Majid Tahun 1970-2005". *Madina-te: Jurnal Studi Islam.* Volume 15, No. 1.

Hedi. 2019. "Agama Dalam Masyarakat Post Sekularisme Jurgen Habermas". *Penangkaran.* Volume 3. No. 2.

Herianti, Hubertus. Robertus Wijanako. 2022. “Populisme Berwajah Politik Identitas Keagamaan di Indonesia”. *Jurnal Filsafat Indonesia*. Volume 5. No 1.

Hisyam, Muhammad. 2012, ”Tinjauan Buku: Islam Indonesia dan Utopia Negara Sekuler”. *Masyarakat Indonesia*. Volume 38. No. 2.

I.K. Adelia, Desti. 2022. “Relevansi Kisah Nabi Musa dalam Al-Qur’an Surah Al-Qashash Ayat 1-13 dalam Pandangan Tafsir Ibnu Katsir pada Pendidikan Agama Islam, *Skripsi* UIN Ar-Raniry Aceh.

Ilham, M. Nur dkk. 2024. “Telaah Pemikiran Nurcholish Majid Tehadap Politik Identitas”. *Tasamuh.* Volume 16. No 2.

Jannah, Nasitotul. 2017. “Nurcholish Majid dan Pemikirannya (di antara Kontibusi dan Kontroversi)”. *CAKRAWALA: Jurnal Studi Islam,* Volume XII. No. 1.

Jawahir, M. 2016. “Analisis Pemikiran Nurcholis Majid Tentang Politik Islam”. *Skripsi* UIN Walisongo Semarang.

Kamil, Sukron. 2013. *Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, shari’ah dan HAM, Fundamentalisme dan Antikorupsi*. (Jakarta; Kencana).

Khalwani, Ahmad. 2019. “Relasi Agama dan Negara dalam Pandangan Ibnu Khaldun”. *Resolusi*. Volume 2. No. 2.

Khoiril, Bariyyah Indah. 2022. *Relasi Islam dan Negara di Negara Muslim: Studi Komparatif Pemerintahan Recep Tayyep Erdogan di Turki dan Tuan Dr. Muhathir di Malaysia*. (Tanggerang Selatan: BBC Publisher).

Khumaidi, M. Arif. 2021. “Agama dan Negara: antara Teokrasi, Sekuler dan Tamyiz”. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*. Volume 1. No. 4.

Koto, Alaidin dan Wali Saputra. 2016. “Wakaf Produktif di Negara Sekuler: Kasus di Negara Thailand dan Singapura”. *Sosial Budaya,* Volume 13. No. 2.

Lahmi, Ahmad.2015. “Al-Mihnah: dalam Dinasty Abbassiyah Khalifah Al-Ma’mun”. *Santifika Islamica*. Volume 2. No. 2.

Latief, Mohammad. Amal. Amir. 2022. “Problem Sekuler Hubungan Agama dan Negara Menurut Ali Abdul Raziq”. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*

Lismanijar. 2017. “Relasi Agama dan Negara: Analisis Politik Nurcholis Majid”. *Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora.* Volume 5. No. 2.

Madung, Otto Gusti. 2017. *Post-Sekularisme, Toleransi dan Demokrasi.* (Yogyakarta: Ladelero).

Mahfud, Moch Qoyum. 2024. “Dialog Islam-Kristen Antara Ahmed Al-Tayyeb dan Paus Fransiskus Dalam Mewujudkan Hubungan Perdamaian Timur dan Barat Untuk Koeksistensi Manusia, *Alhusna Islamika*. Volume 1. Issue 1.

Majid, Nurcholish. 1987. *Islam Kemodernan dan KeIndonesiaan.* (Bandung: Mizan).

Majid, Nurcholish. 1998. *Dialog Keterbukaan:Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*. (Jakarta: Paramadina).

Majid, Nurcholish. 1999. *Demi Islam.* (Jakarta: Paramadina).

Majid, Nurcholish. 2003. *Indonesia Kita*. (Jakarta: Paramadina).

Majid, Nurcholish. 2020. *Karya Lengkap Nurcholish Majid: Dialog Keterbukaan*. (Jakarta: Nurcholish Majid Society).

Majid, Nurcholish. 2004. *Surat-surat Politik Nurcholish Majid-Muhammad Roem: Tidak Ada Negara Islam.* (Jakarta, Djambatan Klasik).

Maksum, Ali. 2006. *Pengantar Filsafat dari Klasik Hingga Kontemporer.* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media).

Marbun, B. N. 1996. *Kamus Politik*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan).

Medani, Alex. 2017. “Pola Hubungan Agama dan Negara Menurut Farag Fouda dalam Siyasa Sar’iyah”. *Jurnal Hukum Islam Al-Hurriyah,* Volume 2. No. 2.

Monib, M. I. Bahrawi, 2011. *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Majid.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Morfun, Costatinus P. Y. 2023. “Negara Sekuler atau Negara Agama: Tinjauan Hubungan Agama-Negara dari Perspektif Calvinis”. *Fidei: Jurnal Teologi Sistematika dan Praktika.* Volume 6. No. 2.

Muamar, Khalif Muammar. 2020. “Agama dan Negara: Melangkaui Dua Pendekatan yang Ekstrim, *Jurnal Peradaban Islam.* Volume 5. No. 2.

Muhsin. 2016. “Neo-Modernisme Dalam Perspektif Pemikiran Nurcholish Majid”. *AL-MURSHALAH*. Volume 2. No. 1.

Munawar, Budhy R (Pengantar). 2019. *Karya Lengkap Nurcholish Majid,* (Jakarta: Paramadina).

Munawar, Budhy R (Pengantar). 2020. *Karya Lengkap Nurcholis Majid.* (Jakarta: Nurcholis Majid Society).

Munawar, Budhy R. 2022. *Pemikiran Islam Nurcholish Majid*. (UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Lembaga Studi Agama dan Filsafst (LSAF).

Nadiran, Hendri. 2015. "Pemikiran Kalam Hassan Hanafi: Rekonstruksi Epistemologi Keilmuan Kalam dan Tantangan Modernitas". *Intizar.* Volume 21. No. 2.

Nadliroh, Tri Amanatun. 2022. "Relasi Agama dan Negara Perspektif Muhammad Amien Rais". *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Nafis, M. Wahyuni. 2014. *Cak Nur Sang Guru Bangsa: Biografi Pemikiran Prof. Dr. Nurcholish Majid.* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara).

Naim, Ngainum. 2015. "Islam dan Pancasila: Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Majid". *Episteme*. Volume 10. No. 2.

Ngurah Santika, Gusti dkk. 2019. "Membangun kesadaran Integratif Bangsa Indonesia Melalui Reflesksi Perjalanan Historis Pancasiladalam Perspektif Konflik Ideologi". *JED: Jurnal Etika Demokrasi*. Volume 4. No. 2.

Nulhakim. Lukman. 2020. "Konsep pemikiran Sekularisasi Nurcholish Majid Sebuah Fenomena Agama". *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam.* Volume. 6. No. 2.

Nurani, Herlina. Ahmad Ali Nurdin. 2018. "Pandangan Keagamaan Pelaku Bom Bunuh Diri di Indonesia". *Journal of Islamic Studies and Humanities.* Volume. 3, No. 1.

Nurcholish, Ahmad. 2017. *Celoteh Cak Nur.* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo).

Nursri. 2021. "Konsep Manusia Berdasarkan Tinjauan Filsafat: Telaah Aspek Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Manusia", *Forum Paedagogik,* Volume 12. No. 1.

Nursalam dan Susmihira. 2024. "Lahirnya Negara Islam Sekuler Turki dan Ide Pembaharuan Mustafa Kemal Attaturk". *Ahkam*. Volume 3. No. 1.

Perdana, Andre P. Muslih. 2023. “Dampak Politik Identitas Pada Pemilian Umum 2024 Mendatang”. *Jurnal Kelitbangan*. Volume 11. No 2.

Prayetno. Budy. 2017. “Konsep Sekularisasi Dalam Pemikiran Nurcholish Majid”, *Sulesena*, Volume 11. No. 2.

Rahman, Daden Robi. 2016. “Kritik Nalar Hermeneutika Paul Ricoeur”. *Kalimah.* Volume 14. No. 1.

Randa, Syafrinal. 2022. “Memahami Gagasan Dekonstruksi Pemikiran *Turatas* Islam Muhammad Arkoun”. *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Rasyidin, Yusafrida. 2020. “Menjelajahi Pemikiran Politik Nurcholis Majid Tentang Agama dan Negara”. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam.*

Ridho, Miftakhur. 2019. “Negara Islam Indonesia dan Kartosuwiryo: Konsepsi Gerakan Politik, Militer dan Agama”. *Humanistika.* Volume 5. No. 2.

Rinaldy, Rizky dkk. 2020. “Kewajiban Negara dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional”. *Lex Privatum*. Volume 8 No. 2.

Rohman, Abdul. 2020. “Sisi Positif dan Negatif pada Negara Demokrasi di Masa Pandemi”. *Binamulia Hukum.* Volume 9. No. 2.

Rosi, Bahrur. 2017. “Kalimah Sawa’ Sebagai Konsep Teologi Inklusif Nurcolish Majid”. *Skripsi.* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Royani, Yayan M. 2018. “Kajian Hukum Islam Terhadao Ujaran Kebencian / *Hate Speech* dan Batasan Kebebasan Berekspresi”. *Iqtisad.* Volume 5. No. 2.

Sadzali, Ahmad. 2018. *Relasi Agama dan Negara: Teokrasi, Sekuler Tamyiz*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam (PSHI).

Saidi, Ridwan. 2017. “Urgensi Menjaga Kemajemukan dan Toleransi dalam Era Demokrasi”. *Jurnal TAPIs,* Volume 13. No. 2.

Santoso, Agus Edi (penyunting). 1997. *Tidak Ada Negara Islam: Surat-surat Politik Nurcholish Majid- Muhammad Roem*. (Jakarta: Djambatan)

Setiawan, Johan. 2019. “Pemikiran Nurcholish Majid Tentang Plularisme Agama dalam Konteks Keindonesian”, *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam,* Vol. 5, No. 1.

Shaleh, Ali Ismail. Fifiana, Wisnaeni. 2019. “Hubungan Agama dan Negara Menurut Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.* Volume 1. No. 2.

Shihah, Usman. 2019. *Sekitar Epistemologi Islam: Memehami Bangunan Keilmuan dalam Kerangka Wordview Islam*, (Yogyakarta: Bildung).

Soli, M. Fahri Angga dkk. 2024. “Pengaruh Sekularisme Bagi Politik Indonesia”. *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*. Volume 23. No. 1.

Sudarto. 1999. *Metode Penelitian Filsafat.* Jakarta: Rajawali Pres.

Sulbi. 2020. “Agama dan Politik dalam Pandangan Nurcholis Majid”. *Tesis.* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Suraji, Dwi Setyawan. 2016. “Alisis Wacana Kritis dalam Pemaknaan Teks Lagu”. *Seminar Nasional Bahasa dan Pengajarannya (KBSP).* Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Syarifah, Imamah. Ahmad, Fauzan. 2022. “Relasi Negara dan Agama dalam Pemikiran Politik Indonesia (Analisis Pemikiran Politik Nurcholis Majid dan M. Natsir). *Manabia: Journal of Contitutional Law.* Volume 2. No. 1.

Tahman, M. Taufiq dan Asep Saeful M. 2018. “Konsep Politik Islam Kultural Perspektif Nurcholish Majid”. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya.* Volume 3. No. 2.

Tajuddin. M. Saleh. 2021. “Filsafat Politik Nurcholish Majid”. *Jurnal Politik Profetik.* Volume 9. No. 2.

Tanjung, Indra Utama. 2018. “Studi Komparative Pendirian Negara *Khilafah* di Indonesia”. *Jurnal Penelitian Medan Agama.* Volume 9. No. 2.

Tutukansan, Aldo F. 2022. “Maraknya Pengaruh Kompleks Politik Identitas di Indonesia”. *Khazanah*. Volume 14. No 1.

Unwakoly, Semuel Unwakoly. 2022. “Berpikir Kritis dalam Filsafat Ilmu; Kajian dalam Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi”. *Jurnal Filsfat Indonesia*. Volume 5. No. 2.

Yazdi, MT Mizbah. 2021. *Kitab Filsafat: Pendekatan Komparatif Filsafat Islam.* (Jakarta: Sadra Pres).

Yusuf, Muhammad dan Jum Mawalidin. “Pergeseran Pemikiran Nurcholish Tentang Partai Politik Islam di Indonesia. *POLITICA*. Volume 9. No. 1.

Zulfikar. 2022. “Sekularisasi Politik Menurut Nurcholish Majid dan Relevansinya Terhadap Perkembangan Sistem Politik di Indonesia”. *Tesis* UIN Ar-Raniry Aceh.

Zamakhsari, Ahmad. 2014. “Rekonstruksi Pemikiran Mulla Sadra Dalam Integrasi Keilmuan: Membangun Pendidikan Integratif Non Dikatomik”. *Tesis* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Zamzamy, M. Anantha. 2023. *Dari Guru ke Murid*. Sukabumi: CV Jejak.